



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PENDUDUK BERKUALITAS MENUJU **INDONESIA EMAS**

KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN INDONESIA 2020–2050





PENDUDUK BERKUALITAS MENUJU INDONESIA EMAS

KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN INDONESIA 2020–2050

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2023

PENDUDUK BERKUALITAS MENUJU INDONESIA EMAS: KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN INDONESIA 2020-2050

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : 74 halaman

Penyusun Naskah
Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial

Penyunting
Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial

Penerbit
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa
izin tertulis dari Kementerian PPN/Bappenas.

Penanggungjawab

Suharso Monoarfa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

Pengarah

Maliki

Plt. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Tim Penyusun

Muhammad Cholifihani

(Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial)

Hariyadi

Utin Kiswanti

Chaeruniza Fitriyani

Gayatri Waditra Nirwesti

Yogi Yuniarto

Dea Almira Puspitasari

Erwinda Della Rizmadayanti

Ade Handayani

Dino Cahyadi

Yustafadha Azida Khoiri

Yani Faturochman

Nizar Istighfarli Ramadhan

Fikri Brillianti

Ucapan Terima Kasih

Ali Said

Parwoto

Budi Setiawan

Sudibyo Alimoeso

Sri Moertiningsih Adioetomo

Terence H. Hull

Omas Bulan Samosir

Chotib

Sukamdi

Desain

Farhan Virga Aditama

Kontak

Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas)

Menara Bappenas, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B2, Kuningan, Karet, Kecamatan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat, serta karunia-Nya sehingga buku “Penduduk Berkualitas Menuju Indonesia Emas: Kebijakan Kependudukan Indonesia 2020-2050” dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini memuat informasi terkini mengenai kondisi kependudukan di Indonesia yang mencakup perkembangan jumlah dan struktur penduduk berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050; arah pembangunan kependudukan; serta respons kebijakan kependudukan untuk menjawab tantangan dan meraih masa depan yang diinginkan.

Pemutakhiran data dan informasi kependudukan Indonesia diperlukan untuk menyusun rencana pembangunan yang akurat. Salah satu dampak perubahan struktur penduduk yang sangat penting untuk rencana pembangunan adalah momentum bonus demografi. Melalui investasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Indonesia diharapkan mampu memetik bonus demografi untuk memperoleh manfaat ekonomi yang besar sehingga mampu keluar dari *middle income trap country*. Selain investasi peningkatan kualitas SDM, diperlukan juga strategi dan arah kebijakan yang mempertimbangkan transisi penduduk di daerah serta potensi pertumbuhan penduduk lanjut usia di masa depan, agar bonus demografi dapat dioptimalkan dan bahkan diperpanjang hingga mencapai bonus demografi kedua.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Buku ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat dan daerah, serta menjadi rujukan bagi akademisi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, swasta, maupun masyarakat luas. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan buku “Penduduk Berkualitas Menuju Indonesia Emas: Kebijakan Kependudukan Indonesia 2020-2050” pada masa yang akan datang.

Jakarta, 11 April 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Suharso Monoarfa

"Jika tidak disiapkan secara serius pertumbuhan pesat masyarakat tersebut bisa memicu permasalahan mulai dari masalah kepadatan hingga kemiskinan, masalah lingkungan dan ketersediaan ruang publik, ketersediaan infrastruktur dasar terutama air bersih dan sanitasi," katanya saat memperingati Hari Habitat Dunia"

- Ir. Joko Widodo-

Disampaikan pada Hari Habitat Dunia, Senin (5/10/2020)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	vii
DAFTAR ISTILAH	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi



01 PENDUDUK INDONESIA 1

1.1 Perubahan Jumlah dan Struktur Penduduk Indonesia	5
1.2 Variansi Antarprovinsi	8
1.3 Transisi Demografi	10
1.4 Kualitas Penduduk	15
1.5 Mobilitas dan Persebaran Penduduk	17

03 OPTIMALISASI BONUS DEMOGRAFI 33

3.1 Definisi dan Periodisasi Bonus Demografi	35
3.2 Bonus Demografi di Berbagai Negara	36
3.3 Bonus Demografi dalam Regulasi	36
3.4 Tantangan Pembangunan Kependudukan di Era Bonus Demografi	37
3.5 Komponen Utama dalam Memetik Bonus Demografi	37
3.6 Memperpanjang Bonus Demografi	38
3.7 Optimalisasi Bonus Demografi dan Mencapai Bonus Demografi Kedua	39

02 MASA DEPAN YANG DIINGINKAN 19

2.1 Arah Pembangunan Kependudukan	21
2.2 Proyeksi Penduduk	22
2.3 Hasil Perhitungan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050	27
2.4 Perkembangan Struktur Penduduk	29

04 RESPON KEBIJAKAN TERHADAP PERUBAHAN DEMOGRAFI 45

4.1 Mewujudkan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang	47
4.2 Pendidikan Sepanjang Hayat	48
4.3 Kesehatan Masyarakat	50
4.4 Perlindungan Sosial	51
4.5 Mempersiapkan Lansia Mandiri	52
4.6 Ketenagakerjaan	53
4.7 Kewirausahaan	54
4.8 Pangan dan Lingkungan	54
4.9 Mendorong Perpindahan Penduduk yang Merata	55

DAFTAR PUSTAKA	56
----------------	----

DAFTAR TABEL

17

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Pulau 1971-2020

27

Tabel 5. Hasil Proyeksi Penduduk 2020-2050 dengan Skenario Moderat

24

Tabel 2. Jumlah Pekerja Migran Indonesia Menurut Asal Provinsi 2020-2022

27

Tabel 6. Hasil Proyeksi Penduduk 2020-2050 dengan Skenario Optimis

26

Tabel 3. Persentase Migrasi Neto Risen Antarprovinsi Hasil *Long Form* SP 2020

49

Tabel 7. Rata-rata Nilai PISA 2018

27

Tabel 4. Hasil Proyeksi Penduduk 2020-2050 dengan Skenario Tren

DAFTAR GAMBAR

3

Gambar 1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Dunia 1950-2023

3

Gambar 2. *Total Fertility Rate* (TFR) dan Usia Harapan Hidup Penduduk Dunia 1950-2023

4

Gambar 3. Sepuluh Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak 2023 (dalam juta jiwa)

5

Gambar 4. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia 1961-2020

5

Gambar 5. Peran Program Keluarga Berencana (KB) dalam Pembangunan

6

Gambar 6. Nilai TFR Indonesia 1971-2020

6

Gambar 7. Dampak Positif Program Keluarga Berencana

6

Gambar 8. IMR dan Usia Harapan Hidup Saat Lahir 1971-2020

7

Gambar 9. Struktur Penduduk dan Rasio Ketergantungan Indonesia 1971-2020

7

Gambar 10. Persentase Penduduk Lanjut Usia Indonesia 2010, 2015, dan 2020

8

Gambar 11. Perbandingan TFR Provinsi 1971, 2015, dan 2020

9

Gambar 12. Perbandingan IMR Provinsi 1971 dan 2020

11

Gambar 13. TFR, IMR, Persentase Penduduk Usia Muda, Persentase Penduduk Usia Produktif, dan Rasio Ketergantungan di Provinsi dalam Fase Transisi Akhir dan Fase Transisi Awal

13

Gambar 14. TFR, IMR, Persentase Penduduk Usia Muda, Persentase Penduduk Usia Produktif, dan Rasio Ketergantungan di Provinsi dalam Fase Menjelang Transisi dan Fase Ketidakpastian Transisi

DAFTAR GAMBAR

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 15 | Gambar 15. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dan Indikator Pembentuknya Tahun 2010-2020 | 28 | Gambar 30. Piramida Penduduk Tahun 2045 berdasarkan Skenario Tren |
| 16 | Gambar 16. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Per Provinsi Tahun 2020 | 28 | Gambar 31. Piramida Penduduk Tahun 2045 berdasarkan Skenario Moderat |
| 16 | Gambar 17. Nilai <i>Human Development Index</i> (HDI) Beberapa Negara ASEAN Tahun 2020 | 29 | Gambar 32. Piramida Penduduk Tahun 2045 berdasarkan Skenario Optimis |
| 18 | Gambar 18. Migrasi Seumur Hidup Neto 2019-2020 | 29 | Gambar 33. Perbandingan Penduduk Usia Muda Tahun 2020-2050 Skenario Tren (dalam ribu jiwa) |
| 18 | Gambar 19. Angka Migrasi Internasional (per 1.000 penduduk) | 29 | Gambar 34. Perbandingan Penduduk Usia Muda Tahun 2020-2050 Skenario Moderat (dalam ribu jiwa) |
| 22 | Gambar 20. Skenario Proyeksi Penduduk 2020-2050 | 30 | Gambar 35. Perbandingan Penduduk Usia Muda Tahun 2020-2050 Skenario Optimis (dalam ribu jiwa) |
| 23 | Gambar 21. Proyeksi Nilai TFR Indonesia 2020-2050 | 30 | Gambar 36. Perbandingan Penduduk Lanjut Usia Tahun 2020-2050 Skenario Tren (dalam ribu jiwa) |
| 24 | Gambar 22. Proyeksi Nilai IMR dan UHH Indonesia 2020-2050 | 30 | Gambar 37. Perbandingan Penduduk Lanjut Usia Tahun 2020-2050 Skenario Moderat (dalam ribu jiwa) |
| 24 | Gambar 23. Angka Imigrasi Internasional Hasil SUPAS 2015 dan LF SP 2020 | 31 | Gambar 38. Perbandingan Penduduk Lanjut Usia Tahun 2020-2050 Skenario Optimis (dalam ribu jiwa) |
| 25 | Gambar 24. Alasan Penduduk Berpindah ke Luar Negeri Tahun 2015 | 31 | Gambar 39. Perbandingan Penduduk Usia Produktif Tahun 2020-2050 Skenario Tren (dalam ribu jiwa) |
| 25 | Gambar 25. Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2014-2022 | 32 | Gambar 40. Perbandingan Penduduk Usia Produktif Tahun 2020-2050 Skenario Moderat (dalam ribu jiwa) |
| 25 | Gambar 26. Negara Tujuan Migran Indonesia 2020-2022 | 32 | Gambar 41. Perbandingan Penduduk Usia Produktif Indonesia Tahun 2020-2050 Skenario Optimis (dalam ribu jiwa) |
| 26 | Gambar 27. Proyeksi Jumlah dan Komposisi Migran Masuk IKN | | |
| 26 | Gambar 28. Proyeksi Jumlah Tenaga Kerja Migran dan Keluarga/Dependen Tenaga Kerja IKN 2045 | | |
| 28 | Gambar 29. Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2020 | | |

DAFTAR GAMBAR

- 32 Gambar 42. Perbandingan Penduduk Usia 14-25 Tahun 2020-2050 Skenario Tren dan Optimis (dalam ribu jiwa)
- 35 Gambar 43. Rasio Ketergantungan dengan Berbagai Skenario
- 38 Gambar 44. Perbandingan Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Efektif Produktif di DKI Jakarta Tahun 2022
- 39 Gambar 45. Bonus Demografi Pertama Menurut Skenario Proyeksi Penduduk Tahun 2020-2045
- 40 Gambar 46. Konsumsi dan *Labor Income per Capita* per Usia Tunggal di Indonesia (2012) Dibandingkan dengan Amerika Serikat (2010)
- 41 Gambar 47. Produktivitas Angkatan Kerja pada Provinsi Terpilih
- 42 Gambar 48. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin
- 48 Gambar 49. Proyeksi Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun, Jumlah Kelahiran, dan TFR Indonesia 2020-2050 (Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Skenario Optimis)
- 49 Gambar 50. Proyeksi Penduduk Usia 0-14 Tahun dan TFR Indonesia 2020-2050 (Skenario Optimis)
- 49 Gambar 51. Proyeksi Penduduk Usia Sekolah (7 – 23 Tahun) Indonesia 2020-2050
- 50 Gambar 52. Proyeksi Penduduk Usia 60+, IMR, dan UHH Indonesia 2020-2050
- 52 Gambar 53. Proyeksi Proporsi Lansia 2020-2050 (Skenario Optimis)
- 53 Gambar 54. Persiapan Tenaga Kerja Sejak Dini
- 54 Gambar 55. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Pendidikan yang Ditamatkan 2022

DAFTAR SINGKATAN

A

AI
Artificial Intelligence
AKB
Angka Kematian Bayi
AKI
Angka Kematian Ibu
APK
Angka Prevalensi Kontrasepsi
ASDR
Age Specific Death Ratio
ASEAN
Association of Southeast Asian Nations

C

COVID-19
CoronaVirus Disease-2019

E

EBT
Energi Baru dan Terbarukan

I

IKN
Ibu Kota Nusantara
IMR
Infant Mortality Rate
IPM
Indeks Pembangunan Manusia
IQ
Intelligence Quotient

L

LF
Long Form
LTC
Long-Term Care

N

NRR
Net Replacement Rate

B

Bappenas
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BP2MI
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
BPS
Badan Pusat Statistik
BUMDes
Badan Usaha Milik Desa

D

DIY
Daerah Istimewa Yogyakarta
DKI
Daerah Khusus Ibukota
DPP
Destinasi Pariwisata Prioritas

H

HDI
Human Development Index
HLS
Harapan Lama Sekolah

K

KB
Keluarga Berencana
KEK
Kawasan Ekonomi Khusus

M

MKJP
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

O

OECD
Organization for Economic Co-operation and Development

DAFTAR SINGKATAN

P

PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa

PISA

Programme for International Student Assessment

PMI

Pekerja Migran Indonesia

PPN

Perencanaan Pembangunan Nasional

PUS

Pasangan Usia Subur

S

SDGs

Sustainable Development Goals

SDKI

Survei Demografi dan Keluarga Indonesia

SDM

Sumber Daya Manusia

SP

Sensus Penduduk

SUPAS

Survei Penduduk Antar Sensus

R

RLS

Rata-rata Lama Sekolah

RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

T

TFR

Total Fertility Rate

TPT

Tingkat Pengangguran Terbuka

U

TFR

Total Fertility Rate

TPT

Tingkat Pengangguran Terbuka

UHH

Usia Harapan Hidup

UHHS

Usia Harapan Hidup Sehat

UN DESA

United Nations Department of Economic and Social Affairs

UNDP

United Nations Development Programme

UNFPA

United Nations Population Fund

UMKM

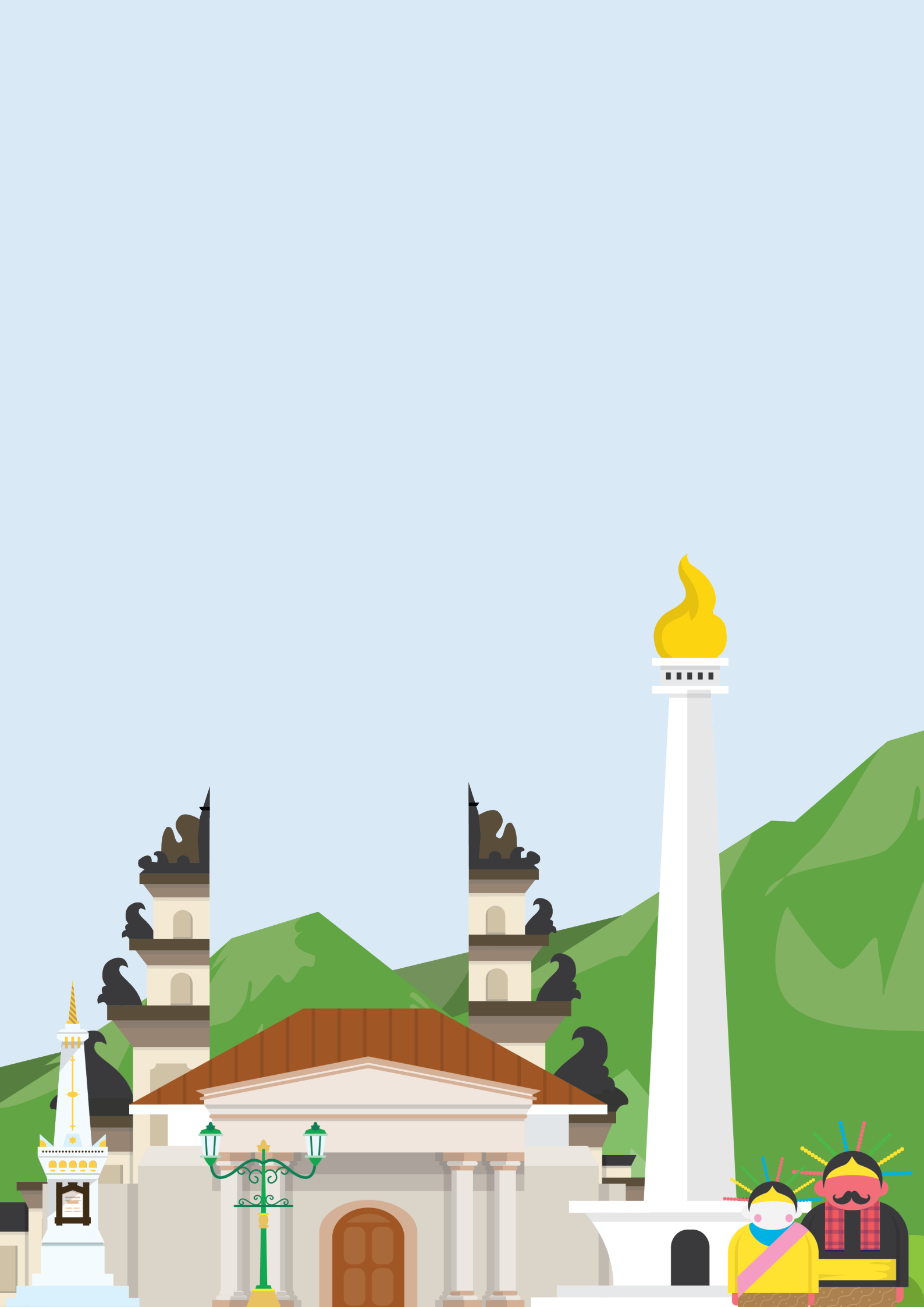
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UU

Undang-Undang

DAFTAR ISTILAH

- **Angka Kematian Bayi (AKB)/*Infant Mortality Rate* (IMR):** Banyaknya kematian bayi usia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.
- **Angka Kelahiran Kasar/*Crude Birth Rate* (CBR):** Banyaknya kelahiran hidup per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun.
- **Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR):** Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan selama masa usia subur (15-49 tahun)
- **Angka Migrasi Neto Per Kelompok Umur/*Age Specific Net Migration Rate* (ASNMR):** Angka rata-rata per tahun pengurangan/ penambahan penduduk karena kejadian migrasi
- **Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur Tertentu/*Age Specific Fertility Rate* (ASFR):** Banyaknya kelahiran selama setahun per 1.000 perempuan pada kelompok umur 15-49 tahun.
- **Angka Kematian Kasar/*Crude Death Rate* (CDR):** Angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1.000 penduduk.
- **Angka Migrasi Neto Internal Antarprovinsi:** Selisih antara angka migrasi masuk internal antarprovinsi dan angka migrasi keluar internal antarprovinsi. Perbandingan selisih antara jumlah migran masuk risen antarprovinsi dengan migran keluar risen antarprovinsi per 100 penduduk yang berpotensi bermigrasi pada suatu provinsi.
- **Angka Migrasi Neto Internasional:** Selisih antara angka migrasi masuk internasional dan angka migrasi keluar internasional.
- **Angka Reproduksi Neto/*Net Reproduction Rate* (NRR):** Jumlah kelahiran hidup dari bayi perempuan oleh kohor hipotesis dari 1.000 wanita sebelum mengakhiri masa reproduksinya.
- **Migrasi Internasional:** Perpindahan penduduk dari negara satu ke negara lain untuk tinggal atau menetap di negara tujuan minimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun tetapi bermaksud untuk menetap.
- **Pertumbuhan Penduduk:** Angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatika, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik.
- **Piramida Penduduk:** Komposisi umur dan jenis kelamin suatu penduduk secara grafis yang digambarkan dalam bentuk piramida.
- **Proyeksi:** Hasil numerik dari seperangkat asumsi tertentu mengenai populasi masa depan.
- **Rasio Jenis Kelamin/*Sex Ratio*:** Perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan
- **Rasio Ketergantungan/*Dependency Ratio*:** Perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif).
- **Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH)/*Life Expectancy at Birth* (E0):** Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Jumlah penduduk dunia diperkirakan terus bertambah hingga mencapai delapan miliar pada tahun 2022 (UN, 2022). Meskipun demikian, laju pertumbuhan diperkirakan terus melambat dan akan mencapai 0,9 persen sejak tahun 2023 (UN DESA, 2022). Perlambatan pertumbuhan penduduk juga terjadi di Indonesia, sebagai hasil dari terus menurunnya tingkat fertilitas. Penurunan tingkat fertilitas diikuti dengan peningkatan usia harapan hidup, yang mengindikasikan keberhasilan berbagai program pembangunan. Di sisi lain, perubahan indikator kependudukan ini mengakibatkan pergeseran piramida penduduk. Struktur penduduk Indonesia pada tahun 2020 didominasi oleh penduduk usia produktif dan diperkirakan sedang berada pada periode akhir puncak bonus demografi. Dalam jangka panjang, Indonesia bergerak menuju *ageing population*. Struktur penduduk yang dinamis tersebut mendorong adanya kebutuhan pemutakhiran data kependudukan serta proyeksi penduduk di masa depan untuk menjadi acuan pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan.

Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, berdasarkan skenario tren, menunjukkan Indonesia memiliki 13 juta penduduk yang lebih banyak pada tahun 2045 dibanding Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045. Selain skenario tren, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 juga menggunakan dua skenario lainnya, yaitu moderat dan optimis. Skenario moderat dan optimis menghasilkan perkiraan jumlah penduduk yang lebih banyak dibanding skenario tren. Seiring dengan penyusunan Transformasi Ekonomi Indonesia, penduduk Indonesia diarahkan selaras dengan proyeksi penduduk skenario optimis. Skenario tersebut menggambarkan kondisi yang paling diinginkan di masa depan melalui penerapan berbagai intervensi kebijakan.

Berdasarkan skenario optimis, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sebesar 329,13 juta pada tahun 2045 dan mencapai 337,99 juta pada tahun 2050. Jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dipertahankan dengan menjaga tingkat kelahiran pada *replacement rate* dan angka *Total Fertility Rate* (TFR) dijaga konstan setelah mencapai 2,0. Selain itu, angka kematian bayi juga perlu terus diturunkan hingga mencapai nilai 4,20 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2045. Pengendalian kuantitas penduduk menuju skenario optimis berimplikasi pada perubahan struktur penduduk di masa depan, antara lain: (1) terus bertambahnya jumlah penduduk produktif hingga tahun 2050; (2) penurunan penduduk usia muda yang lebih lambat; serta (3) peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) yang berdampak pada peningkatan proporsi penduduk lanjut usia (20 persen lebih banyak pada tahun 2045).

Selain pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas penduduk menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan penduduk yang seimbang. Penduduk tumbuh seimbang bertujuan untuk memelihara kesinambungan antara jumlah penduduk usia produktif dengan kapasitas fiskal. Penerapan skenario optimis dapat mempertahankan jumlah penduduk usia produktif lebih lama, serta mempertahankan kapasitas fiskal yang lebih panjang. Sejalan dengan kapasitas fiskal, pertumbuhan penduduk usia produktif juga memengaruhi periodisasi bonus demografi Indonesia. Skenario optimis memperkirakan bonus demografi paling cepat berakhir pada tahun 2039 karena adanya potensi peningkatan penduduk lanjut usia (lansia). Oleh sebab itu, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan bonus demografi guna memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, di antaranya: (1) membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini dengan pendekatan siklus hidup;

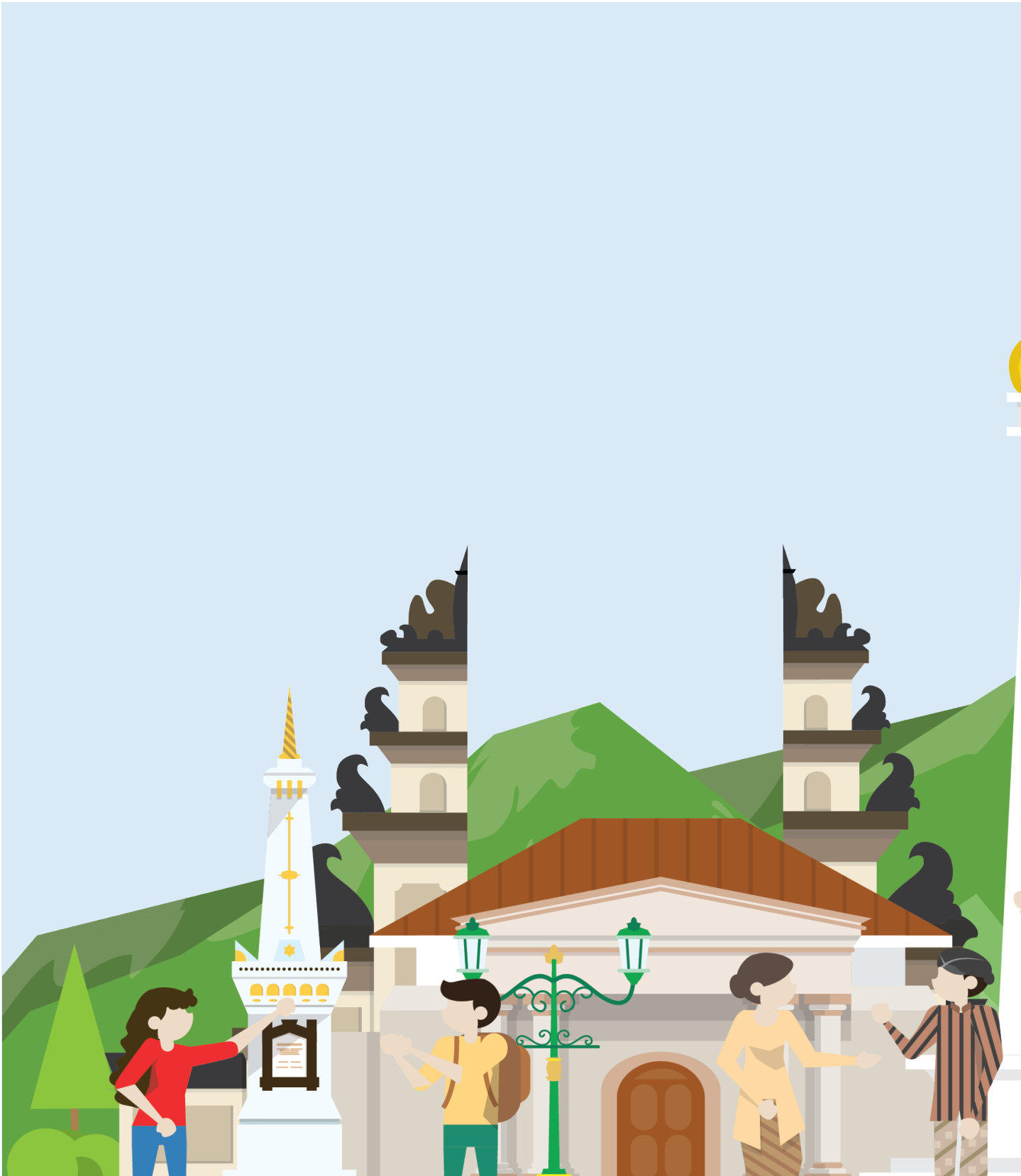
(2) menciptakan lapangan kerja yang berkualitas untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja; (3) meningkatkan produktivitas tenaga kerja; (4) meningkatkan partisipasi kerja perempuan; serta (5) menguatkan literasi keuangan dan investasi.

Menuju tahun 2045, Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan penduduk lansia dan menuju *ageing population* berdasarkan skenario optimis. Apabila Indonesia berhasil menyiapkan penduduk lansia yang sehat dan produktif di masa depan, Indonesia dapat memperpanjang periode bonus demografi yang berlanjut ke tahap kedua. Proporsi penduduk non-produktif pada tahap tersebut lebih banyak disumbang oleh penduduk lansia yang jumlahnya semakin meningkat. Dengan demikian, pemerintah harus mulai menerapkan kebijakan yang menunjang penuaan penduduk. Beberapa program yang dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan antara lain perluasan jaminan sosial, pengembangan program *Long-Term Care* (LTC), memperpanjang usia pensiun, mempromosikan jaminan hari tua, serta mengembangkan skema lapangan pekerjaan ramah lansia.

Selain itu, perubahan struktur penduduk juga berdampak pada faktor lain seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pangan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk perlu dilakukan penghitungan ulang terkait kebutuhan sarana pendidikan dan kesehatan. Sarana pendidikan tingkat awal seperti Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) tidak perlu dibangun di daerah yang mengalami penurunan TFR. Sebaliknya, daerah yang masih memiliki tingkat TFR tinggi seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua memerlukan banyak sarana pendidikan, seperti gedung dan tenaga pengajar. Demikian juga dengan sarana kesehatan, penambahan jumlah lansia yang signifikan pada masa mendatang membutuhkan banyak rumah sakit ramah lansia atau Rumah Sakit Geriatri. Selain itu, dibutuhkan juga pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang memiliki program pendampingan terhadap lansia. Kemudian, pada akhirnya kebutuhan pangan juga mengalami perubahan akibat dari perubahan struktur penduduk. Dengan meningkatnya lansia dan menurunnya penduduk usia muda, bahan pangan yang dibutuhkan akan berbeda, sehingga pemerintah perlu mempersiapkan bahan pangan sesuai dengan kebutuhan penduduk di masa yang akan datang.



01 | PENDUDUK INDONESIA

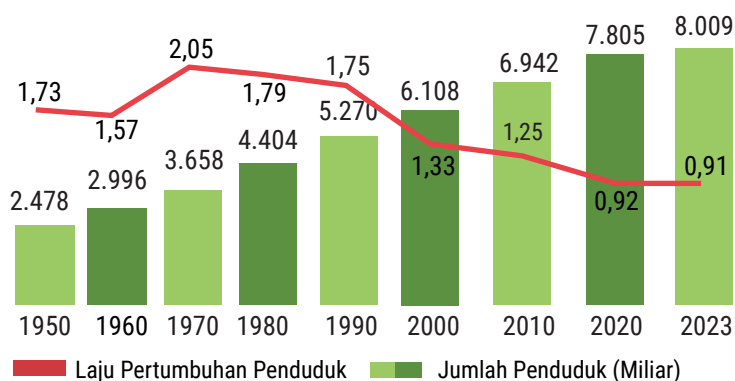




Jumlah penduduk dunia telah mencapai delapan miliar pada November 2022 (UN, 2022). Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan terus melambat hingga berada di bawah 0,9 persen sejak tahun 2023. Perlambatan ini terjadi akibat menurunnya tingkat fertilitas (*Total Fertility Rate/ TFR*) dari 3,3 anak lahir hidup untuk setiap perempuan pada tahun 1990 menjadi 2,3 pada 2023. Kesehatan masyarakat juga meningkat sejalan dengan berkurangnya jumlah anak. Hal ini terlihat dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) dunia selama 10 tahun sejak tahun 1990 dari 63,99 tahun menjadi 73,4 tahun pada tahun 2023.

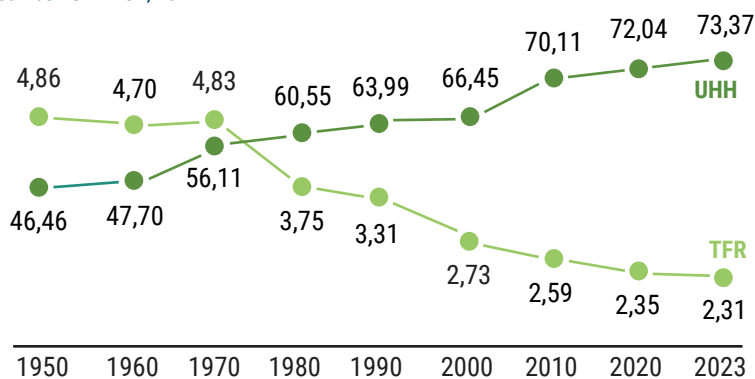
Gambar 1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Dunia 1950-2023

Sumber: UN DESA, 2022

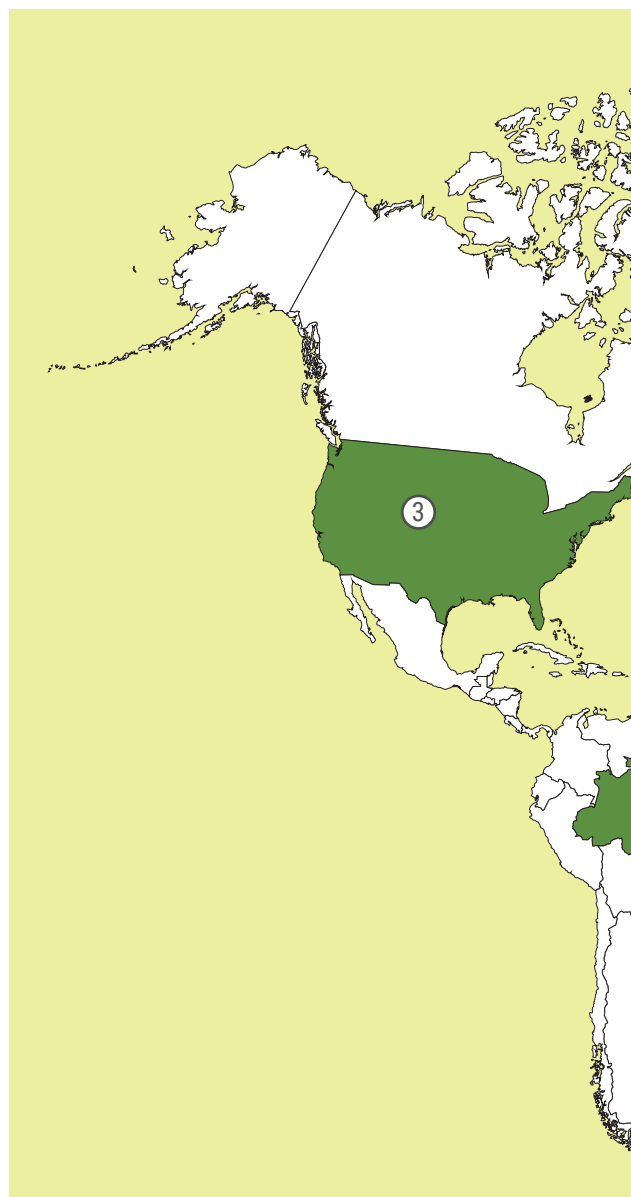


Gambar 2. Total Fertility Rate (TFR) dan Usia Harapan Hidup Penduduk Dunia 1950-2023

Sumber: UN DESA, 2022

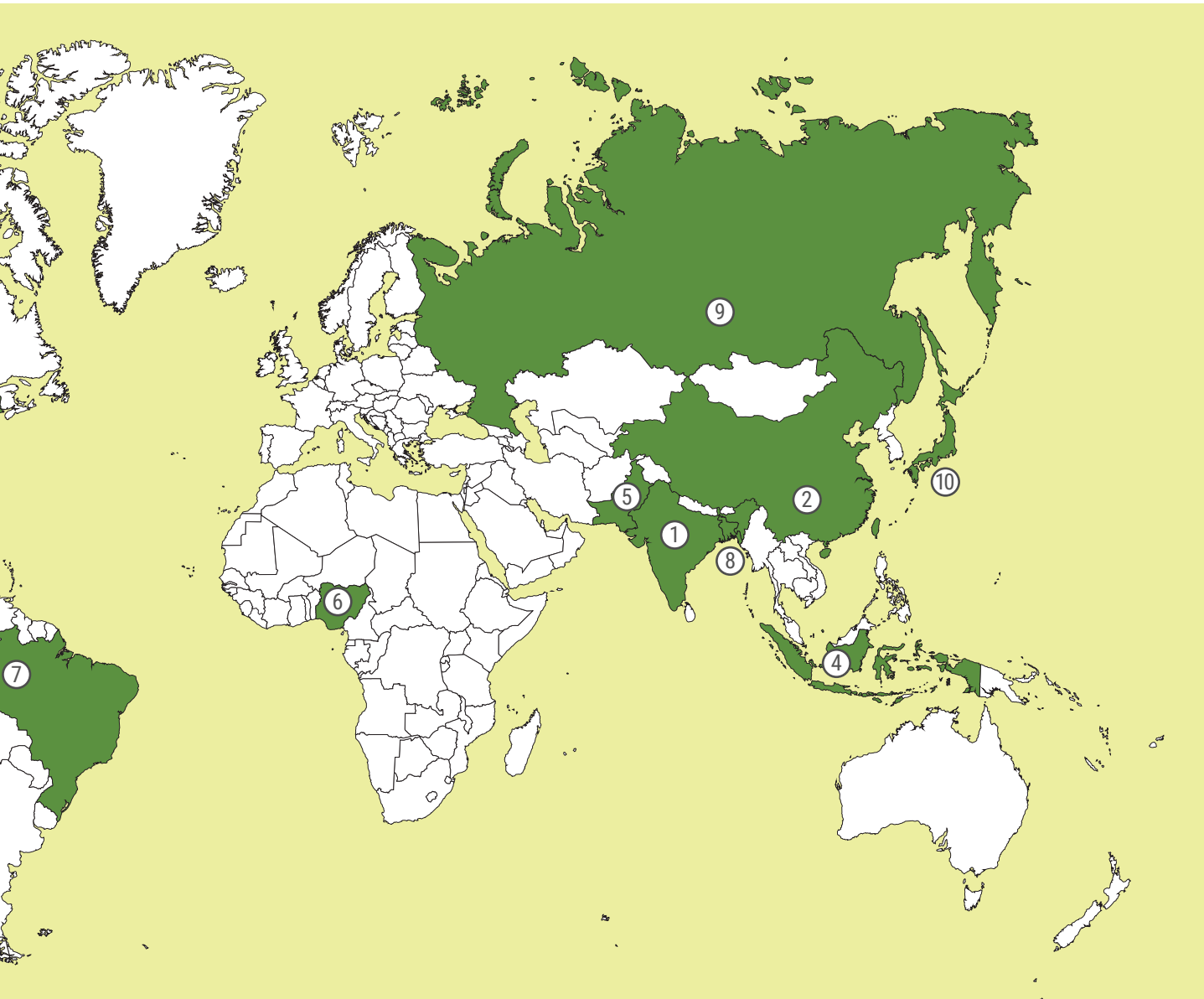


Dengan laju pertumbuhan tersebut, India dengan penduduk sebesar 1,43 miliar diproyeksikan menjadi negara penduduk terbanyak pada pertengahan 2023. Sementara itu, penduduk Indonesia, berdasarkan proyeksi penduduk interim akan mencapai 278,84 juta jiwa pada tahun yang sama. Jumlah ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat sebagai negara dengan penduduk terbanyak setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat.



Gambar 3. Sepuluh Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak 2023 (dalam juta jiwa)

Sumber: UN DESA, 2022 & BPS, 2022



KETERANGAN

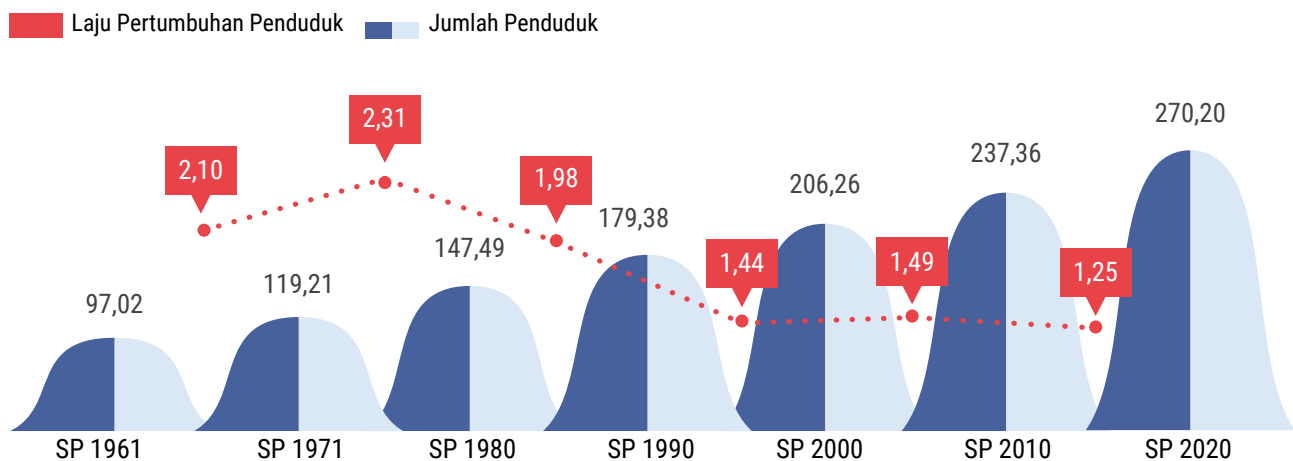
Negara	Jumlah	Negara	Jumlah
1. INDIA	1.425,67	6. NIGERIA	223,805
2. TIONGKOK	1.428,63	7. BRAZIL	216,42
3. AMERIKA SERIKAT	339,99	8. BANGLADES	172,95
4. INDONESIA	278,84	9. RUSIA	144,44
5. PAKISTAN	240,49	10. JEPANG	123,29

1.1 PERUBAHAN JUMLAH DAN STRUKTUR PENDUDUK INDONESIA

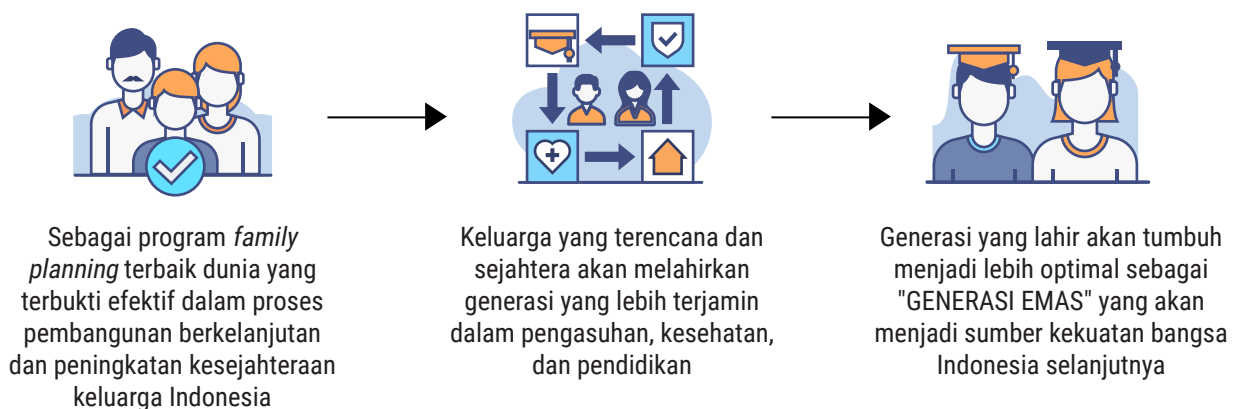
Jumlah penduduk Indonesia terus bertambah, namun pertumbuhan yang terus melambat. Dalam kurun waktu enam dasawarsa, jumlah penduduk Indonesia telah bertambah hampir tiga kali lipat dari 97 juta jiwa pada tahun 1961, menjadi 270 juta jiwa pada tahun 2020. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk Indonesia melambat dari 2,31 persen tahun 1971 menjadi 1,25 persen tahun 2022.

Gambar 4. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia 1961-2020

Sumber: BPS, 2021



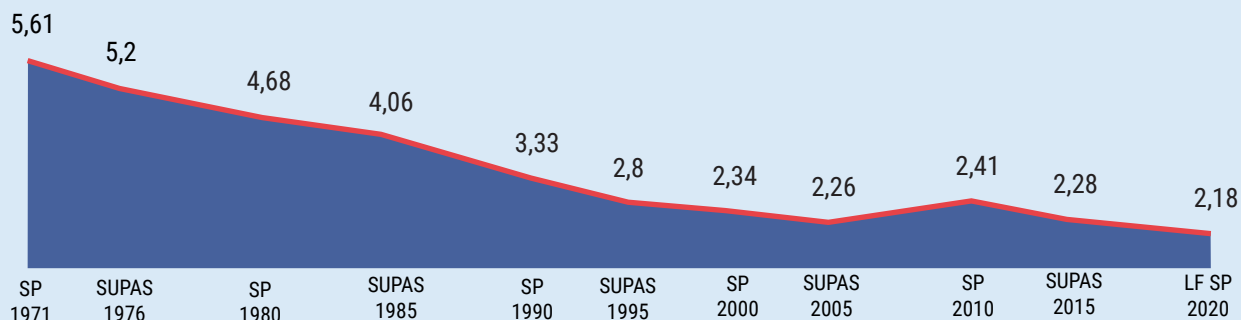
Gambar 5. Peran Program Keluarga Berencana (KB) dalam Pembangunan



Perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebagai bagian dari keberhasilan penurunan tingkat fertilitas. Angka Kelahiran Total (TFR) terus menurun dan mencapai angka 2,18 pada tahun 2020 yang berarti seorang perempuan melahirkan sekitar dua anak selama masa reproduksinya. Nilai ini menurun dalam 30 tahun terakhir dari 3,33 di tahun 1990. Penurunan tingkat fertilitas ini menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana dan pembangunan di sektor-sektor lainnya yang berkontribusi dalam meningkatkan usia perkawinan pertama/usia kawin pertama perempuan, tingkat pendidikan perempuan, dan berkurangnya jumlah anak yang dimiliki setiap perempuan.

Gambar 6. Nilai TFR Indonesia 1971-2020

Sumber: Hasil Pengolahan Data dari Hasil SP, SUPAS, dan LF SP



Gambar 7. Dampak Positif Program Keluarga Berencana

Pelaksanaan program KB memberikan dampak positif pada tiga pokok, yaitu:



- 1 Peningkatan investasi sumber daya manusia



- 2 Peningkatan produktivitas ekonomi yang tercermin dari peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan

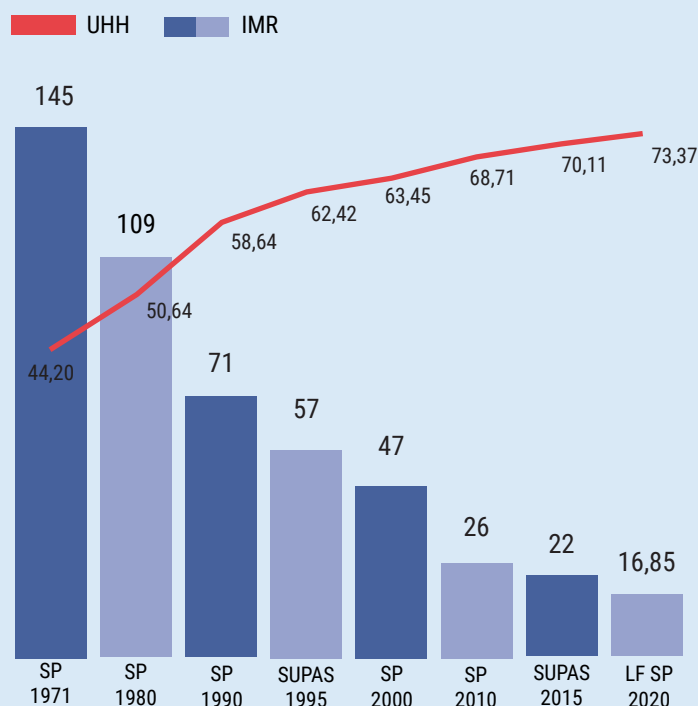


- 3 Peningkatan kualitas hidup perempuan, keluarga, dan masyarakat

Kondisi kesehatan masyarakat juga turut membaik sejalan dengan menurunnya jumlah anak. Angka Kematian Bayi (AKB)/*Infant Mortality Rate* (IMR) dan mengalami penurunan Usia Harapan Hidup (UHH) meningkat. Pada tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010), terdapat 26 kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup. Nilai ini turun hingga mencapai 16,85 berdasarkan hasil LF SP 2020. Usia Harapan Hidup juga turut bertambah dari 68,71 tahun pada hasil SP 2010 menjadi 73,37 tahun pada hasil LF SP 2020.

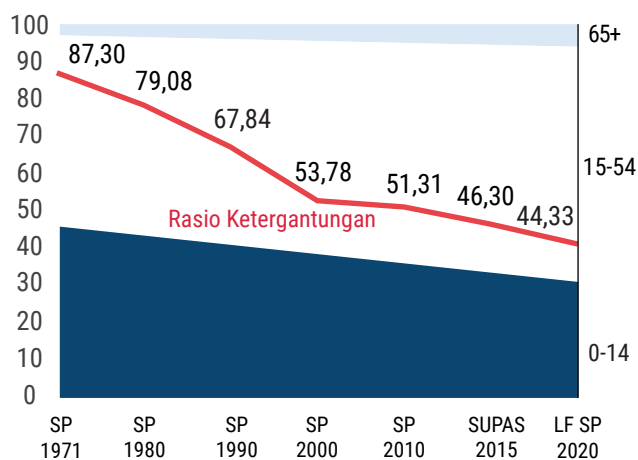
Gambar 8. IMR dan Usia Harapan Hidup Saat Lahir 1971-2020

Sumber: Hasil Pengolahan Data dari Hasil SP, SUPAS, LF SP



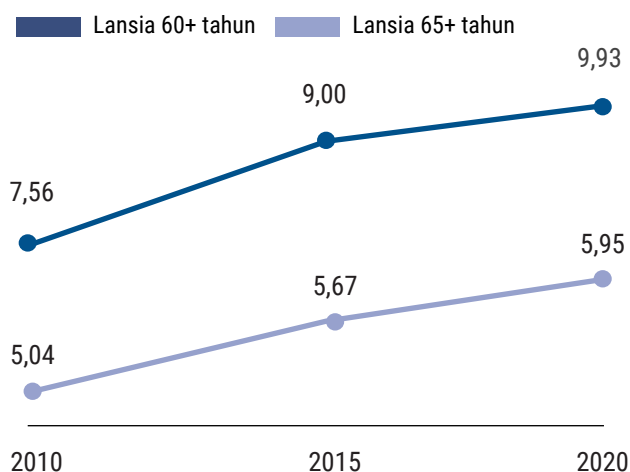
Gambar 9. Struktur Penduduk dan Rasio Ketergantungan Indonesia 1971-2020

Sumber: Hasil Pengolahan Data dari Hasil SP, SUPAS, LF SP



Gambar 10. Persentase Penduduk Lanjut Usia Indonesia 2010, 2015, dan 2020

Sumber: Hasil Pengolahan Data dari Hasil SP, SUPAS, LF SP



Penurunan tingkat fertilitas dan seiring dengan peningkatan kondisi kesehatan masyarakat mendorong perubahan struktur penduduk Indonesia. Piramida penduduk Indonesia secara perlahan bertransformasi dari pola ekspansif menjadi pola tumbuh seimbang. Piramida penduduk Indonesia yang sebelumnya terpusat pada penduduk muda, mulai bergeser dan tersebar merata pada setiap kelompok umur. Hal ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang Baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

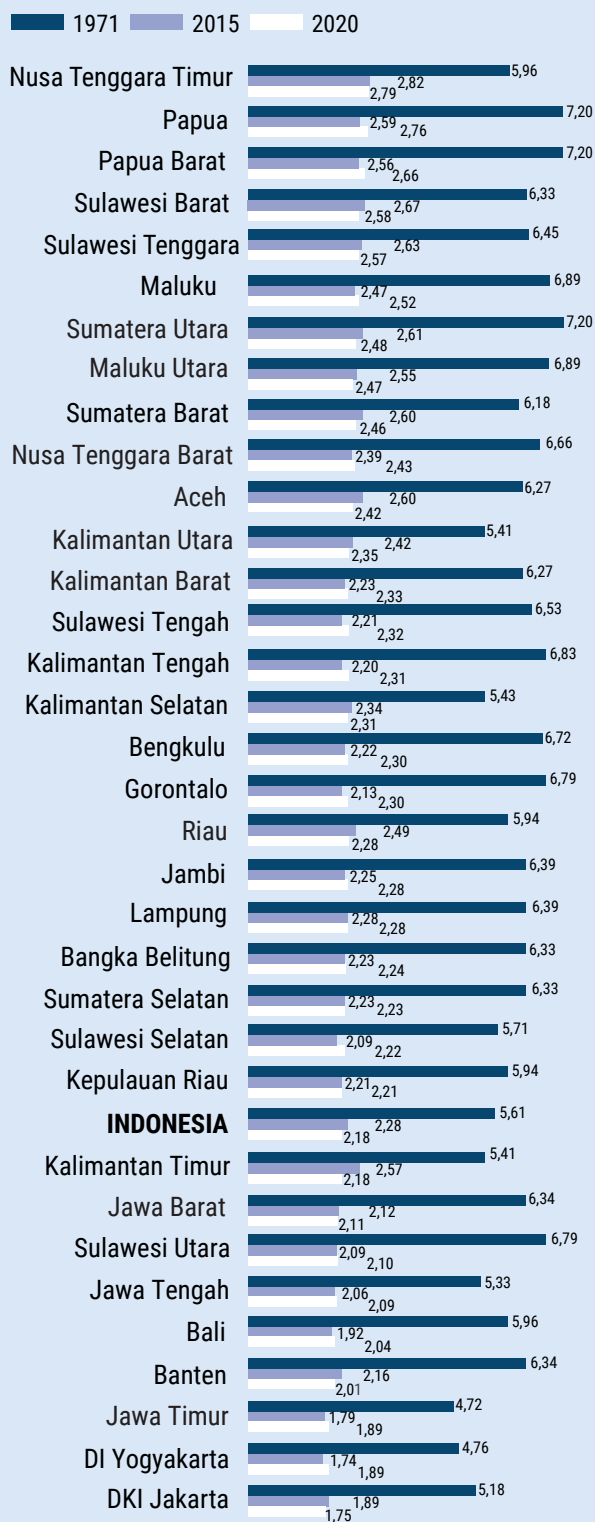
Perubahan struktur penduduk mempengaruhi rasio ketergantungan. Sensus Penduduk 2020 mencatat rasio ketergantungan sebesar 44,3 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) menanggung 44 penduduk usia 0–14 dan 65+ tahun pada tahun 2020. Nilai rasio ketergantungan Indonesia pada tahun 2020 sedikit lebih rendah dibandingkan nilai tahun 2015 (46,3). Dengan kondisi tingkat fertilitas dan usia harapan hidup yang berubah secara lebih cepat dari yang diperkirakan pada tahun 2010 dan 2015, maka Indonesia diperkirakan sedang berada di periode akhir puncak bonus demografi.

Di sisi lain, Indonesia juga sudah memasuki era *ageing population* dimana jumlah penduduk lanjut usia (lansia) 60+ tahun sudah mencapai lebih dari sepuluh persen populasi pada tahun 2021. Pada Sensus Penduduk 2020, terdapat 26,4 juta penduduk lansia yang setara dengan 9,93 persen penduduk.

1.2 VARIANSI ANTARPROVINSI

Gambar 11. Perbandingan TFR Provinsi 1971, 2015, dan 2020

Sumber: Hasil Pengolahan Data dari Hasil SP, SUPAS, dan LF SP



Untuk provinsi yang melakukan pemekaran, nilai TFR sebelum pemekaran menggunakan nilai TFR provinsi induknya

Tingkat fertilitas Indonesia menunjukkan tren yang menurun selama periode 1971-2020. Tren yang cenderung menurun tersebut juga terjadi hampir di seluruh provinsi dengan penurunan yang beragam dari kondisi tahun 1971 ke 2020. Hal ini menunjukkan penurunan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita sampai akhir masa reproduksi atau masa subur untuk melahirkan anak (usia 15-49 tahun) selama 1971-2020. Meskipun cenderung menurun signifikan dibandingkan kondisi tahun 1971, sebagian provinsi mengalami peningkatan tingkat fertilitas jika dibandingkan kondisi tahun 2015. Keberagaman kondisi fertilitas antarprovinsi tersebut di antaranya dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, aksesibilitas, serta investasi pendidikan dan kesehatan di wilayah tersebut.

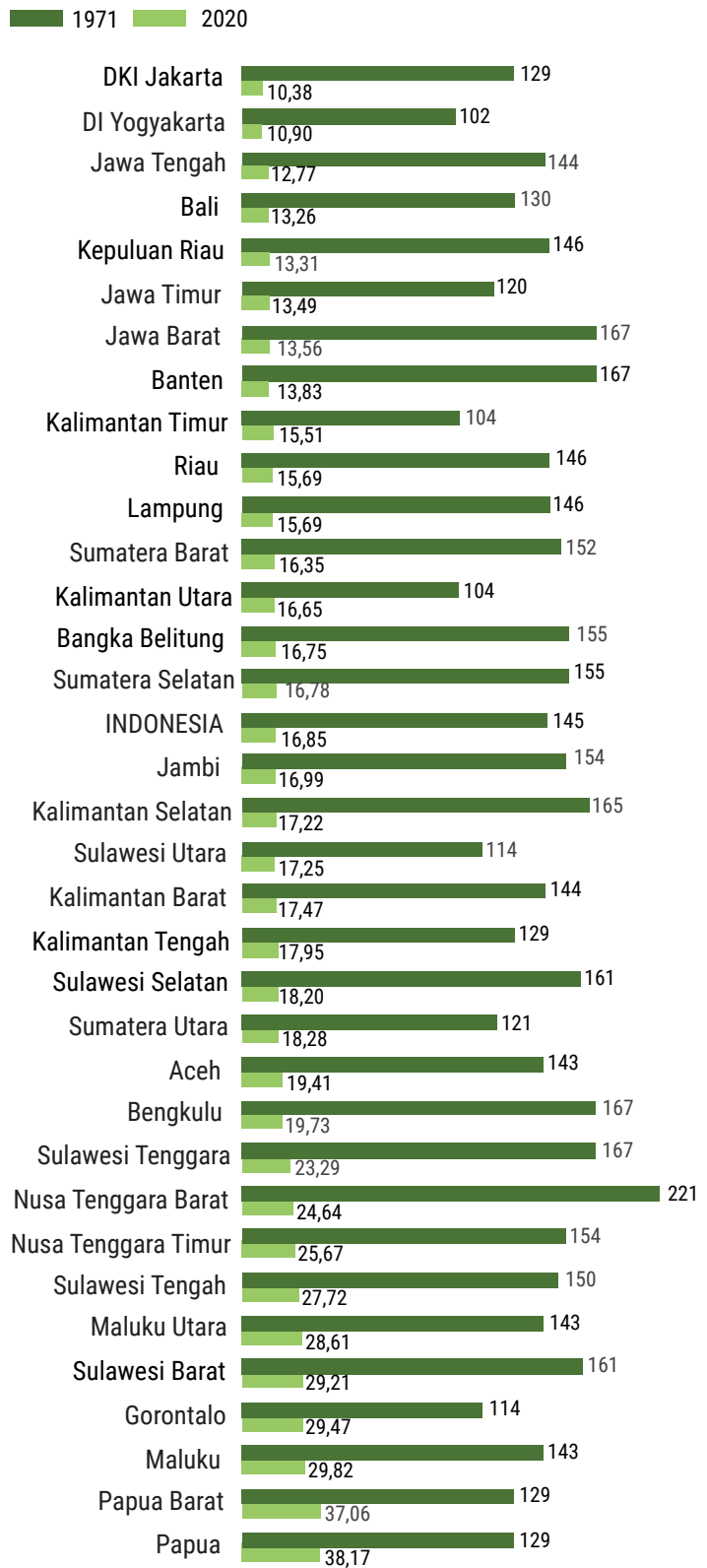
Dalam upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, diharapkan terjadi penurunan rata-rata angka kelahiran total hingga mencapai tingkat *Net Replacement Rate* (NRR) sebesar 1. Apabila melihat kondisi tahun 2020, terdapat 5 provinsi yang memiliki TFR di bawah 2,1, terdapat 3 provinsi yang memiliki TFR di sekitar 2,1, dan 26 provinsi memiliki TFR di atas 2,1. Terdapat setidaknya 11 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia dengan nilai TFR di atas 2,4. Provinsi-provinsi tersebut membutuhkan intervensi luar biasa untuk dapat menurunkan tingkat fertilitas. Diharapkan dapat responsif program Keluarga Berencana dapat responsif terhadap kondisi di setiap daerah tersebut. Program Keluarga Berencana untuk provinsi dengan TFR di bawah 2,1 harus berorientasi tidak hanya pada pemenuhan *unmet need* dan pendewasaan usia perkawinan, namun juga berorientasi pada upaya-upaya untuk menjaga bahkan meningkatkan jumlah anak setiap wanita.

Indonesia telah memasuki masa transisi demografi dimana angka kelahiran dan angka kematian sama-sama menurun. Penurunan IMR di Indonesia telah berlangsung sejak beberapa dasawarsa lalu. Kemajuan pembangunan dan tingkat kesehatan masyarakat ikut berperan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan balita yang pada akhirnya menurunkan IMR. Perbedaan pembangunan dan tingkat kesehatan tiap daerah juga menyebabkan variasi penurunan IMR di Indonesia.

Ketimpangan penurunan jumlah kematian bayi terjadi di tingkat provinsi. Terdapat 15 provinsi dengan nilai IMR berada di bawah nasional dan mayoritas berada di bagian barat Indonesia. Nilai IMR terendah berada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan nilai 10,90 per 1.000 kelahiran hidup dan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta yaitu 10,38 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara itu, nilai IMR tertinggi dimiliki provinsi Papua dan Papua Barat dengan yaitu sebesar 38,17 dan 37,06 per 1.000 kelahiran hidup. Nilai IMR kedua provinsi tersebut dua kali lipat lebih tinggi dari angka nasional (16,85) dan tiga kali dari IMR DKI Jakarta (10,38). Oleh sebab itu, perlu kebijakan khusus pada peningkatan kesehatan ibu dan anak untuk daerah-daerah dengan nilai IMR yang tinggi terutama wilayah Indonesia bagian timur.

Gambar 12. Perbandingan IMR Provinsi 1971 dan 2020

Sumber: Hasil Pengolahan Data dari Hasil SP, SUPAS, dan LF SP



Untuk provinsi yang melakukan pemekaran, nilai TFR sebelum pemekaran menggunakan nilai TFR provinsi induknya

1.3 TRANSISI DEMOGRAFI

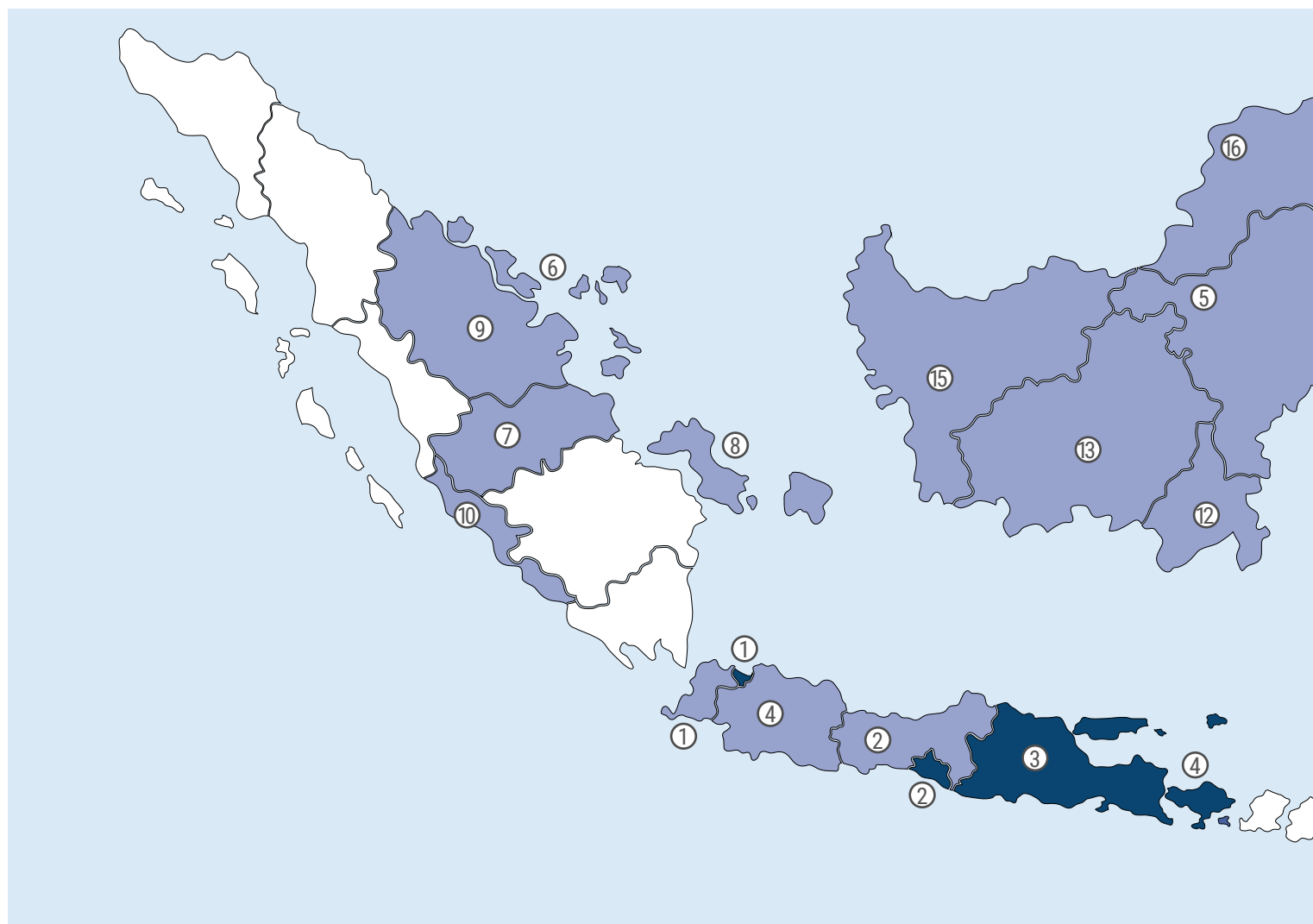
Tahapan transisi demografi ke dalam empat tahapan (Harmadi, 2016). Transisi demografi di Indonesia dimulai pada tahun 1971. Pada periode tersebut, Indonesia berada pada transisi demografi Tahap 2 menuju Tahap 3 yang ditandai dengan terjadinya penurunan mortalitas dan angka kelahiran secara cepat dan simultan. Penurunan angka mortalitas dari 145 pada tahun 1971 menjadi 47 pada tahun 2000 (BPS, 2018). Sejalan dengan penurunan IMR, pada saat bersamaan TFR juga mengalami penurunan dari 5,61 pada tahun 1971 menjadi 2,34 pada tahun 2000 (BPS, 2018). Sejalan dengan itu, terjadinya proses transisi demografi didukung pula oleh upaya-upaya peningkatan kesejahteraan penduduk melalui pembangunan ekonomi, sosial, kesehatan, dan infrastruktur.

Memasuki tahun 2000, Indonesia terus mengalami perubahan struktur penduduk memasuki Tahap 4. Tahapan transisi demografi tersebut ditandai dengan perlambatan penurunan IMR yaitu 31 pada tahun 2005 menjadi 17 pada tahun 2020 (BPS, 2018). Angka kelahiran secara bersamaan mengalami penurunan yang diindikasikan melalui perubahan TFR dari 2,26 tahun 2005 menjadi 2,18 tahun 2020. Dari kedua periodisasi transisi demografi Indonesia tersebut, masa terjadinya transisi demografi cenderung semakin singkat, yakni dari 30 tahun menjadi 20 tahun.

Transisi demografi bervariasi antar provinsi dan dapat dikategorikan menjadi empat kelompok. Empat kelompok tersebut meliputi provinsi pada fase transisi akhir, transisi awal, menjelang transisi, dan transisi tidak pasti (Adioetomo, 2016). Merujuk pada fase transisi tersebut, beberapa provinsi yang masuk dalam fase transisi akhir di antaranya DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Provinsi-provinsi tersebut memiliki TFR dan IMR yang cenderung lebih kecil dari provinsi lainnya sehingga mengalami transisi struktur penduduk lanjut yang terus meningkat dan menuju *ageing population*. Sementara itu, sebagian besar provinsi masuk dalam fase transisi awal dengan TFR yang relatif lebih tinggi (berada di antara 2 dan 2,5) tetapi terus mengalami penurunan. Pada fase ini, rata-rata proporsi penduduk usia produktif lebih rendah dibanding provinsi dalam fase transisi akhir, jumlah penduduk usia muda (0 - 14 tahun) masih cukup tinggi, serta penduduk lansia yang rendah.

Gambar 13. TFR, IMR, Persentase Penduduk Usia Muda, Persentase Penduduk Usia Produktif, dan Rasio Ketergantungan di Provinsi dalam Fase Transisi Akhir dan Fase Transisi Awal

Sumber: Hasil Pengolahan menggunakan hasil SP 2020 dan LF SP 2020



1. DKI JAKARTA

TFR: 1,75
IMR: 10,38
%0-14: 23,15
%15-65: 71,57
Rasio Ketergantungan
2040: 56,76

2. DI YOGYAKARTA

TFR: 1,89
IMR: 10,90
%0-14: 20,41
%15-65: 68,78
Rasio Ketergantungan
2040: 55,77

3. JAWA TIMUR

TFR: 1,98
IMR: 13,49
%0-14: 21,40
%15-65: 70,26
Rasio Ketergantungan
2040: 55,02

4. BALI

TFR: 2,04
IMR: 13,26
%0-14: 21,45
%15-65: 70,12
Rasio Ketergantungan
2040: 55,97

1. BANTEN

TFR: 2,01
IMR: 13,83
%0-14: 25,97
%15-65: 69,99
Rasio Ketergantungan
2040: 49,10

2. JAWA TENGAH

TFR: 2,09
IMR: 12,77
%0-14: 22,43
%15-65: 69,85
Rasio Ketergantungan
2040: 53,43

3. SULAWESI UTARA

TFR: 2,10
IMR: 17,23
%0-14: 23,21
%15-65: 68,90
Rasio Ketergantungan
2040: 52,99

4. JAWA BARAT

TFR: 2,11
IMR: 13,56
%0-14: 24,45
%15-65: 69,96
Rasio Ketergantungan
2040: 50,92

5. KALIMANTAN TIMUR

TFR: 2,18
IMR: 15,51
%0-14: 25,48
%15-65: 70,08
Rasio Ketergantungan
2040: 45,86

6. KEPULAUAN RIAU

TFR: 2,21
IMR: 13,31
%0-14: 26,88
%15-65: 69,59
Rasio Ketergantungan
2040: 51,25

7. JAMBI

TFR: 2,28
IMR: 16,99
%0-14: 26,22
%15-65: 69,15
Rasio Ketergantungan
2040: 51,77

8. BANGKA BELITUNG

TFR: 2,24
IMR: 16,75
%0-14: 24,94
%15-65: 70,07
Rasio Ketergantungan
2040: 51,01

9. RIAU

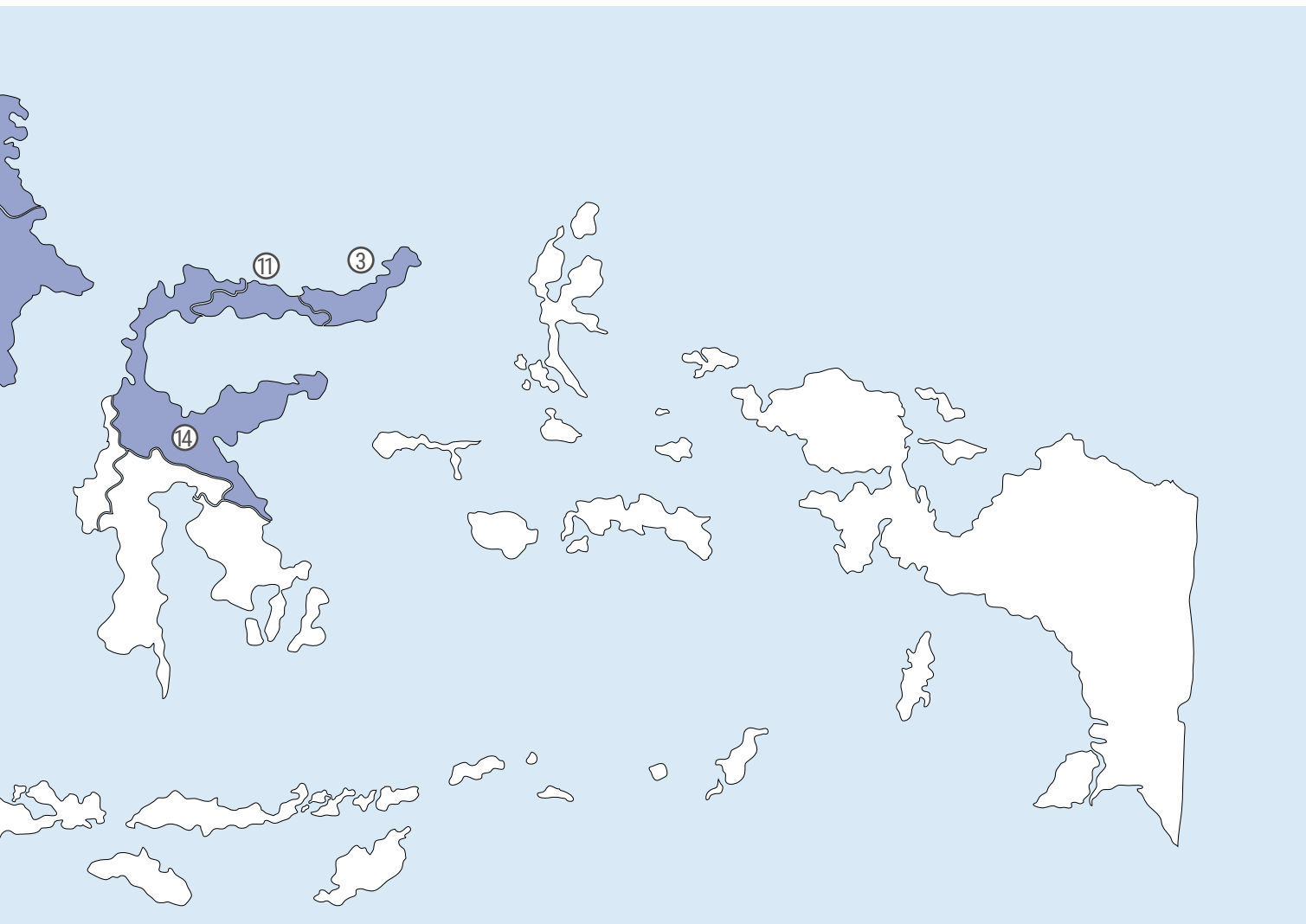
TFR: 2,28
IMR: 15,69
%0-14: 27,97
%15-65: 68,38
Rasio Ketergantungan
2040: 50,56

10. BENGKULU

TFR: 2,30
IMR: 19,73
%0-14: 25,95
%15-65: 69,08
Rasio Ketergantungan
2040: 51,79

11. GORONTALO

TFR: 2,30
IMR: 29,47
%0-14: 25,15
%15-65: 69,37
Rasio Ketergantungan
2040: 50,01



12. KALIMANTAN SELATAN

TFR: 2,31
IMR: 17,22
%0-14: 26,92
%15-65: 68,38
Rasio Ketergantungan
2040: 52,77

13. KALIMATAN TENGAH

TFR: 2,31
IMR: 17,95
%0-14: 25,34
%15-65: 70,20
Rasio Ketergantungan
2040: 50,13

14. SULAWESI TENGAH

TFR: 2,32
IMR: 27,72
%0-14: 27,09
%15-65: 67,92
Rasio Ketergantungan
2040: 49,75

15. KALIMANTAN BARAT

TFR: 2,33
IMR: 17,47
%0-14: 26,05
%15-65: 69,03
Rasio Ketergantungan
2040: 49,88

16. KALIMANTAN UTARA

TFR: 2,35
IMR: 16,65
%0-14: 25,68
%15-65: 70,13
Rasio Ketergantungan
2040: 49,50

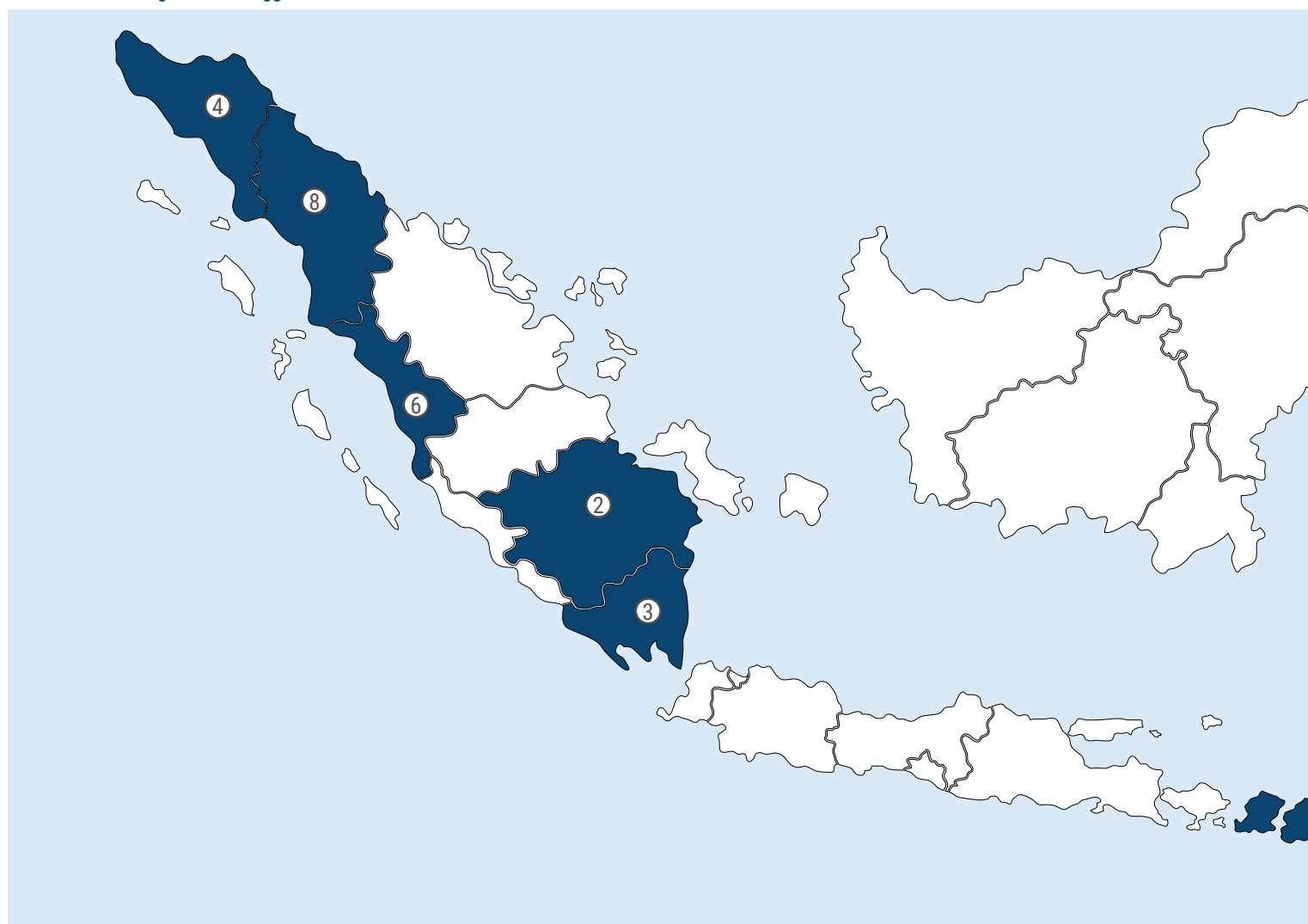
TFR, IMR, Persentase Penduduk Usia Muda, Persentase Penduduk Usia Produktif, dan Rasio Ketergantungan di Provinsi dalam Fase Transisi Akhir

TFR, IMR, Persentase Penduduk Usia Muda, Persentase Penduduk Usia Produktif, dan Rasio Ketergantungan di Provinsi dalam Fase Transisi Awal

Di sisi lain, beberapa provinsi menghadapi fase menjelang transisi dengan TFR yang relatif masih tinggi. Tingkat fertilitas yang masih tinggi berdampak pada tingginya proporsi penduduk muda (0-14 tahun) sehingga menyebabkan kebutuhan investasi yang besar juga. Selanjutnya, beberapa provinsi lainnya yang tidak masuk dalam ketiga fase tersebut diidentifikasi ke dalam fase ketidakpastian untuk memasuki transisi. Fase ini ditandai dengan TFR dan IMR yang relatif tinggi dibanding provinsi lainnya, namun belum berhasil menurunkan rasio ketergantungan menjadi lebih rendah dari 50 persen.

Gambar 14. TFR, IMR, Persentase Penduduk Usia Muda, Persentase Penduduk Usia Produktif, dan Rasio Ketergantungan di Provinsi dalam Fase Menjelang Transisi dan Fase Ketidakpastian Transisi

Sumber: Hasil Pengolahan menggunakan hasil SP 2020 dan LF SP 2020



1. SULAWESI SELATAN

TFR: 2,22
IMR: 18,20
%0-14: 24,80
%15-65: 68,57
Rasio Ketergantungan
2040: 50,85

4. ACEH

TFR: 2,42
IMR: 19,41
%0-14: 27,70
%15-65: 67,24
Rasio Ketergantungan
2040: 50,50

7. MALUKU UTARA

TFR: 2,47
IMR: 28,61
%0-14: 28,01
%15-65: 67,75
Rasio Ketergantungan
2040: 47,82

1. SULAWESI TENGGARA

TFR: 2,57
IMR: 23,29
%0-14: 28,61
%15-65: 66,74
Rasio Ketergantungan
2040: 49,82

2. SUMATERA SELATAN

TFR: 2,23
IMR: 16,78
%0-14: 26,68
%15-65: 67,99
Rasio Ketergantungan
2040: 51,27

5. NUSA TENGGARA BARAT

TFR: 2,43
IMR: 24,64
%0-14: 27,67
%15-65: 67,27
Rasio Ketergantungan
2040: 50,43

8. SUMATERA UTARA

TFR: 2,48
IMR: 18,28
%0-14: 27,51
%15-65: 67,42
Rasio Ketergantungan
2040: 51,33

2. SULAWESI BARAT

TFR: 2,58
IMR: 29,21
%0-14: 28,90
%15-65: 66,32
Rasio Ketergantungan
2040: 51,32

3. LAMPUNG

TFR: 2,28
IMR: 15,69
%0-14: 25,42
%15-65: 68,56
Rasio Ketergantungan
2040: 52,29

6. SUMATERA BARAT

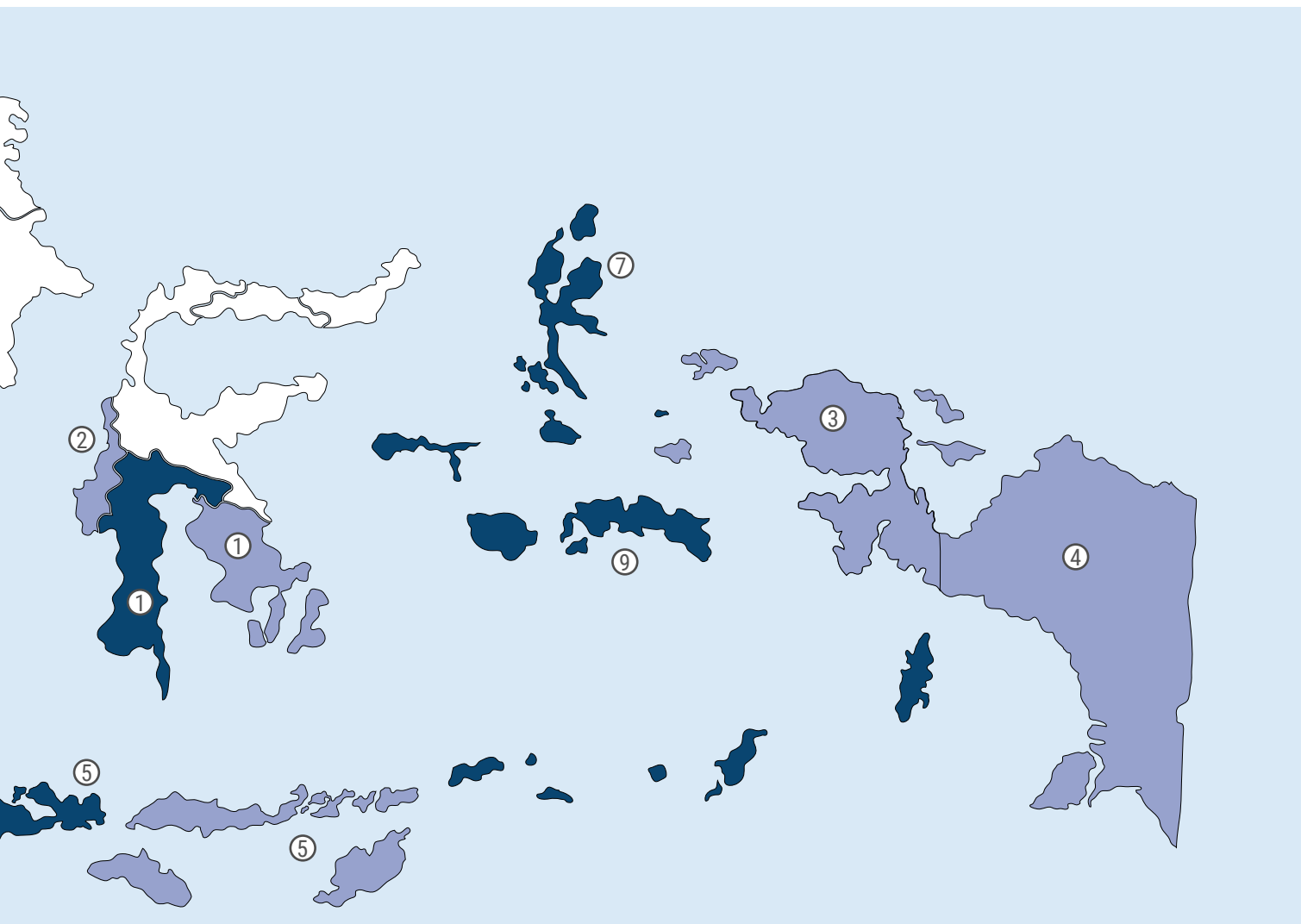
TFR: 2,46
IMR: 16,35
%0-14: 25,42
%15-65: 67,98
Rasio Ketergantungan
2040: 52,27

9. MALUKU

TFR: 2,18
IMR: 15,51
%0-14: 25,48
%15-65: 70,08
Rasio Ketergantungan
2040: 45,86

3. PAPUA BARAT

TFR: 2,66
IMR: 37,06
%0-14: 26,41
%15-65: 70,31
Rasio Ketergantungan
2040: 48,77



4. PAPUA

TFR: 2,76

IMR: 38,17

%0-14: 26,91

%15-65: 69,73

Rasio Ketergantungan

2040: 51,46

5. NUSA TENGGARA TIMUR

TFR: 2,79

IMR: 25,67

%0-14: 29,70

%15-65: 64,44

Rasio Ketergantungan

2040: 51,95

■ TFR, IMR, Persentase Penduduk Usia Muda, Persentase Penduduk Usia Produktif, dan Rasio Ketergantungan di Provinsi dalam Fase Menjelang Transisi

■ TFR, IMR, Persentase Penduduk Usia Muda, Persentase Penduduk Usia Produktif, dan Rasio Ketergantungan di Provinsi dalam Fase Ketidakpastian Transisi

Tahapan transisi demografi yang beragam, baik antarprovinsi maupun nasional, mengisyaratkan terjadinya perubahan pada struktur umur penduduk. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan maupun program yang spesifik dengan mempertimbangkan tahapan transisi demografi, baik di daerah maupun nasional. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat lebih terarah dan berdampak secara berarti.

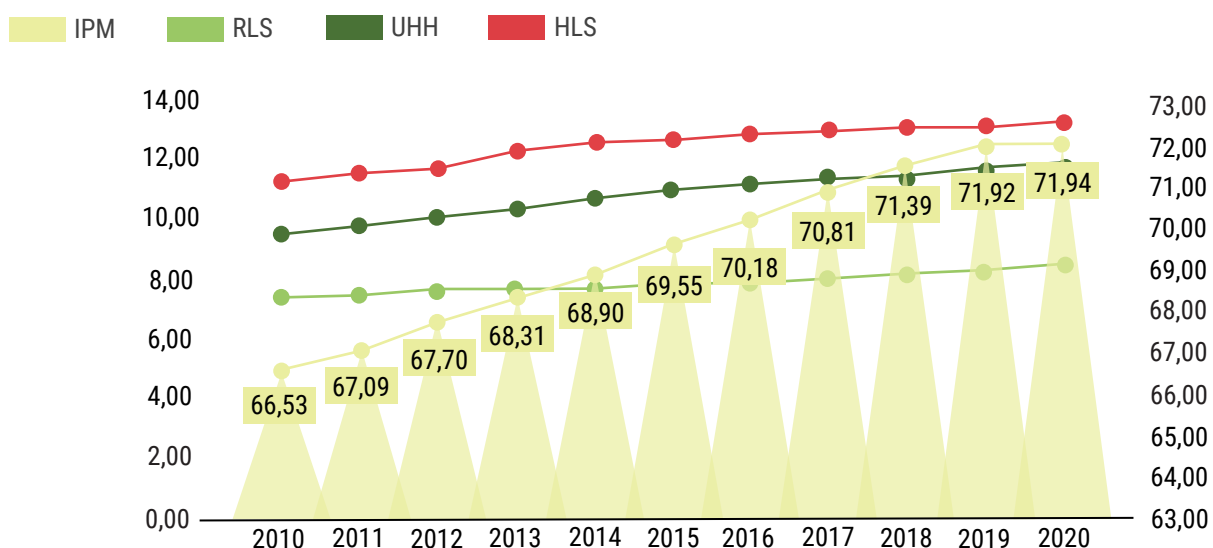
1.4 KUALITAS PENDUDUK

Kualitas penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbaikan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan Indonesia (IPM) dan *Human Development Index* (HDI) yang menunjukkan peningkatan. Secara global, HDI Indonesia tahun 2020 berada pada peringkat 116 dengan nilai sebesar 0,709 (UNDP, 2023). Capaian HDI tersebut menjadikan Indonesia masuk pada kategori *High Human Development*. Peringkat HDI Indonesia mengalami penurunan dari 113 pada tahun 2015 menjadi 116 pada tahun 2020. Meskipun demikian, angka capaian HDI meningkat dari 0,69 pada tahun 2015 menjadi 0,709 pada tahun 2020. Kualitas penduduk Indonesia berdasarkan IPM yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015, IPM Indonesia mencapai 69,55, sementara pada tahun 2020 mencapai 71,94 (BPS, 2022). Peningkatan IPM tersebut juga didukung oleh peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Usia Harapan Hidup masyarakat Indonesia di tahun 2015 sebesar 70,8 tahun kemudian meningkat menjadi 73,37 tahun pada tahun 2020. Selanjutnya, pada Harapan Lama Sekolah, pada tahun 2015 sebesar 12,55 tahun dan pada tahun 2020 sebesar 12,98 tahun. Rata-rata Lama Sekolah juga mengalami peningkatan dari 7,84 tahun pada tahun 2015 menjadi 8,48 tahun pada tahun 2020.



Gambar 15. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dan Indikator Pembentuknya Tahun 2010-2020

Sumber: BPS, 2021



Gambar 16. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Per Provinsi Tahun 2020

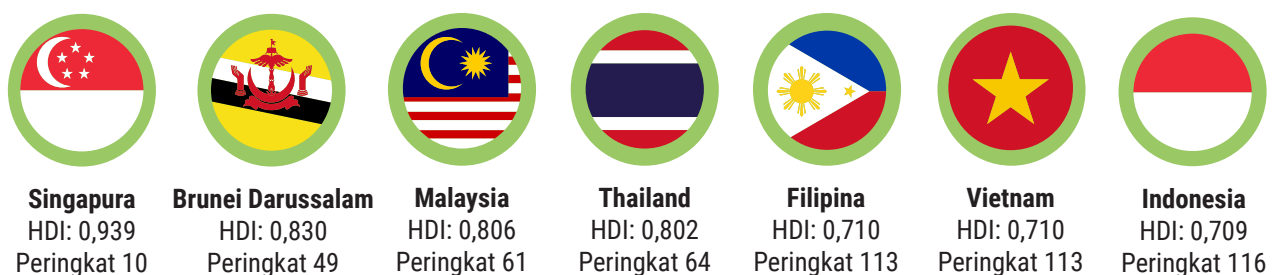
Sumber: BPS, 2021



Meskipun nilai HDI Indonesia menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) lainnya, capaian HDI Indonesia masih tertinggal. Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand yang masuk pada kategori *Very High Human Development* (UNDP, 2023). Salah satu yang menyebabkan masih tertinggalnya Indonesia adalah kualitas pendidikan dan Usia Harapan Hidup yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tersebut.

Gambar 17. Nilai *Human Development Index* (HDI) Beberapa Negara ASEAN Tahun 2020

Sumber: UNDP, 2023



1.5 MOBILITAS DAN PERSEBARAN PENDUDUK

Perbedaan kesempatan ekonomi di setiap provinsi menyebabkan jumlah penduduk tidak merata. Ekonomi sebagai faktor utama pendorong migrasi membuat penduduk Indonesia terkonsentrasi pada daerah perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat urbanisasi dan bertumbuhnya kota kecil dan sedang membuat 56 persen penduduk tinggal di daerah perkotaan.

Hingga saat ini, penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Lebih dari 55 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa dan menyebabkan kepadatan tinggi. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa terus meningkat hingga menjadi dua kali lipat dalam rentan waktu 1971-2020. Penduduk di Pulau Jawa juga terkonsentrasi di daerah perkotaan hingga mencapai 60 persen penduduk.

Persebaran penduduk sudah menjadi perhatian pemerintah dalam pembangunan kependudukan. Terdapat berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sejak tahun 1950 terkait pemerataan distribusi penduduk. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Migrasi merupakan bentuk nyata dari upaya pemerataan penduduk di luar Pulau Jawa. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kepadatan di Pulau Jawa dan kurang tereksplorasinya potensi daerah lain.

Berbagai upaya yang telah dilakukan masih belum dapat memberikan hasil yang diinginkan. Pulau Jawa masih menjadi tujuan utama migrasi sebagai hasil dari ketimpangan pembangunan yang membuat penduduk melihat potensi perekonomian masih terkonsentrasi di pulau ini. Hal ini juga membuat konsentrasi di Pulau Jawa semakin tinggi apabila dibandingkan pulau-pulau lainnya, terutama di Indonesia Bagian Timur.

Dalam rentang sepuluh tahun terakhir, terdapat upaya untuk mendorong penduduk bermigrasi ke luar Pulau Jawa melalui penciptaan pusat perekonomian baru, seperti pembangunan kawasan industri baru di Morowali, Sulawesi Tengah; pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika, Nusa Tenggara Barat; dan pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Kalimantan Timur juga dijadikan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara. Upaya ini berupaya untuk menarik penduduk usia muda

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Pulau 1971-2020

Sumber: Hasil Pengolahan Data dari Hasil SP, SUPAS, dan LF SP

SUMATERA

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu)	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1971	20.808	43
2010	50.862	106
2015	55.199	115
2020	58.557	112

JAWA-BALI

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu)	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1971	78.206	578
2010	140.941	1.042
2015	149.162	1.102
2020	155.909	1.152

KALIMANTAN

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu)	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1971	5.156	9
2010	13.851	25
2015	15.320	28
2020	16.626	30

SULAWESI

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu)	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1971	8.527	45
2010	17.437	92
2015	19.702	99
2020	19.897	105

NUSA TENGGARA

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu)	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1971	4.449	67
2010	9.222	13
2015	9.943	148
2020	10.646	158

MALUKU-PAPUA

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu)	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1971	2.013	4
2010	6.207	13
2015	6.856	14
2020	8.857	17

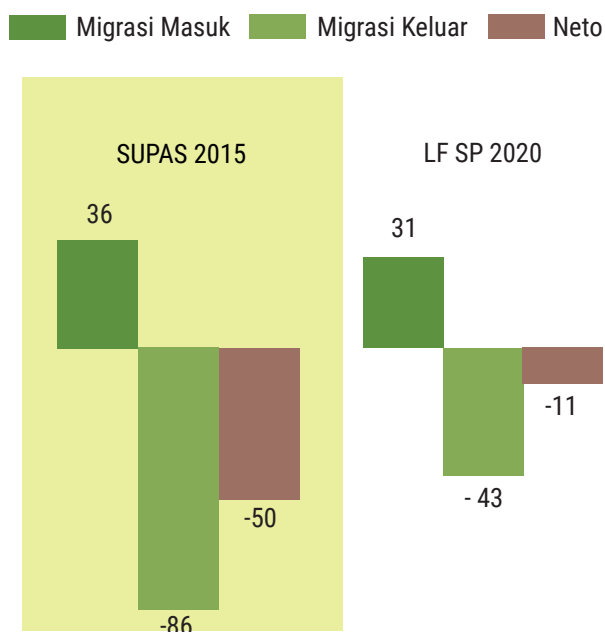
Gambar 18. Migrasi Seumur Hidup Neto 2019-2020

Sumber: BPS, 2021



Gambar 19. Angka Migrasi Internasional (per 100.000 Penduduk)

Sumber: Hasil Pengolahan Data dari Hasil SP, SUPAS, dan LF SP



yang mencari kerja. Hal ini ternyata terbukti dengan angka migrasi neto kedua provinsi ini usia muda yang mencari pekerjaan yang dibuktikan dengan angka migrasi neto kedua provinsi ini menjadi yang tertinggi dalam *Long Form* Sensus Penduduk 2020.

Sejak tahun 1980, migrasi keluar Pulau Jawa sudah mulai lebih tinggi dari migrasi masuk. Data BPS menunjukkan dari tahun 1980 hingga 2020 mencatat migrasi neto Pulau Jawa selalu bernilai negatif. Adanya penciptaan pusat-pusat perekonomian baru dan rencana pemindahan Ibu Kota, Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan menjadi tujuan migrasi baru di Indonesia.

Sementara itu, nilai migrasi neto Pulau Papua dan Kepulauan Maluku masih terus bernilai positif, namun dengan angka yang sangat kecil. Kondisi ini belum mampu mendorong kepadatan penduduk pada kedua wilayah ini. Pembangunan pusat pertumbuhan, pelayanan dasar, dan penguatan konektivitas di Indonesia Timur hendaknya dapat menjadikan kedua daerah tersebut menjadi lebih menarik bagi migran dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Dalam konteks migrasi internasional, Indonesia masih memiliki lebih banyak migran keluar dibandingkan migran masuk. Hasil LF SP 2020 menunjukkan bahwa migrasi neto Indonesia berada pada nilai -11 per 100.000 penduduk yang berarti pada setiap 100.000 penduduk, jumlah penduduk yang keluar Indonesia 11 orang lebih banyak daripada yang masuk ke Indonesia. Serupa dengan migrasi internal, motivasi utama untuk melakukan perpindahan adalah faktor ekonomi dan pendidikan. Mayoritas penduduk yang berpindah ke luar negeri juga berasal dari penduduk muda usia 25-40 tahun.

02 | MASA DEPAN YANG DIINGINKAN





2.1 ARAH PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan salah satu faktor utama keberhasilan Pembangunan. Penduduk yang berkualitas mendorong pembangunan untuk mendapatkan dampak yang lebih baik. Oleh sebab itu, pembangunan Indonesia harus berpusat pada penduduk. Untuk mencapai keselarasan pembangunan dengan terwujudnya penduduk yang sejahtera tanpa ada yang tertinggal, terdapat beberapa kondisi yang harus tercapai dan dijaga. Lima arah pembangunan kebijakan untuk menjaga keselarasan antara pembangunan dan penduduk sejahtera, sebagai berikut:

1 MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG SEIMBANG

Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat akan tetapi pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah berbeda. Karakteristik penduduk dan wilayah yang berbeda membuat pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan pengendalian penduduk untuk masing-masing daerah. Penyesuaian kebijakan pengendalian penduduk diperlukan agar masing-masing daerah bisa mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang. Pertumbuhan penduduk yang seimbang sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam, sosial, dan ekonomi dapat dikelola secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan di masa depan.

2 MENUTUP KESENJANGAN KETERTINGGALAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Peningkatan kualitas penduduk dilakukan sedini mungkin dengan mendorong pengembangan sistem pendidikan, peningkatan sarana kesehatan dan perluasan sistem perlindungan sosial. Diharapkan sumber daya manusia Indonesia dapat bersaing dan berkompetisi dengan negara lain

3 MENUNJANG PENUAAN PENDUDUK.

Jumlah penduduk lanjut usia diperkirakan akan mengalami peningkatan yang signifikan. Strategi yang komprehensif diperlukan guna mengantisipasi penuaan penduduk. Kebijakan untuk mempersiapkan masa lanjut usia, di semua aspek antara lain ekonomi, sosial, mental, memerlukan upaya lintas sektor. Hal tersebut harus dilakukan untuk mewujudkan penduduk lanjut usia yang mandiri, sehat dan bermartabat.

4 MENDORONG PENYEBARAN PENDUDUK YANG MERATA

Faktor ekonomi dan kesempatan kerja masih menjadi faktor utama pendorong terjadinya perpindahan penduduk. Pengembangan pusat perekonomian serta pembangunan sarana dan prasarana umum di luar Pulau Jawa perlu dilakukan untuk mendorong perpindahan penduduk yang merata ke beberapa wilayah lainnya. Distribusi penduduk yang merata akan menciptakan pembangunan wilayah dan ekonomi yang berkelanjutan. menciptakan pembangunan wilayah dan ekonomi yang berkelanjutan

5 PEMBANGUNAN YANG SEIMBANG ANTARA PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Ketimpangan antara perdesaan dan perkotaan masih terjadi. Banyak desa yang kehilangan tenaga kerja karena penduduk yang berpindah ke perkotaan untuk bekerja. Ketersediaan sarana dan prasarana umum seperti pendidikan dan kesehatan yang terbatas menyebabkan banyak penduduk yang akhirnya pindah untuk tinggal di wilayah perkotaan. Pembangunan yang seimbang antara perdesaan dan perkotaan diperlukan untuk mengendalikan urbanisasi dan mengurangi kepadatan penduduk di wilayah perkotaan.

2.2 PROYEKSI PENDUDUK

Proyeksi penduduk merupakan perhitungan matematik untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk di masa depan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mensyaratkan perencanaan pembangunan didasari oleh informasi dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Proyeksi penduduk bertujuan untuk mengintegrasikan variabel kependudukan dan perencanaan pembangunan dengan memberikan informasi kondisi penduduk di masa depan.

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) telah mengeluarkan perhitungan proyeksi penduduk sejak tahun 1951 dan telah meluncurkan *World Population Prospect 2022* edisi ketujuh. Publikasi tersebut menampilkan hasil perhitungan proyeksi penduduk dan indikator-indikator demografi utama lainnya yang mencakup periode 1950-2100.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, dan didukung oleh *United Nations Population Fund (UNFPA)* telah melakukan proyeksi penduduk pada tahun 2010, 2015, dan 2020. Perhitungan proyeksi tersebut dilakukan dengan menggunakan data Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 1971, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Pada Proyeksi Penduduk Tahun 2020, perhitungan juga menggunakan data Survei Demografi dan Keluarga Indonesia (SDKI) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1987 hingga 2017. Hasil perhitungan proyeksi penduduk ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Rencana Aksi *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan Visi Pembangunan Indonesia 2045.

Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 menggunakan beberapa skenario. Proyeksi penduduk tidak hanya menggunakan skenario berdasarkan kecenderungan yang ada (skenario

tren), namun juga skenario berdasarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai (skenario optimis). Selain dua skenario tersebut, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 juga menggunakan skenario yang menggambarkan kondisi dimana terdapat perbaikan parameter kependudukan, namun masih belum mencapai target yang diinginkan (skenario moderat). Berikut adalah ketiga skenario yang digunakan:

Gambar 20. Skenario Proyeksi Penduduk 2020-2050

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050

Skenario Tren/ <i>Business as Usual</i>	
Skenario tren digunakan untuk menggambarkan kondisi yang paling mungkin terjadi (<i>most-likely</i>) apabila kebijakan yang diterapkan tidak berubah (<i>business as usual</i>). Perhitungan skenario ini dilakukan dengan menggunakan kecenderungan di masa lalu.	
TFR terus menurun mendekati 1,9 IMR mencapai 7,85	UHH 76,37 tahun (2045) setara Brunei, Malaysia, dan Brazil tahun 2020
Skenario Moderat/Kebijakan Khusus	
Skenario moderat menggambarkan kondisi apabila intervensi kebijakan berhasil memperbaiki parameter kependudukan menjadi lebih baik, namun belum mencapai target yang Ideal.	
TFR dijaga 2,0 IMR mencapai 5,8	UHH 78,03 tahun (2045) setara Uruguay, Turki, dan Slovakia tahun 2020
Skenario Optimis/Kebijakan Luar Biasa	
Skenario optimis menggambarkan kondisi yang diinginkan (<i>most-desired</i>) di masa depan dengan adanya intervensi kebijakan yang bersifat transformatif.	
TFR dijaga 2,0 IMR mencapai 4,2	UHH 80 tahun (2045) setara Chile, Qatar, Guam tahun 2020

2.2.1 Asumsi Natalitas

Parameter natalitas dihitung dengan menggunakan indikator TFR, yaitu jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap perempuan pada usia subur. Pada skenario tren, TFR diasumsikan terus turun dengan batas bawah (asimtot) pada nilai 1,9. Pada skenario kebijakan (optimis dan moderat), TFR dijaga agar minimal pada nilai 2,0.

Penerapan batas bawah pada skenario tren didasari oleh pengalaman dari negara-negara lain dimana penurunan TFR akan melambat setelah berada di bawah 2,0. Nilai TFR Indonesia terus menurun dan diperkirakan akan mencapai 2,0 pada tahun 2035.

Untuk menjaga penduduk tumbuh seimbang dimana setiap penduduk lahir menggantikan penduduk meninggal, nilai TFR harus berada di tingkat *replacement rate*. Dengan meningkatnya kondisi kesehatan di Indonesia, maka setiap anak yang lahir diperkirakan dapat berkembang dan bertahan hingga mencapai akhir usia produktif. Oleh sebab itu, dua anak dengan kualitas yang baik dinilai cukup untuk menggantikan kedua orang tuanya.

Penentuan target TFR pada angka 2,0 juga memberikan waktu selama 12 tahun atau lebih dari dua kali periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bagi pemerintah untuk dapat mengubah paradigma pengendalian penduduk Indonesia. Saat ini, program pengendalian penduduk dan keluarga berencana Indonesia masih berorientasi pada pengurangan jumlah anak. Dengan terus menurunnya angka TFR Indonesia, paradigma

tersebut harus beralih dan berorientasi pada pengendalian jumlah penduduk sesuai dengan karakter dari keluarga, komunitas, wilayah, dan kelompok masyarakat. Penduduk dengan jumlah yang seimbang dan kualitas yang baik tentunya menjadi modal dasar bagi pembangunan ke depan.

2.2.2 Asumsi Mortalitas

Penyusunan parameter skenario mortalitas menggunakan indikator IMR. Indikator IMR menggambarkan jumlah kematian bayi sebelum mencapai umur satu tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Untuk skenario tren, nilai IMR dibiarkan turun sesuai tren dengan batas bawah sesuai hasil model perhitungan.

Pada skenario optimis, nilai IMR ditargetkan menurun hingga nilai IMR yang setara dengan UHH 80 tahun pada tahun 2045. Pemilihan UHH 80 tahun didasari pada upaya penyesuaian kondisi ekonomi dan kondisi sosial Indonesia. Visi Indonesia 2045 menargetkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045, sehingga Indonesia ditargetkan untuk memiliki UHH yang setara dengan negara-negara maju. Rata-rata Usia Harapan Hidup negara maju saat ini berada di atas 80 tahun, sehingga Indonesia ditargetkan memiliki IMR 4,198 untuk mencapai UHH 80 tahun pada 2045.

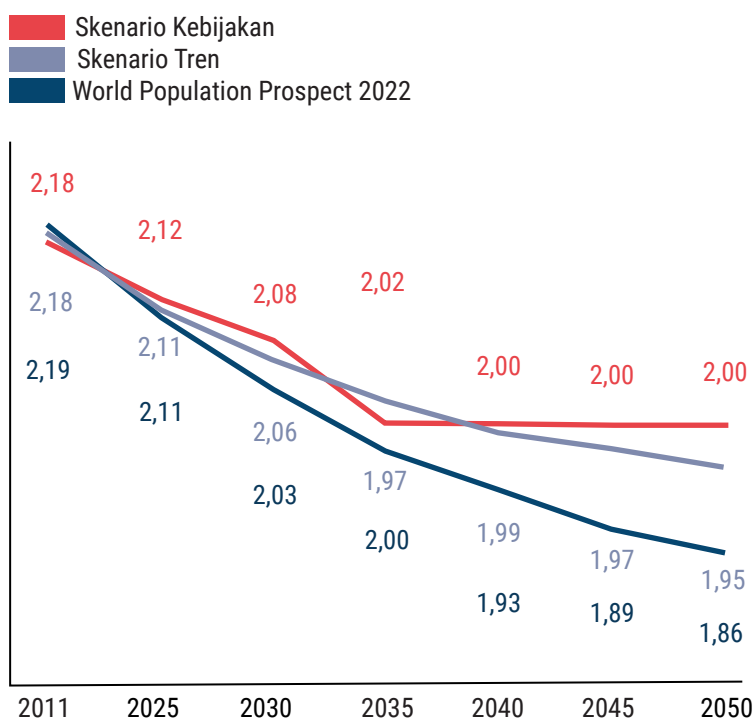
Skenario moderat yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi kependudukan Indonesia di masa depan apabila intervensi kebijakan diberikan dan berhasil memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia, namun tidak mencapai target yang diinginkan. Nilai IMR 5,75 yang setara dengan UHH 78,03. Angka tersebut merupakan nilai tengah antara skenario optimis (kebijakan luar biasa) dengan skenario tren (*business as usual*).

2.2.3 Asumsi Migrasi

Parameter migrasi mulai dipertimbangkan dalam proyeksi

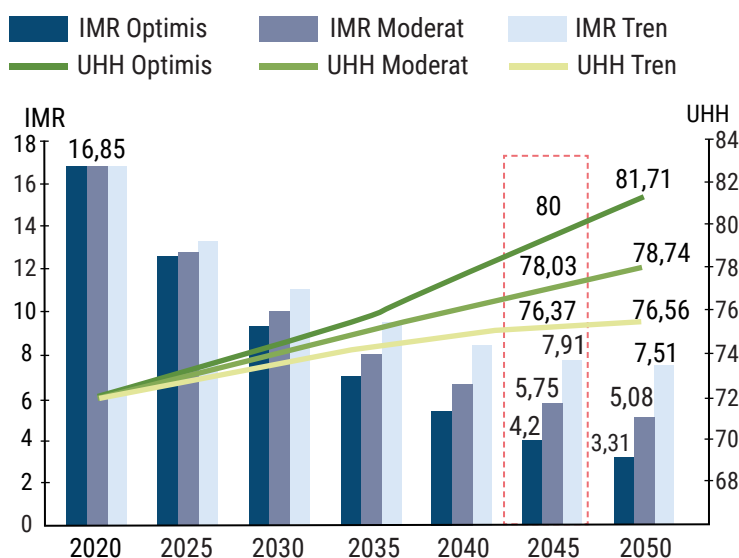
Gambar 21. Proyeksi Nilai TFR Indonesia 2020-2050

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050



Gambar 22. Proyeksi Nilai IMR dan UHH Indonesia 2020-2050

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050



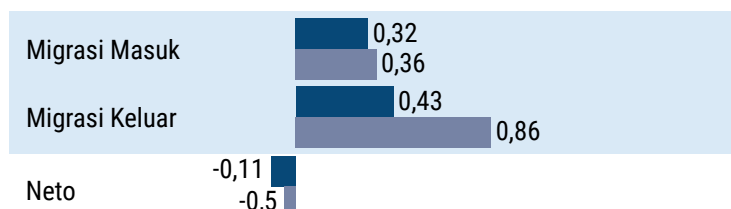
Tabel 2. Jumlah Pekerja Migran Indonesia Menurut Asal Provinsi 2020-2022

Sumber: Hasil Pengolahan Data dari Hasil SP, SUPAS dan LF SP

Provinsi	2020	2021	2022
Jawa Timur	37.829	28.810	51.348
Jawa Tengah	26.335	17.504	47.480
Jawa Barat	23.225	12.178	33.285
Nusa Tenggara Barat	8.225	2.331	22.790
Lampung	9.154	4.244	14.052
Sumatera Utara	2.840	194	12.504
Bali	894	5.086	9.428
Lainnya	4.874	2.283	9.877

Gambar 23. Angka Imigrasi Internasional Hasil SUPAS 2015 dan LF SP 2020 (Per 1.000 penduduk)

Sumber: Hasil Pengolahan Data dari Hasil SP, SUPAS dan LF SP



penduduk Indonesia sejak Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045. Pada tingkat nasional, parameter migrasi dihitung menggunakan migrasi neto internasional. Indikator ini menghitung selisih antara penduduk yang keluar dengan yang masuk ke Indonesia per 1.000 penduduk. Pada Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, asumsi migrasi menggunakan pola hasil LF SP 2020 hingga tahun akhir proyeksi. Nilai migrasi neto internasional berdasarkan LF SP 2020 berada pada angka -0.11 per 1.000 penduduk.

Nilai menunjukkan bahwa migran keluar Indonesia lebih banyak daripada migran masuk ke Indonesia. Adanya batasan untuk bepergian selama Pandemi COVID-19 menurunkan volume migran masuk maupun keluar Indonesia. Di sisi lain, kebijakan moratorium Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga berdampak pada pengurangan jumlah penduduk yang berpindah ke luar negeri. Kedua hal ini membuat nilai migrasi neto internasional Indonesia pada tahun 2020 menjadi lebih besar dibandingkan tahun 2015.

Adapun alasan utama penduduk melakukan migrasi ke luar negeri adalah untuk mencari pekerjaan. Mayoritas migran juga berasal dari kelompok usia produktif, terbukti dengan persebaran usia penduduk migran yang mulai naik pada kelompok 15-19 tahun dan turun secara drastis pada usia 45 tahun ke atas. Emigran Indonesia masih lebih banyak laki-laki, namun dengan jumlah yang tidak jauh berbeda dengan perempuan.

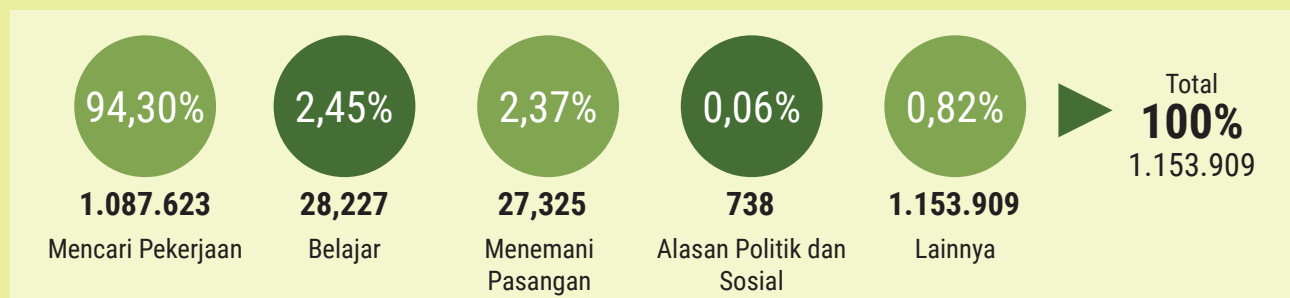
Salah satu kelompok penduduk yang melakukan emigrasi adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI). Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat terdapat sekitar 200 ribu PMI yang ditempatkan ke luar negeri pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat dari tahun 2020 yang hanya sekitar 113 ribu dan 2021 (72 ribu) sejalan dengan menurunnya pandemi COVID-19.

Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi provinsi asal pekerja migran terbanyak di Indonesia pada tahun 2022. Jawa Barat yang hingga tahun 2016 menjadi pengirim PMI terbanyak, namun pada tahun 2022 menjadi pengirim migran terbanyak ketiga. Sementara, Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi pengirim PMI di luar Pulau Jawa terbanyak.

Hongkong menjadi lokasi penempatan PMI utama, terutama pada masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, sebanyak 52 ribu PMI ditempatkan di Hongkong yang mencapai 70 persen PMI pada tahun tersebut. Taiwan dan Malaysia berada di peringkat kedua dan ketiga negara tujuan PMI Indonesia pada tahun 2022. Data BP2MI juga mencatat sembilan dari sepuluh PMI berpendidikan SMA ke bawah, serta masih didominasi oleh PMI yang bekerja pada sektor informal.

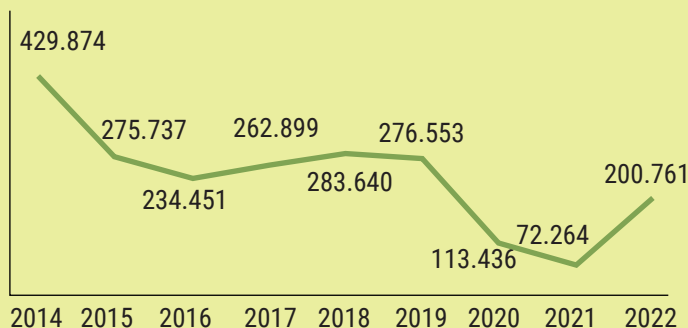
Gambar 24. Alasan Penduduk Berpindah ke Luar Negeri Tahun 2015

Sumber: BPS, 2018



Gambar 25. Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2014-2022

Sumber: Hasil Pengolahan Data dari BP2MI, 2022



Gambar 26. Negara Tujuan Migran Indonesia 2020-2022

Sumber: Hasil Pengolahan menggunakan Data BP2MI berbagai Tahun

Hongkong  2020: 53.178 2021: 52.278 2022: 60.096	Taiwan  2020: 34.287 2021: 7.789 2022: 53.459	Malaysia  2020: 14.742 2021: 563 2022: 43.613	Korea Selatan  2020: 641 2021: 147 2022: 11.554
Singapura  2020: 4.481 2021: 3.217 2022: 6.624	Jepang  2020: 753 2021: 359 2022: 5.832	Arab Saudi  2020: 1.926 2021: 747 2022: 4.676	Negara lainnya 2020: 3.428 2021: 11.769 2022: 27.132

2.2.4 Migrasi Internal

Terdapat beberapa perbedaan asumsi migrasi yang digunakan pada perhitungan proyeksi penduduk tingkat nasional dan tingkat provinsi. Pertama, migrasi neto internasional yang digunakan pada perhitungan nasional berasal dari migrasi seumur hidup (*life-time*). Perhitungan proyeksi provinsi menggunakan migrasi risen. Kedua, perhitungan proyeksi penduduk nasional menggunakan asumsi migrasi yang konstan sesuai dengan pola hasil LF SP 2020. Sementara itu, asumsi pada tingkat provinsi dihitung berdasarkan kecenderungan di masa COVID-19 dengan hasil LF SP 2020 sebagai titik observasi terakhir.

Rencana perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga memengaruhi asumsi migrasi pada empat provinsi. Keempat provinsi tersebut adalah Provinsi Kalimantan Timur sebagai penerima migran Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sebagai pengirim migran. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara memperkirakan, dari tahun 2020 hingga tahun 2045, setidaknya terdapat 1,7 juta migran masuk ke Kawasan IKN. Migran tersebut terdiri dari 573 ribu pekerja di Kawasan IKN dan 1,2 juta yang berasal dari keluarga/tanggungan pekerja dan juga mahasiswa.

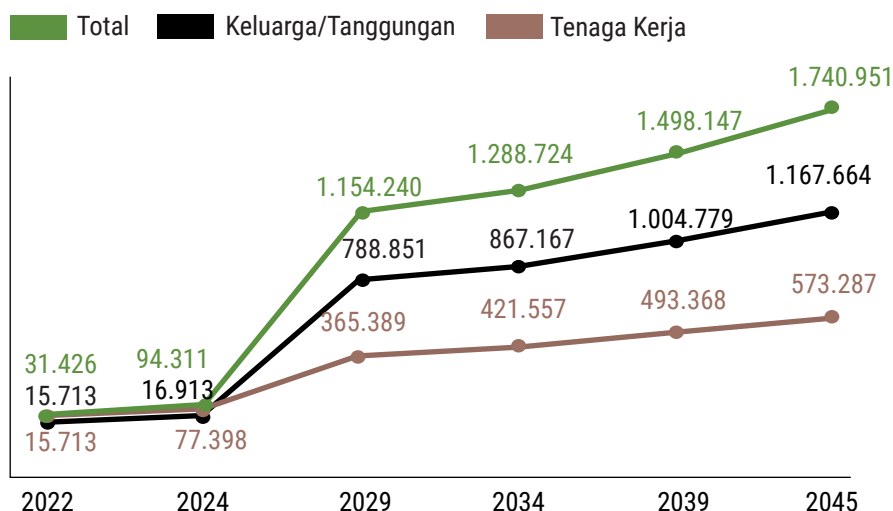
Tabel 3. Persentase Migrasi Neto Risen Antarprovinsi Neto Hasil LF SP 2020

Sumber: Long Form Sensus Penduduk 2020, BPS 2023

Nusa Tenggara Barat 2,68	Sulawesi Barat 0,79	Kalimantan Utara 0,01	Kalimantan Utara 0,01	Sumatera Selatan -0,34
DI Yogyakarta 2,25	Gorontalo 0,69	Maluku Utara -0,01	Maluku Utara -0,01	Riau -0,35
Sumatera Barat 1,67	Kepulauan Riau 0,56	Sulawesi Utara -0,01	Sulawesi Utara -0,01	Bali -0,60
Sulawesi Tenggara 1,60	Jawa Barat 0,46	Kalimantan Tengah -0,15	Kalimantan Tengah -0,15	Kalimantan Timur -0,66
Nusa Tenggara Timur 1,07	Papua Barat 0,34	Maluku -0,16	Maluku -0,16	Papua -0,75
Jawa Tengah 1,07	Bengkulu 0,32	Sumatera Utara -0,21	Sumatera Utara -0,21	DKI Jakarta -5,75
Bangka Belitung 0,88	Kalimantan Barat 0,30	Sulawesi Selatan 0,02	Jambi -0,23	

Gambar 27. Proyeksi Jumlah dan Komposisi Migran Masuk IKN

Sumber: BPS, 2021



Gambar 28. Proyeksi Jumlah Tenaga Kerja Migran dan Keluarga/Dependen Tenaga Kerja IKN 2045

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara

40% Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	43.061 Keluarga Tenaga Kerja Konstruksi pada Masa Pembangunan Ibu Kota Nusantara	88.812 Mahasiswa
18% Aparatur Sipil Negara (ASN)	236.997 Keluarga Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara	4.961 Anggota Keluarga Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik
18% Kemhan/TNI, Polri, BIN, BSSN, dan Bakamla	236.997 Keluarga Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dan Industri di dalam Ibu Kota Nusantara	290.478 Anggota Keluarga Kemhan/TNI, Polri, BIN, BSSN, dan Bakamla
17% Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dan Industri di dalam Ibu Kota Nusantara		400.092 Anggota Aparatur Sipil Negara (ASN)
7% Tenaga Kerja Konstruksi pada Masa Pembangunan Ibu Kota Nusantara		

2.3 HASIL PERHITUNGAN PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA 2020-2050

Apabila dibandingkan dengan proyeksi tahun sebelumnya (2015-2045) dengan menggunakan skenario yang sama, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 akan memiliki 13 juta (2045) penduduk lebih banyak. Indonesia diperkirakan memiliki 324,05 juta penduduk pada tahun 2045 dan 328,93 juta penduduk pada 2050 apabila parameter-parameter demografi terus berkembang dengan kecenderungan yang ada.

Dengan menggunakan pola yang ada saat ini, nilai TFR Indonesia diperkirakan akan mendekati 1,9 pada tahun 2045 dan IMR mencapai 7,5. Penduduk Indonesia diperkirakan akan bertambah sebanyak 59,35 juta jiwa dalam 30 tahun dengan rata-rata laju pertumbuhan 0,67 persen per tahun. Meskipun terus bertambah, jumlah bayi lahir mengalami penurunan dengan rata-rata -0,18 per tahun.

Indonesia akan memiliki lebih banyak penduduk apabila TFR ditahan dan IMR turun lebih cepat. Dengan menjaga nilai TFR pada angka 2,0 dan menurunkan IMR hingga mencapai 5,75 pada tahun 2045, Indonesia akan memiliki 326,68 juta penduduk pada tahun 2045 dan 333,57 juta penduduk pada tahun 2050. Terdapat penambahan 63,99 juta penduduk dalam 30 tahun yang setara dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk 0,71 persen per tahun. Penurunan IMR yang lebih cepat juga diperkirakan akan berdampak pada peningkatan Usia Harapan Hidup saat lahir, yaitu 78,03 tahun pada 2045.

Jumlah penduduk Indonesia akan bertambah lebih banyak lagi apabila jumlah kematian bayi dapat diturunkan dengan lebih cepat dan Usia Harapan Hidup saat lahir juga meningkat. Dengan menargetkan IMR untuk turun hingga mencapai 4,198 pada tahun 2045 dan UHH meningkat hingga 80 tahun, penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 329,13 juta pada tahun 2045 dan 337,99 juta pada 2050. Dalam 30 tahun, penduduk Indonesia akan bertambah sebanyak 68,42 juta jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk 0,88 persen per tahun. Dengan meningkatnya kondisi kesehatan keluarga Indonesia, maka IMR akan turun, UHH saat lahir bertambah, serta jumlah kematian setiap umur diprediksi akan berkurang. Kondisi inilah yang menyebabkan penduduk Indonesia memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak di masa yang akan datang.

Penggunaan berbagai skenario ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait kondisi penduduk di masa depan dari berbagai dampak kebijakan yang diterapkan. Hasil perhitungan ini menjadi masukan

Tabel 4. Hasil Proyeksi Penduduk 2020–2050 dengan Skenario Tren

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020- 2050

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	TFR	IMR	UHH
2020	269,58	2,18	16,85	73,37
2025	284,44	2,11	13,37	74,24
2030	297,43	2,06	11,10	74,86
2035	308,37	2,02	9,58	75,58
2040	317,23	1,99	8,56	76,06
2045	324,05	1,97	7,91	76,37
2050	328,93	1,95	7,51	76,56

Tabel 5. Hasil Proyeksi Penduduk 2020–2050 dengan Skenario Moderat

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020- 2050

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	TFR	IMR	UHH
2020	269,58	2,18	16,85	73,37
2025	284,53	2,12	12,90	74,36
2030	297,88	2,08	10,10	75,33
2035	309,22	2,00	8,12	76,27
2040	318,60	2,00	6,72	77,01
2045	326,68	2,00	5,75	78,03
2050	333,57	2,00	5,08	78,74

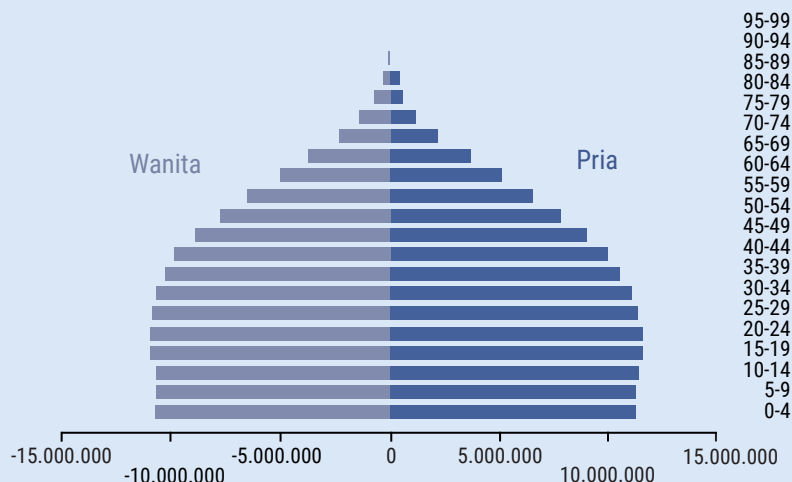
Tabel 6. Hasil Proyeksi Penduduk 2020–2050 dengan Skenario Optimis

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020- 2050

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	TFR	IMR	UHH
2020	269,58	2,18	16,85	73,37
2025	284,55	2,12	12,62	74,43
2030	298,03	2,08	9,45	75,64
2035	309,63	2,00	7,13	76,74
2040	319,73	2,00	5,42	78,38
2045	329,13	2,00	4,20	80,00
2050	337,99	2,00	3,31	81,71

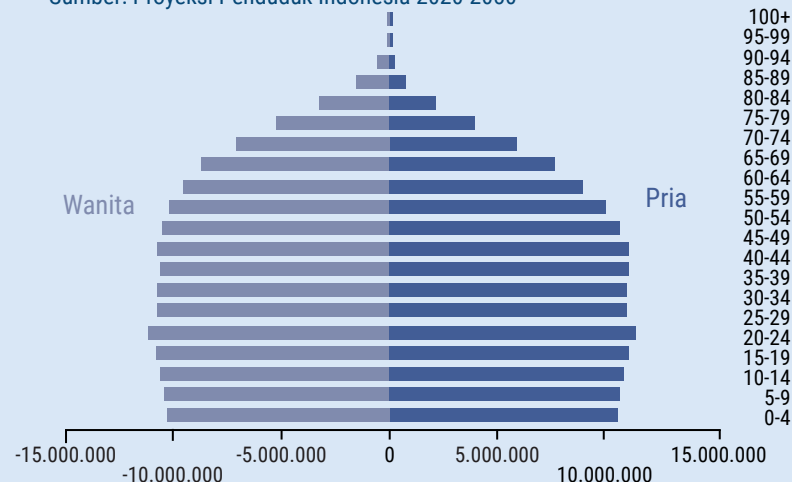
Gambar 29. Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2020

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050



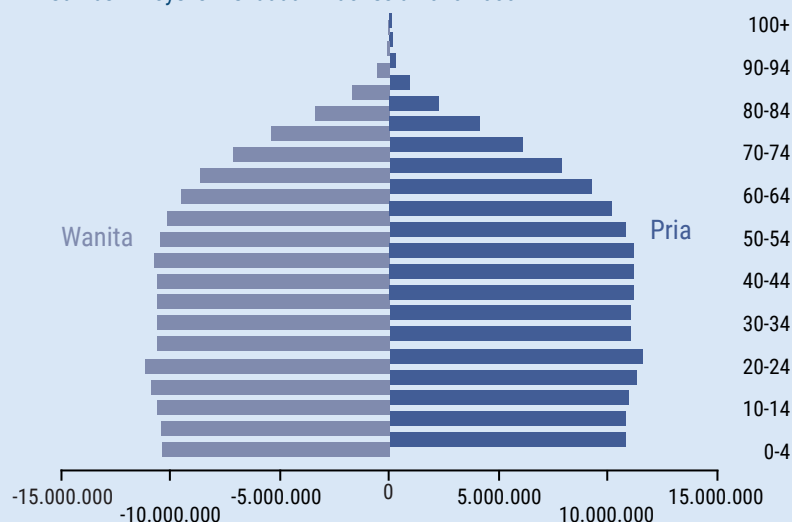
Gambar 30. Piramida Penduduk Tahun 2045 berdasarkan Skenario Tren

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050



Gambar 31. Piramida Penduduk Tahun 2045 berdasarkan Skenario Moderat

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050

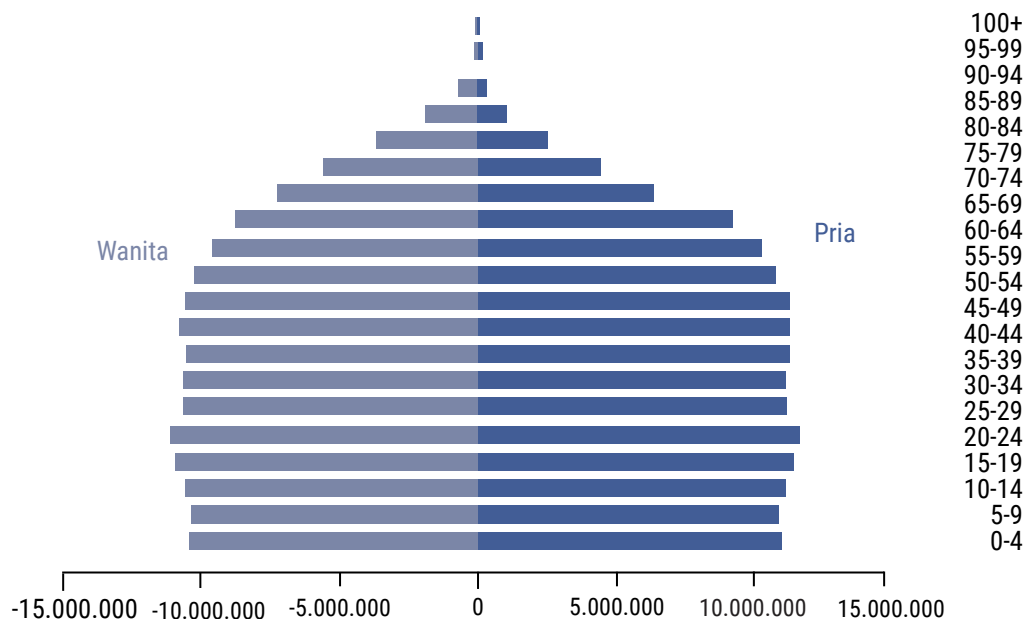


terkait kondisi masa depan yang diharapkan, serta kebijakan yang perlu diterapkan. Kebijakan yang perlu diambil harus terintegrasi di tingkat daerah. Meskipun capaian indikator TFR dan IMR hasil LF SP 2020 sudah mendekati bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, namun disparitas di tingkat provinsi masih sangat tinggi. Begitu juga dengan kondisi IMR yang memiliki disparitas hingga lebih dari dua kali lipat nilai provinsi terkecil. Oleh sebab itu, diperlukan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan advokasi pembangunan keluarga agar perbaikan indikator ini dapat dirasakan pada seluruh provinsi.

Perbedaan struktur penduduk pada setiap skenario belum terlihat secara signifikan pada tahun-tahun awal proyeksi. Perbedaan terlihat cukup mencolok pada tahun 2045, terutama pada penduduk usia muda dan lansia. Pada skenario tren dengan nilai TFR terus turun dan UHH yang lebih rendah, akan menghasilkan penduduk usia muda dan lansia yang lebih sedikit. Sementara pada skenario optimis yang menahan TFR dan peningkatan UHH secara signifikan, persentase penduduk usia muda dan lansia akan lebih tinggi.

Gambar 32. Piramida Penduduk Tahun 2045 berdasarkan Skenario Optimis

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050

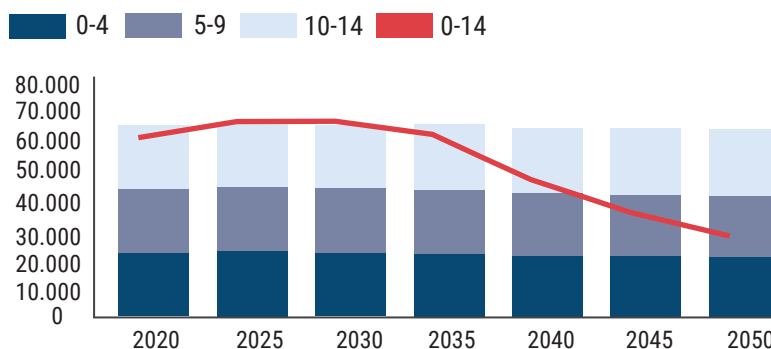


2.4 PERKEMBANGAN STRUKTUR PENDUDUK

Dampak dari menahan nilai TFR dapat terlihat lebih jelas pada perkembangan penduduk usia muda. Jumlah penduduk usia muda akan turun sejalan dengan penurunan TFR. Terdapat 66,21 juta penduduk usia 0-14 tahun pada tahun 2020 dan jumlah ini akan menurun hingga mencapai 63,54 juta pada tahun 2045 apabila TFR dibiarkan turun. Kondisi akan berbeda apabila tingkat fertilitas dijaga. Jumlah penduduk muda tahun 2045 pada skenario moderat dan skenario optimis akan tetap lebih rendah dibandingkan tahun 2020, namun akan meningkat setelah TFR berhasil ditahan yaitu mulai tahun 2048 pada skenario optimis dan mulai tahun 2049 pada skenario moderat.

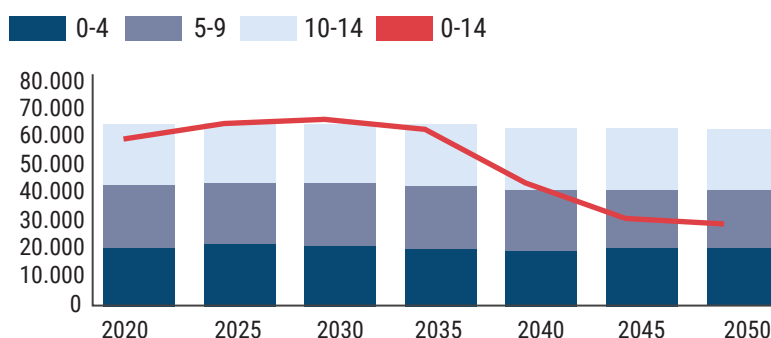
Gambar 33. Perbandingan Penduduk Usia Muda Tahun 2020-2050 Skenario Tren (dalam ribu jiwa)

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050



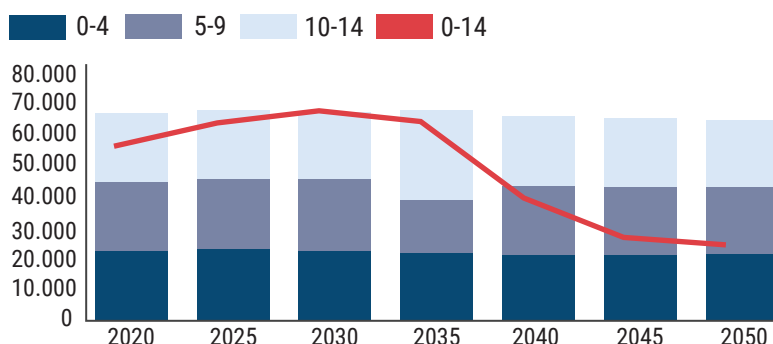
Gambar 34. Perbandingan Penduduk Usia Muda Tahun 2020-2050 Skenario Moderat (dalam ribu jiwa)

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050



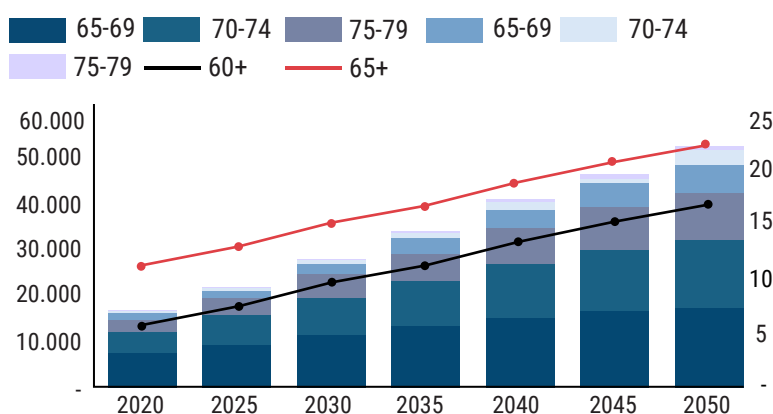
Gambar 35. Perbandingan Penduduk Usia Muda Tahun 2020-2050 Skenario Optimis (dalam ribu jiwa)

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020- 2050



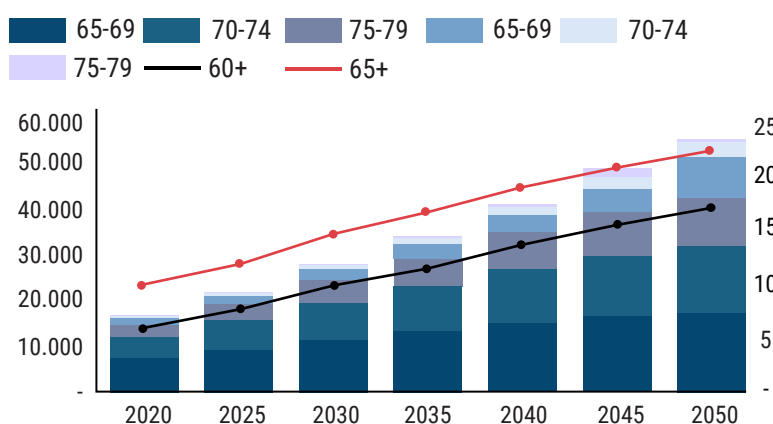
Gambar 36. Perbandingan Penduduk Lanjut Usia Tahun 2020-2050 Skenario Tren (dalam ribu jiwa)

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020- 2050



Gambar 37. Perbandingan Penduduk Lanjut Usia Tahun 2020-2050 Skenario Moderat (dalam ribu jiwa)

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020- 2050



Selain tingkat fertilitas, indikator IMR juga memengaruhi struktur penduduk. Penurunan IMR akan berdampak pada peningkatan UHH, sehingga meningkatkan jumlah penduduk lansia. Apabila menggunakan kecenderungan penurunan IMR yang ada saat ini, penduduk usia 60+ tahun Indonesia mencapai 65,8 juta jiwa yang setara dengan 20,3 persen penduduk pada 2045 dan penduduk 65+ tahun mencapai 47,3 juta jiwa atau 15,4 persen penduduk. Dengan mempercepat penurunan IMR hingga mencapai 4,2 pada tahun 2045 dan menjaga tingkat fertilitas, Indonesia akan memiliki jumlah penduduk lansia sekitar 20 persen lebih banyak.

Tingkat fertilitas dan angka kematian bayi juga berdampak pada perubahan struktur penduduk. Apabila menggunakan kecenderungan yang ada saat ini (skenario tren), jumlah penduduk produktif akan mencapai puncaknya pada tahun 2048. Sementara itu, pada skenario moderat dan skenario optimis, jumlah penduduk produktif akan terus bertambah hingga tahun 2050.

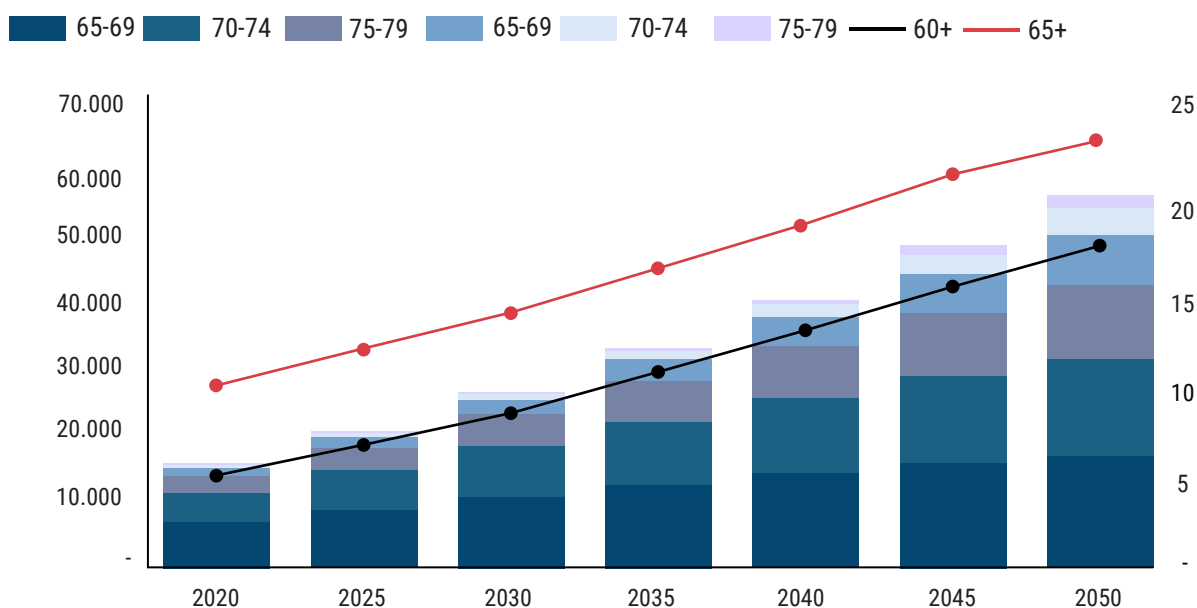
Berbicara komposisi penduduk muda, penduduk muda Indonesia saat ini diisi oleh Generasi Z dan Generasi Alpha. Generasi Z berada setelah Generasi Y/Milenial dengan kelahiran mulai dari 1997 hingga 2012. *Post Gen Z/Alpha* merupakan penduduk yang lahir setelah tahun 2013 sampai kemungkinan tahun 2028. Kedua generasi ini memiliki karakteristik cakap teknologi, kompetitif, spontan, berjiwa petualang, serta mudah mendapatkan informasi. Pada tahun 2023, Generasi Z berada pada usia 11-27 tahun dan menjadi ujung tombak pembangunan dalam waktu dekat. Oleh sebab itu, informasi seputar kelanjutan fiskal (*Fiscal Sustainability*) dari program-program pemerintah dan lembaga keuangan di masa depan perlu melihat perkembangan penduduk usia ini. Dengan menjaga tingkat kelahiran dan menurunkan

tingkat kematian bayi secara lebih cepat, Indonesia akan memiliki penduduk usia 14-25 tahun yang lebih banyak, walaupun dengan perbedaan yang tidak terlalu mencolok.

Menciptakan penduduk tumbuh seimbang merupakan upaya untuk menjaga jumlah dan proporsi penduduk usia produktif. Upaya ini bertujuan untuk memelihara kesinambungan antara jumlah penduduk usia produktif dengan kapasitas fiskal. Dengan menerapkan kebijakan luar biasa terhadap penurunan angka kematian bayi dan menjaga tingkat fertilitas, Indonesia dapat mempertahankan jumlah penduduk usia produktif dan menciptakan penduduk tumbuh seimbang untuk mempertahankan kapasitas fiskal per jumlah penduduk produktif.

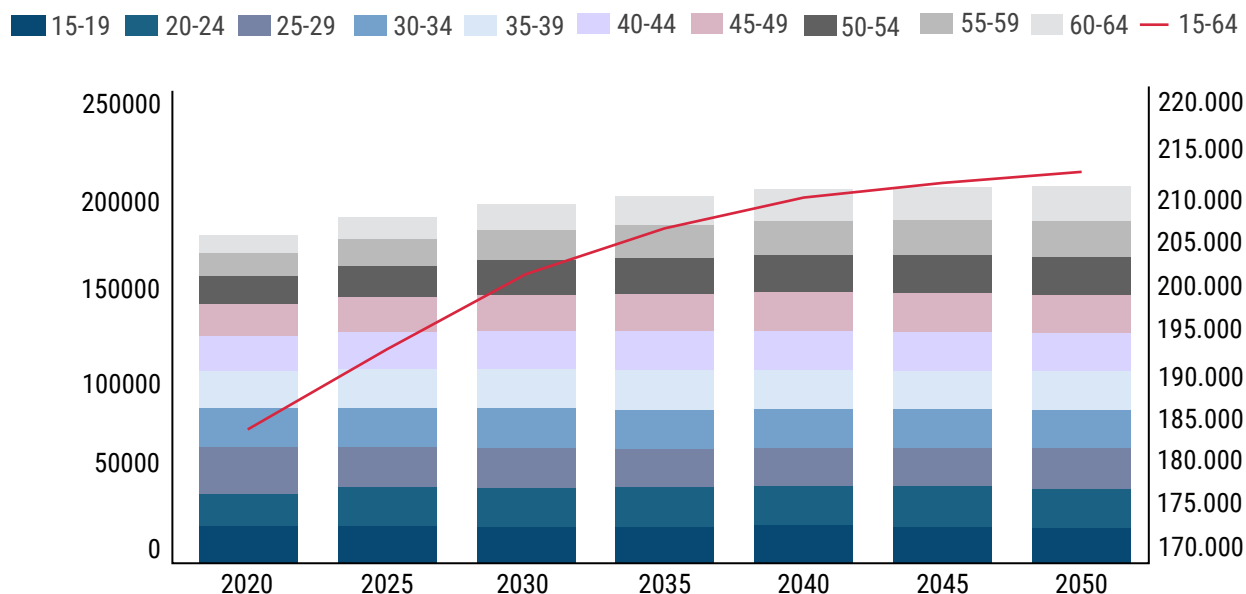
Gambar 38. Perbandingan Penduduk Lanjut Usia Tahun 2020-2050 Skenario Optimis dalam ribu jiwa)

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020- 2050



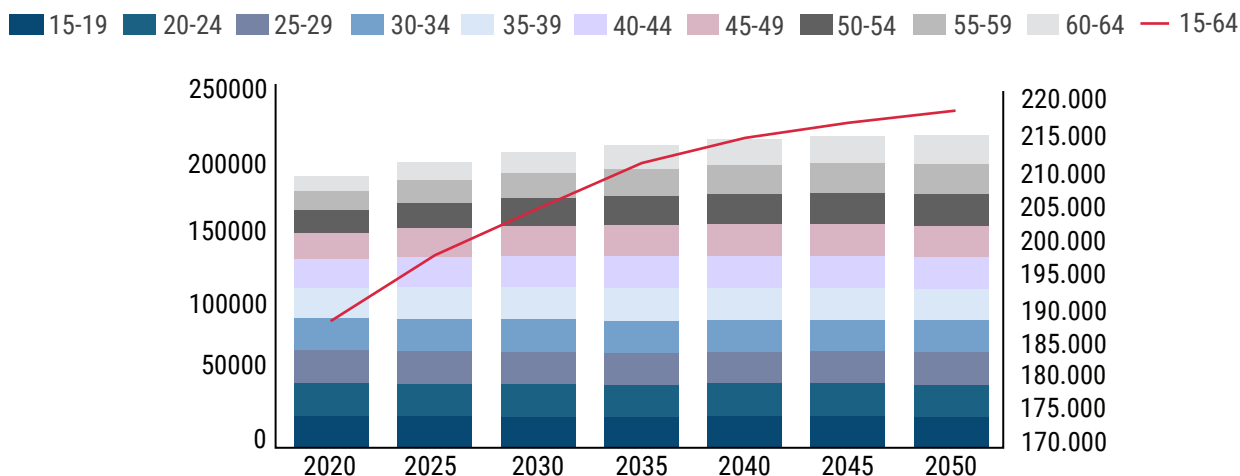
Gambar 39. Perbandingan Penduduk Usia Produktif Tahun 2020- 2050 Skenario Tren (dalam ribu jiwa)

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020- 2050



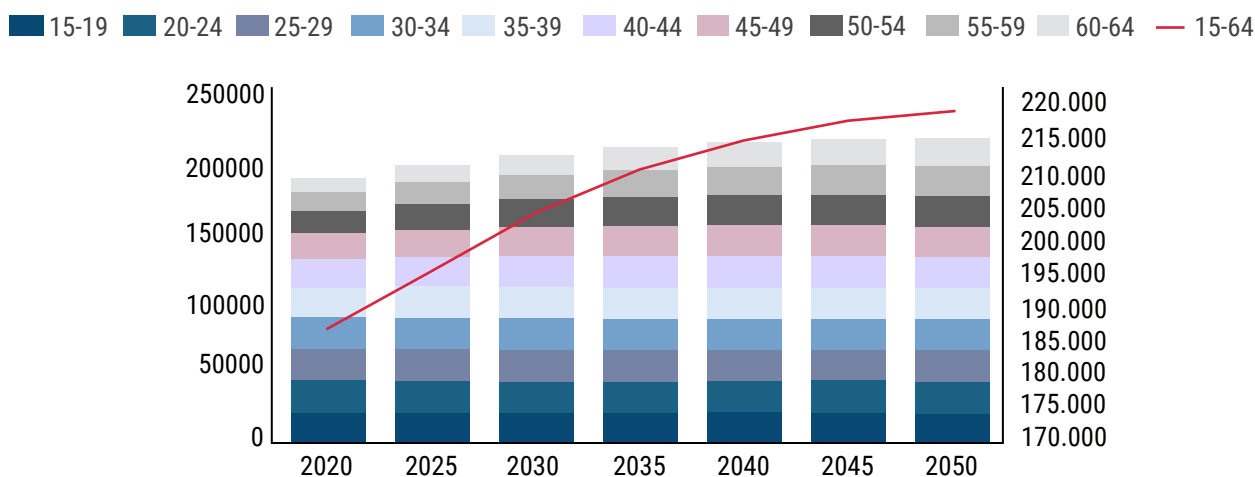
Gambar 40. Perbandingan Penduduk Usia Produktif Tahun 2020- 2050 Skenario Moderat (dalam ribu jiwa)

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020- 2050



Gambar 41. Perbandingan Penduduk Usia Produktif Tahun 2020- 2050 Skenario Optimis (dalam ribu jiwa)

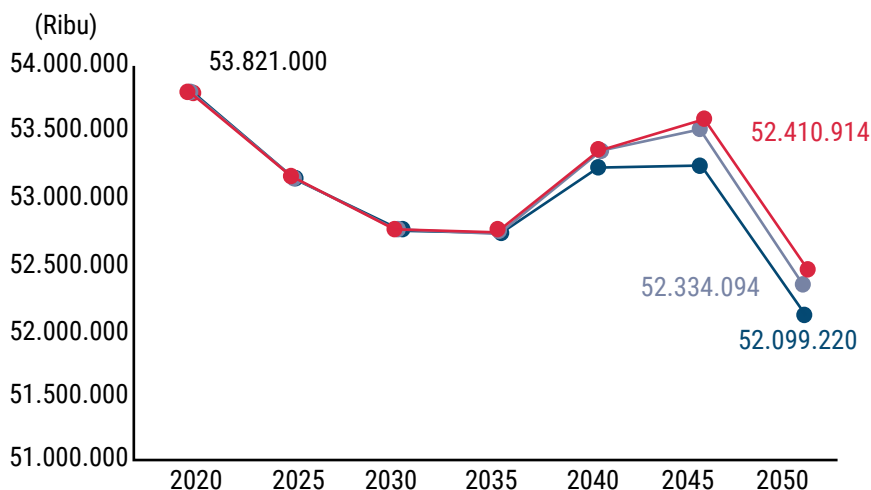
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020- 2050



Gambar 42. Perbandingan Penduduk Usia 14-25 Tahun 2020-2050 Skenario Tren dan Optimis (dalam ribu jiwa)

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020- 2050

— Skenario Tren — Skenario Tren — Optimis



03 | OPTIMALISASI BONUS DEMOGRAFI





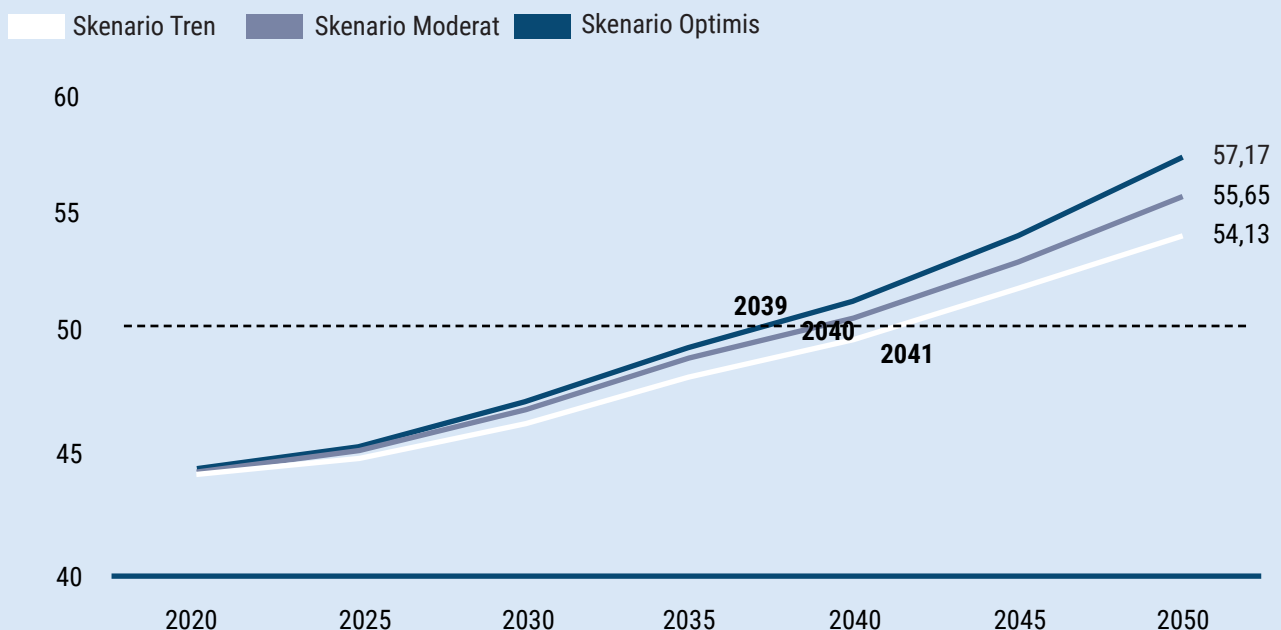
3.1 DEFINISI DAN PERIODISASI BONUS DEMOGRAFI

Bonus demografi merupakan potensi pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari perubahan struktur penduduk. Bonus demografi terjadi ketika penduduk usia kerja terus bertumbuh dan relatif lebih besar dibandingkan penduduk usia muda dan lanjut usia atau dikenal dengan rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Dengan kata lain struktur umur penduduk berubah, proporsi jumlah penduduk muda mengecil, dan proporsi penduduk usia kerja meningkat. Dengan jumlah penduduk muda yang lebih sedikit, rumah tangga dapat meningkatkan fokus pada kualitas anak. Bonus demografi menjadi momentum yang tepat bagi negara untuk fokus pada investasi sumber daya manusia yang produktif, kompetitif, dan berdaya saing. Penduduk usia kerja yang tumbuh lebih cepat daripada penduduk yang bergantung padanya menciptakan jendela kesempatan (*windows of opportunity*) untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarga yang lebih baik. Transisi demografi dapat menghasilkan standar hidup yang lebih baik bagi keluarga dan pendapatan per orang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, transisi demografi pada akhirnya dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

Berdasarkan proyeksi dengan skenario optimis, momentum bonus demografi di Indonesia menggunakan rasio ketergantungan menunjukkan percepatan periode *Windows of Opportunity*. Mengacu pada hasil proyeksi 2010-2030 (RPJMN 2005-2019), periode terendah adalah 2028-2034 dan akan berakhir setelah 2045. Namun, hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, menunjukkan bonus demografi paling cepat berakhir tahun 2039 dengan skenario optimis. Bonus demografi lebih cepat berakhir pada skenario optimis karena jumlah penduduk lansia yang tinggi (IMR rendah, UHH tinggi).

Gambar 43. Rasio Ketergantungan dengan Berbagai Skenario

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2023



3.2 BONUS DEMOGRAFI DI BERBAGAI NEGARA

Beberapa negara berhasil memanfaatkan bonus demografi untuk memacu pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, bonus demografi di Tiongkok mampu memacu pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 9,5 persen dari sebelumnya berkisar 6 persen. Pencapaian tersebut diiringi dengan beberapa strategi di antaranya:



Beberapa negara Asia lain yang berhasil mengoptimalkan bonus demografi untuk pertumbuhan ekonomi antara lain Korea Selatan, Singapura, dan Thailand. Di Korea Selatan, bonus demografi berhasil memacu pertumbuhan ekonomi dari 7,3 persen menjadi 13,2 persen. Pertumbuhan ekonomi di Singapura dari 8,2 persen meningkat menjadi 13,6 persen, sedangkan di Thailand meningkat cukup signifikan dari 6,6 persen menjadi 15,5 persen (Ogawa *et. al*, 2021).

3.3 BONUS DEMOGRAFI DALAM REGULASI

Pencapaian bonus demografi menjadi agenda prioritas dan telah tercermin dalam RPJMN 2020-2024 tentang menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya yang dilakukan salah satunya melalui peningkatan keterampilan vokasional. Pendekatan siklus hidup menjadi kunci dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing perlu mengidentifikasi kebutuhan dari setiap siklus hidup secara menyeluruh. Dengan demikian, terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tidak hanya ditentukan dari efektivitas program dan kebijakan yang menasar kelompok usia produktif, tetapi dimulai sejak adanya awal kehidupan. Di samping itu, pemerintah telah memiliki landasan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Pasal 5a disebutkan pemerintah menjamin tercapainya bonus demografi. Pasal tersebut selanjutnya disempurnakan dalam Pasal 5b yang berbunyi memanfaatkan bonus demografi untuk meningkatkan kualitas penduduk. Lebih jauh, dampak lanjutan dari bonus demografi pertama yakni bonus demografi kedua telah direspons oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Manfaat ekonomi yang besar dari bonus demografi diharapkan menjadi momentum Indonesia keluar dari *middle income trap country*.

3.4 TANTANGAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI ERA BONUS DEMOGRAFI

Indonesia masih mengalami berbagai tantangan pembangunan kependudukan, di antaranya:

- 1 Kuantitas Penduduk**
Terdapat disparitas TFR, AKI, IMR/AKB antar wilayah.
- 2 Kualitas Penduduk**
Jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang masih besar dengan kualitas yang belum memadai untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan keluarganya serta menyiapkan untuk menjadi lansia mandiri. Di sisi lain, pasar kerja didominasi sektor informal sementara sistem jaminan sosial belum mapan.
- 3 Mobilitas Penduduk**
Laju urbanisasi tinggi namun kurang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Terkait migrasi internasional, mayoritas pekerja migran internasional berpendidikan rendah (70 persen migran berpendidikan kurang dari jenjang Sekolah Menengah Pertama/SMP), masih ditemukannya *unregulated migrant*, dan mayoritas bekerja pada sektor informal serta didominasi kelompok perempuan.
- 4 Tata Kelola Data Kependudukan**
Belum tersedianya data kependudukan dan statistik hayati yang lengkap dan berkualitas yang ditandai dengan masih adanya variasi cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, sistem belum tersinkronisasi dan terkoneksi dalam pola interoperabilitas metadata, serta pemanfaatan data yang belum optimal.

Oleh sebab itu, kebijakan optimalisasi bonus demografi perlu diarahkan pada:



Pengendalian jumlah penduduk untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang



Pengembangan ekosistem untuk mendorong persebaran penduduk yang merata dengan memperhatikan faktor *enable* (memberi situasi yang kondusif), *attract* (menarik minat penduduk), *grow* (meningkatkan kemampuan), serta *retain* (mempertahankan penduduk untuk tetap tinggal)



Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta adaptif terhadap perubahan teknologi



Penataan dan pengelolaan sistem registrasi kependudukan yang terkoneksi dan terintegrasi yang mencakup statistik hayati.

3.5 KOMPONEN UTAMA DALAM MEMETIK BONUS DEMOGRAFI

Terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam usaha mengoptimalkan manfaat dari bonus demografi.

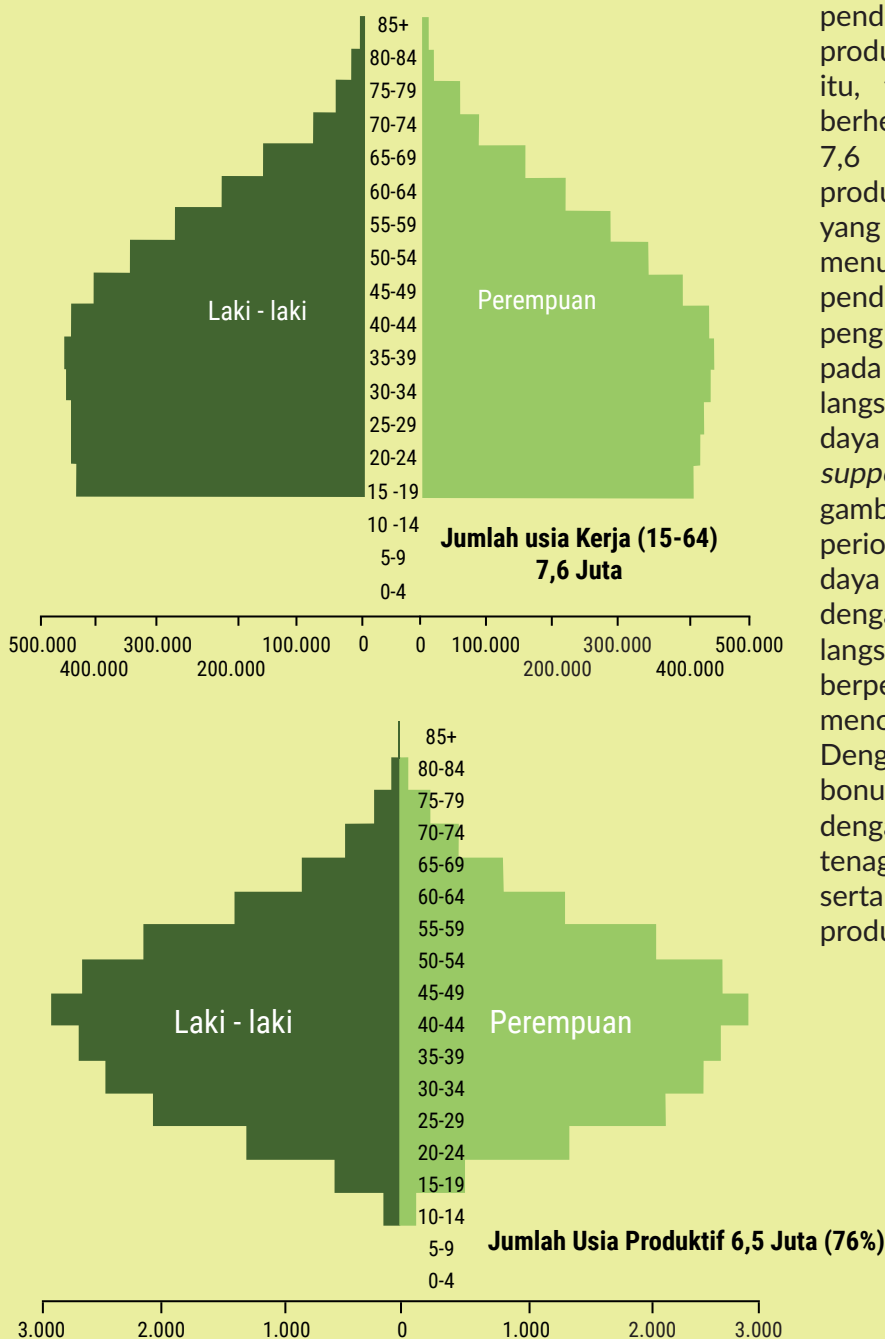
- 1. Meningkatkan sumber daya manusia.** Kualitas modal manusia menjadi kunci utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Membangun kualitas manusia sejak dini dengan pendekatan siklus hidup menjadi langkah utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- 2. Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.** Penyerapan tenaga kerja yang optimal menjadi penentu kesuksesan dalam memanfaatkan bonus demografi. Melalui penyerapan tenaga kerja yang optimal, negara mendapatkan keuntungan melalui skema pajak sedangkan pekerja mulai dapat mengumpulkan aset untuk investasi
- 3. Mengatasi penduduk usia muda *Not in Education, Employment, or Training* (NEET).** Pencapaian bonus demografi tidak terlepas dari tantangan terkait keterbatasan akses dalam memperoleh pendidikan, pelatihan, serta pekerjaan pada usia muda. Identifikasi berbagai keterbatasan akan membantu merumuskan berbagai kebijakan pengembangan keahlian dan kurikulum pendidikan yang berkualitas.
- 4. Meningkatkan partisipasi kerja perempuan.** Partisipasi kerja perempuan di Indonesia masih berkisar 53 persen pada tahun 2022, sedangkan di negara-negara Asia Timur dan Asia Pasifik sudah mencapai 60 persen. Mendorong partisipasi kerja perempuan dilakukan dengan tetap meningkatkan perlindungan dan memperhatikan kesejahteraan pekerja perempuan.
- 5. Memperkuat literasi keuangan dan investasi.** Literasi keuangan dan investasi menjadi komponen penting dalam menentukan pencapaian bonus demografi kedua.

3.6 MEMPERPANJANG BONUS DEMOGRAFI

Bonus demografi merupakan potensi pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari perubahan struktur penduduk. Perhitungan periode bonus demografi dapat dilakukan dengan membandingkan penduduk usia muda dan lansia dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun) atau dikenal dengan rasio ketergantungan. Namun, dalam penggunaan rasio ketergantungan, penentuan penduduk produktif hanya dilakukan berdasarkan umur. Oleh sebab itu, upaya memperpanjang bonus demografi hanya dapat dilakukan dengan menjaga laju pertumbuhan penduduk usia produktif agar lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk usia muda dan lansia.

Gambar 44. Perbandingan Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Efektif Produktif di DKI Jakarta Tahun 2022

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2023



Namun demikian, tidak seluruh penduduk usia produktif mempunyai produktivitas yang memadai. Selain itu, tidak semua penduduk lansia berhenti produktivitasnya. Dari 7,6 juta penduduk yang berusia produktif, hanya terdapat 6,5 juta yang betul-betul produktif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh penduduk usia produktif memiliki penghasilan yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara langsung. Perhitungan menggunakan daya dukung ekonomi (*economic support ratio*) dapat memberikan gambaran yang lebih akurat terkait periode bonus demografi. Perhitungan daya dukung ekonomi dilakukan dengan membandingkan secara langsung jumlah penduduk produktif/berpenghasilan (produsen) yang menopang 100 penduduk (konsumen). Dengan menggunakan perhitungan ini, bonus demografi dapat diperpanjang dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, menunda umur pensiun, serta meningkatkan jumlah lansia produktif.

3.7 OPTIMALISASI BONUS DEMOGRAFI MENCAPAI BONUS DEMOGRAFI KEDUA

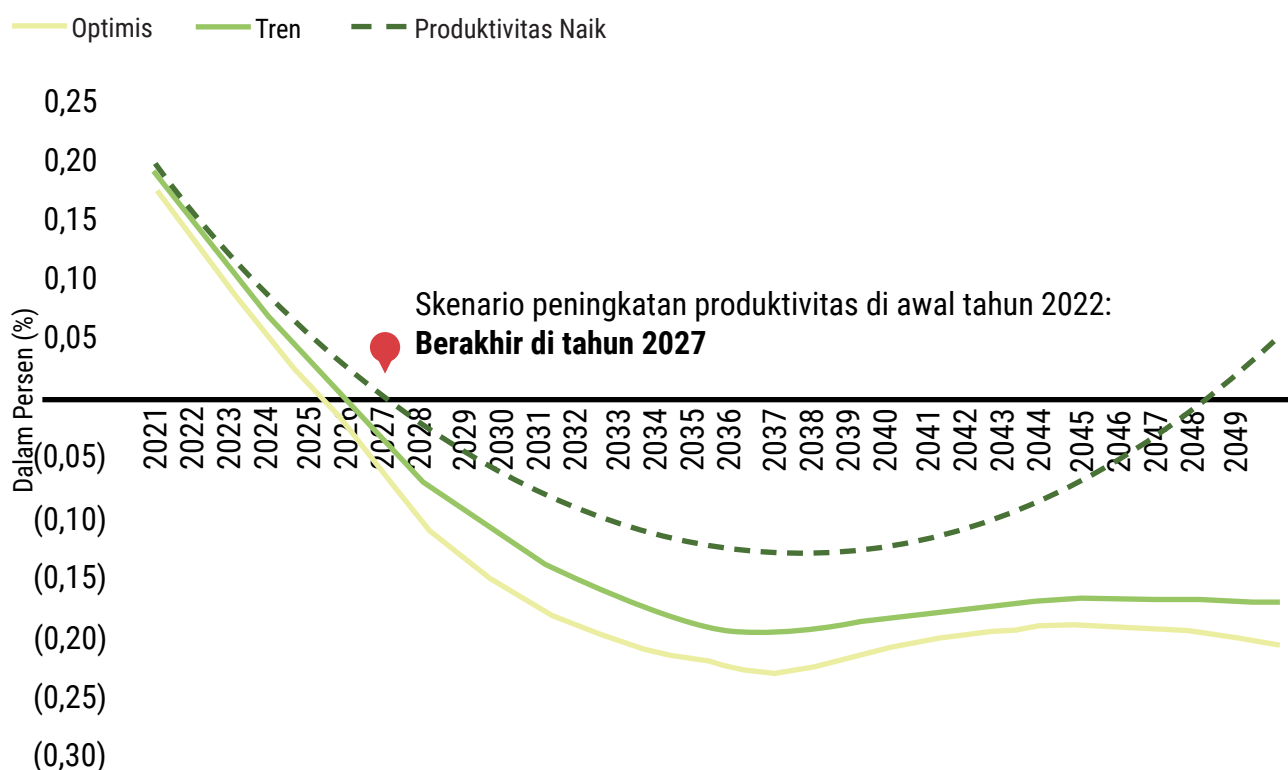
Optimalisasi bonus demografi menjadi syarat untuk dapat mencapai manfaat ekonomi dari bonus demografi kedua dilakukan sebagai berikut:

3.7.1 Menciptakan Lapangan Kerja dan Mendukung Penciptaan Wirausaha Baru

Lapangan kerja yang berkualitas mampu menciptakan peluang untuk penduduk usia produktif agar turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Salah satu upaya penciptaan lapangan kerja yakni melalui peningkatan investasi pengembangan industri padat karya. Di samping itu, perlu peningkatan program pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Mengembangkan infrastruktur usaha skala kecil dan menengah serta meningkatkan peluang wirausaha menjadi alternatif yang dapat dilakukan. Selanjutnya, dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu ditingkatkan di antaranya melalui pemberian kemudahan dan meningkatkan akses pembiayaan, perluasan pemasaran, dan perlindungan usaha. Di sisi lain, perlu menciptakan iklim kerja yang kondusif melalui harmonisasi Undang-Undang (UU) tentang Ketenagakerjaan dan UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan. Penciptaan lapangan kerja yang masif juga perlu diiringi dengan peningkatan keterampilan pekerja melalui perluasan akses terhadap pelatihan serta pengembangan kurikulum untuk meningkatkan *hard skill* dan *soft skill*.

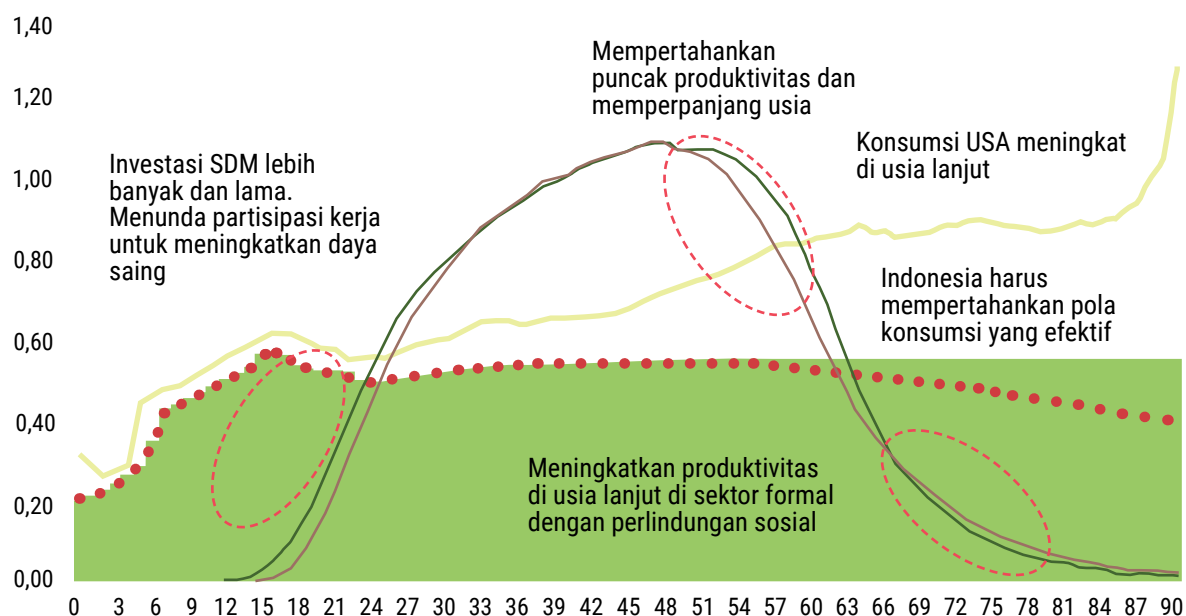
Gambar 45. Bonus Demografi Pertama Menurut Skenario Proyeksi Penduduk Tahun 2020-2045

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2023



Gambar 46. Konsumsi dan Labor Income per Capita per Usia Tunggal di Indonesia (2012) Dibandingkan dengan Amerika Serikat (2010)

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2023



3.7.2 Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja

Upaya optimalisasi bonus demografi tidak hanya berhenti pada penambahan jumlah penduduk produktif dan memperpanjang bonus demografi, tetapi juga peningkatan produktivitas penduduk. Produktivitas penduduk dapat dihitung dari besaran pendapatan penduduk yang diperoleh dari berbagai sumber seperti upah, keuntungan usaha, maupun hasil investasi. Dengan meningkatkan produktivitas penduduk, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat sebagai bagian dari bonus demografi.

Dari produktivitas yang dimiliki penduduk Indonesia saat ini, bonus demografi menyumbangkan rata-rata sekitar 0,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi dan berakhir pada tahun 2026. Apabila produktivitas penduduk berhasil ditingkatkan, maka dampak positif bonus demografi pertama terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diperpanjang bahkan apabila peningkatan produktivitas dilakukan secara berkesinambungan akan terus menjadi bagian dari bonus demografi.

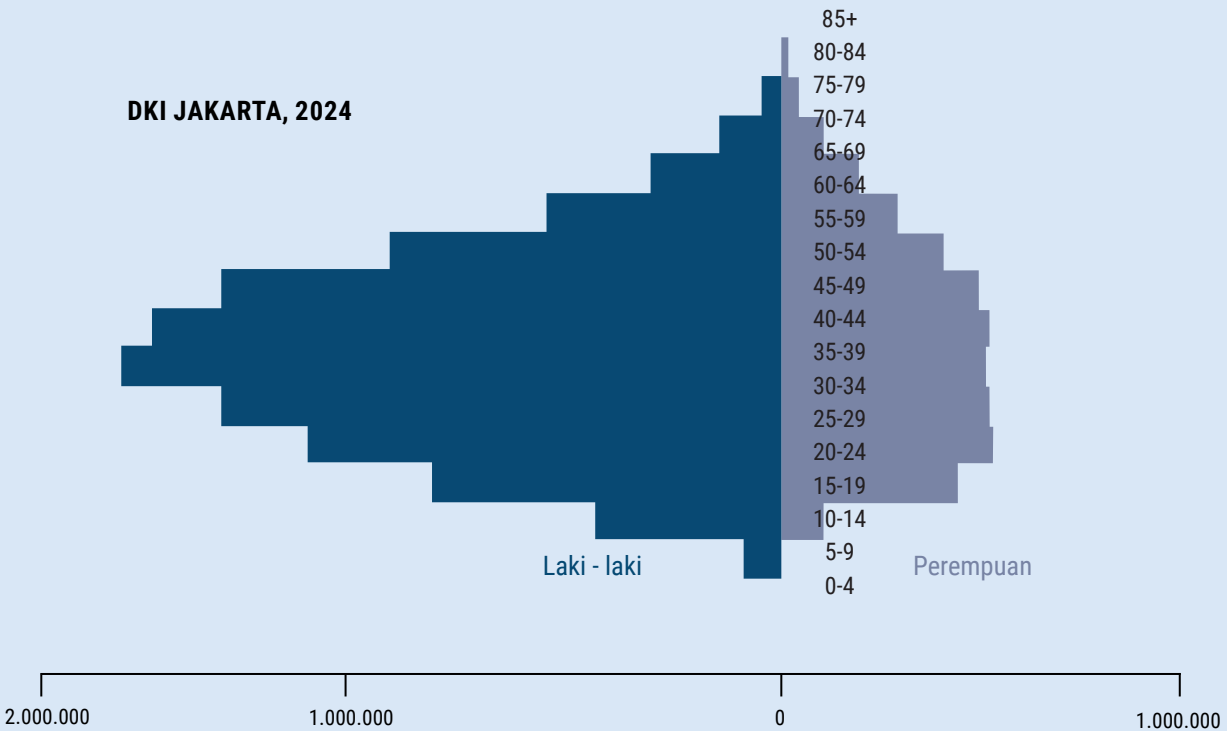
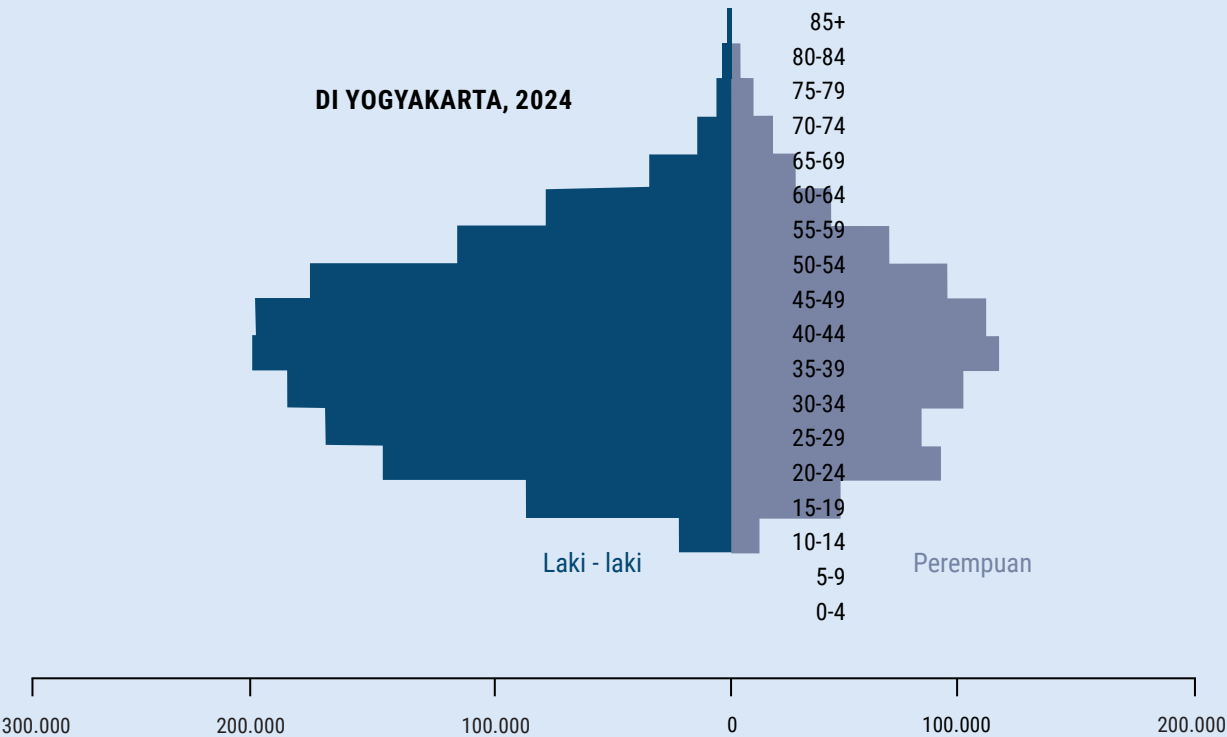
Pada periode bonus demografi pertama, pertumbuhan ekonomi terjadi sebagai hasil dari perubahan struktur penduduk. Dalam hal ini, produktivitas penduduk dapat ditingkatkan melalui peningkatan kuantitas dan durasi investasi sumber daya manusia, terutama pada penduduk muda. Periode investasi sumber daya manusia dapat diarahkan agar penduduk dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan yang tinggi cenderung sejalan dengan meningkatnya produktivitas. Kondisi ini disebabkan penduduk yang berpendidikan tinggi cenderung mendapat kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan produktivitas yang lebih tinggi. Investasi sumber daya manusia juga harus diterima oleh penduduk perempuan yang saat ini memiliki produktivitas yang jauh lebih rendah daripada penduduk laki-laki.

Di samping itu, upaya peningkatan produktivitas penduduk perlu memperhatikan aspek ketimpangan antarwilayah. Gambaran produktivitas pada provinsi terpilih yang diperoleh melalui data BPS (2012) menunjukkan DKI Jakarta memiliki produktivitas hampir dua kali rata-rata nasional. Sebagai gambaran, profil jumlah penduduk usia kerja (15+) di Provinsi DIY tahun 2022 sebesar 3,2 juta, sedangkan jumlah usia kerja (15+) di DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 8,5 juta.

Apabila aspek produktivitas digunakan, maka jumlah penduduk efektif produktif Provinsi DI Yogyakarta adalah 1,8 juta (55 persen), sedangkan jumlah penduduk efektif produktif Provinsi DKI Jakarta adalah 6,6 juta (78 persen). Kondisi ini mengindikasikan proporsi angkatan kerja efektif produktif Provinsi DKI Jakarta lebih besar daripada Provinsi DI Yogyakarta. Dengan demikian, peningkatan produktivitas perlu diiringi dengan upaya-upaya untuk mengurangi ketimpangan.

Gambar 47. Produktivitas Angkatan Kerja pada Provinsi Terpilih

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2023

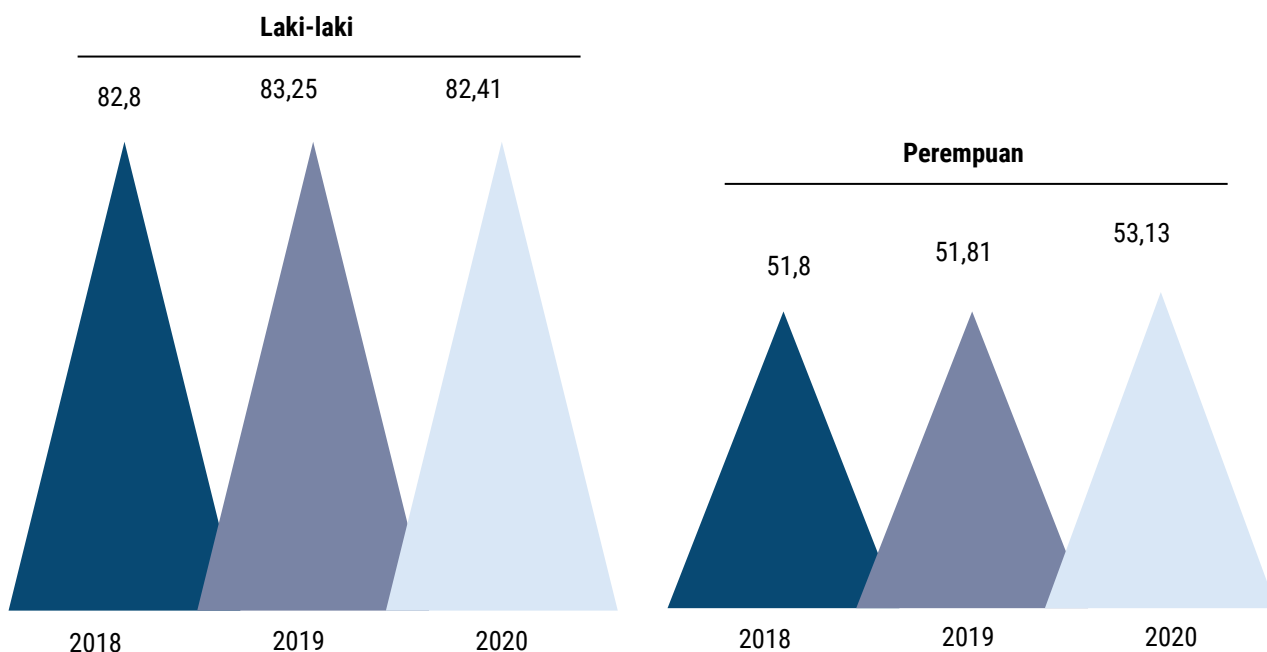


3.7.3 Meningkatkan Partisipasi Kerja Perempuan

Partisipasi perempuan di pasar kerja belum meningkat signifikan terhitung tahun 2018 hingga tahun 2020. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara partisipasi angkatan kerja laki-laki dengan angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan memang mengalami tren kenaikan namun tidak signifikan. Meningkatkan partisipasi kerja perempuan memerlukan kerja sama semua pihak salah satunya melalui sektor pendidikan dengan mengembangkan pengajaran tentang kesetaraan gender di pendidikan formal. Dilihat dari sektor pekerjaan, perempuan banyak terserap pada sektor informal. Sementara sektor informal adalah sektor yang rentan baik terkait kesejahteraan maupun perlindungan hak-haknya sehingga perempuan cenderung bekerja tapi tidak berkarir. Upaya meningkatkan partisipasi kerja perempuan perlu diiringi dengan regulasi tentang peningkatan kesejahteraan dan penguatan kebijakan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Gambar 48. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: BPS diolah



3.7.4 Memperkuat Regulasi Ketenagakerjaan Sektor Informal dan UMKM serta Mengembangkan Kewirausahaan Nasional

Pada tahun 2045, rasio kewirausahaan nasional diperkirakan mencapai 6,04 persen. Target tersebut perlu didukung melalui koordinasi pemangku kepentingan, pengembangan kewirausahaan tematik dan berkelanjutan serta penguatan ekosistem kewirausahaan. Berbagai kebijakan dapat diarahkan untuk menciptakan iklim bisnis yang mendukung investasi industri mikro dan kecil dengan identifikasi tepat penduduk rentan dan menuju menengah ke atas, sehingga tercipta kesempatan kerja baru yang lebih banyak dan layak.

Selain itu, peran pemerintah dalam program perantara pasar bagi UMKM merupakan hal yang penting. Dengan adanya program perantara pasar, para pelaku UMKM mendapatkan kemudahan dalam pemasaran produknya, sehingga para pelaku UMKM dapat fokus dalam mengembangkan produknya. Sebagai tambahan, dengan perantara pasar, pelaku UMKM lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman dalam mengembangkan usaha karena sudah mendapatkan kepastian dalam memasarkan produk yang mereka jual.

3.7.5 Mengurangi Kesenjangan Wilayah

Bonus demografi diharapkan tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan ekonomi. Pembangunan yang dilakukan selama ini telah menunjukkan peningkatan capaian mulai dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, IPM, hingga UHH. Berbagai indikator tersebut ternyata berkaitan dengan transisi demografi. Upaya optimalisasi bonus demografi perlu dilakukan dengan memperhatikan tahapan bonus demografi di masing-masing wilayah. Sebagai contoh, DI Yogyakarta dan DKI Jakarta yang telah memasuki tahap transisi lanjut dimana jendela peluang hampir tertutup, maka berbagai kebijakan perlu diarahkan untuk menghadapi peningkatan jumlah lansia tanpa mengabaikan upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja agar ekonomi tetap bertumbuh. Sementara itu, di wilayah seperti NTT dan Papua yang belum diketahui kapan periode bonus demografi berlangsung, maka berbagai kebijakan dapat diarahkan pada peningkatan IPM agar mendorong percepatan penurunan fertilitas dan mortalitas yang memicu dimulainya transisi demografi.

3.7.6 Membangun Platform Data Nasional

Penyediaan data yang lengkap dan akurat menjadi modal untuk melakukan berbagai kajian tentang optimalisasi bonus demografi termasuk melakukan proyeksi berbagai indikator kependudukan secara komprehensif. Data yang terintegrasi menjadi kunci untuk melihat peluang baru dan manfaat lain sekaligus tantangan dari realisasi bonus demografi. Kebijakan Satu Data Indonesia menjadi langkah awal yang tepat untuk menghimpun meta data dan wali data dari berbagai sektor. Oleh sebab itu, upaya ini perlu mendapat dukungan yang intensif dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan terkait.

3.7.7 Investasi Meliputi Sumber Daya Manusia

Bonus demografi memberikan peluang dan juga tantangan bagi Indonesia. Dengan banyak penduduk usia produktif, maka pertumbuhan ekonomi dapat bertumbuh dengan lebih cepat. Namun terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar pekerja produktif dapat masuk ke dalam dunia kerja. Pertama, investasi terhadap sumber daya manusia sejak dini. Investasi ini bertujuan untuk memberikan kemampuan yang mumpuni kepada pekerja, maupun calon pekerja Indonesia di masa depan agar dapat berdaya saing. Kedua, sumber daya manusia yang berdaya saing perlu dilindungi melalui pelayanan kesehatan yang memadai dan dapat dijangkau oleh semua penduduk. Pelayanan dan perlindungan di sektor kesehatan memiliki fungsi yang sangat krusial agar pekerja Indonesia dapat bekerja hingga masa pensiun dan menikmati hari tuanya. Kesehatan universal perlu ditekankan sebagai bagian dari peningkatan akses dan kualitas layanan dasar serta peningkatan usia harapan hidup. Penduduk dengan usia harapan hidup yang tinggi dengan kondisi sehat dan produktif mampu menyaksikan tercapainya bonus demografi kedua.

Di samping itu, penguatan program keluarga berencana menjadi bagian dari investasi kesehatan universal. Ke depannya, program keluarga berencana tidak hanya berorientasi pada pengurangan jumlah anak, namun mendorong keluarga agar memiliki jumlah anak yang ideal dengan kualitas yang tinggi. Dengan jumlah anak yang ideal, bonus demografi dapat diperpanjang dengan mempertahankan jumlah kelahiran sehingga jumlah penduduk usia produktif terus terjaga dan laju penuaan penduduk dapat diperlambat. Ketiga, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Keluarga dengan jumlah anak yang ideal dapat memperbaiki kondisi kesehatan keluarga, terutama ibu. Dengan kesehatan penduduk perempuan yang baik, kesempatan perempuan untuk terlibat aktif ke dalam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat semakin terbuka. Terbukanya peluang bagi perempuan berpotensi meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Oleh sebab itu, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu investasi penting dalam optimalisasi bonus demografi.

3.7.8 Menjaga Tingkat Produktivitas dan Tingkat Konsumsi Hingga Lansia

Setelah produktivitas meningkat, langkah selanjutnya adalah menjaga tingkat produktivitas dan tingkat konsumsi hingga mencapai lansia. Hal ini dapat dicapai dengan mempertahankan puncak produktivitas dan memperpanjang usia pensiun. Di samping itu, perlu untuk mengembangkan skema lapangan pekerjaan ramah dan padat lansia, salah satunya dengan mempromosikan pekerjaan paruh waktu bagi lansia.

Periode bonus demografi masih dapat berlanjut pada tahap kedua dimana jumlah penduduk non-produktif lebih banyak disumbang oleh penduduk lansia yang jumlahnya semakin meningkat. Penduduk usia kerja yang lebih tua dan menghadapi masa pensiun yang diperpanjang memiliki insentif yang kuat untuk mengakumulasi aset untuk menghidupi diri mereka sendiri. Aset ini biasanya diinvestasikan baik dalam sarana investasi domestik maupun internasional dan akan menambah pendapatan nasional suatu negara. Peningkatan pendapatan nasional ini disebut sebagai dividen kedua yang akan terus diperoleh tanpa batasan waktu tertentu.

3.7.9 Penguatan Ekosistem dan Perluasan Kepesertaan Jaminan Sosial

Jaminan sosial ketenagakerjaan setidaknya memiliki dua peran penting dalam optimalisasi bonus demografi. Pertama, sebagai jaring pengaman terhadap risiko kerja termasuk kehilangan pekerjaan. Kedua, sebagai tabungan untuk mempertahankan tingkat konsumsi ketika memasuki masa pensiun. Jaminan sosial ketenagakerjaan yang menawarkan berbagai manfaat jangka panjang termasuk jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Oleh sebab itu, perlu penguatan ekosistem kelembagaan jaminan sosial agar dana investasi dapat dikelola secara optimal. Di samping itu, bonus demografi kedua akan diraih secara optimal jika upaya tersebut diiringi dengan perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan ke sektor informal untuk mendorong manfaat jaminan sosial yang lebih inklusif.

3.7.10 Mempromosikan Tabungan dan Investasi Pada Generasi Muda

Tabungan dan investasi sebagai bagian dari literasi finansial merupakan aset penting bagi penduduk muda untuk menjadi lansia yang mandiri di masa mendatang. Peningkatan tabungan dari penduduk usia produktif efektif membuka peluang untuk dikelola secara produktif. Hal tersebut berpotensi membuka lapangan kerja baru dan memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.

“

"Oleh sebab itu ke depan yang namanya pemuda ini sangat penting sekali bagi negara kita karena bonus demografi yang kita dapatkan. Jangan sampai menjadi beban, tapi mestinya menjadi modal kita untuk melompat maju,"

- Ir. Joko Widodo-

Disampaikan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (22/2/2023)

”

04 | RESPON KEBIJAKAN TERHADAP PERUBAHAN DEMOGRAFI





Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 menghasilkan tiga nilai proyeksi parameter dan karakteristik penduduk. Apabila target TFR dan IMR dapat tercapai, akan terdapat *gap* atau jarak antara kondisi eksisting (skenario tren tanpa intervensi target kebijakan) dengan kondisi ideal (skenario kombinasi tren dan target serta skenario target kebijakan). Untuk itu perlu menyiapkan strategi mengantisipasi terciptanya *gap* di masa yang akan datang.

Jumlah penduduk Indonesia di masa depan akan terus bertambah. Jumlah yang besar sebaiknya diikuti dengan kualitas SDM. Jumlah penduduk yang besar juga mengindikasikan besarnya kebutuhan akan pelayanan publik dan perlindungan sosial khususnya bagi penduduk kelompok rentan. Untuk itu perlu upaya untuk memenuhi dan memfasilitasi penduduk melalui kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan yang menunjang peningkatan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, perumahan, dan sebagainya.

4.1 MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG SEIMBANG

Pemerintah Indonesia perlu mempertahankan jumlah penduduk yang seimbang agar potensi pertumbuhan ekonomi dari sisi demografi dapat terjaga. Terdapat empat strategi yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan penduduk seimbang. Strategi pertama yang dapat diterapkan oleh pemerintah adalah meningkatkan peserta KB aktif, menurunkan *drop out*, dan mengurangi kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need* KB). Kedua, pemerintah juga perlu memastikan kebijakan pengendalian kelahiran berencana berdasarkan wilayah dan kelompok sasarnya. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi, informasi, dan edukasi prinsip-prinsip pembangunan keluarga dan menghasilkan anak yang berkualitas dengan intervensi sejak dini sesuai kondisi wilayah. Strategi kedua dan ketiga diterapkan untuk merespons kondisi TFR dari provinsi-provinsi di Indonesia yang berada pada level yang berbeda. Selanjutnya, strategi keempat adalah meningkatkan pendampingan pembangunan keluarga.

Pembangunan keluarga bertujuan menekankan pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat menjadi sasaran utama dalam pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan, sehingga diperlukan intervensi berbeda namun berkelanjutan. Dalam konteks upaya penurunan IMR, pendekatan keluarga merupakan salah satu langkah strategis yang

dapat dilakukan melalui program kesehatan ibu hamil yang termasuk dalam kesehatan reproduksi.

Selanjutnya, pemerintah juga perlu memastikan pendampingan dan peningkatan kualitas layanan KB. Hal ini diperlukan untuk memastikan program KB berjalan sesuai dengan tujuan awal yaitu agar pasangan memiliki anak berkualitas. Anak yang berkualitas didapatkan apabila orang tua mengikuti anjuran program KB yaitu menjalankan program Hindari 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu sering/banyak).

Terlalu muda misalnya ibu hamil pertama usia kurang dari 21 tahun secara fisik kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal sehingga terlalu berisiko untuk melahirkan. Terlalu tua misalnya ibu hamil pertama pada usia lebih dari 35 tahun sehingga menyebabkan risiko kematian pada ibu dan bayi meningkat secara signifikan. Terlalu dekat yang dimaksud adalah jarak antara kehamilan pertama dan berikutnya kurang dari 2 tahun yang menyebabkan tumbuh kembang anak menjadi kurang optimal. Terlalu banyak anak misalnya ibu pernah hamil dan melahirkan lebih dari 2 kali yang menyebabkan terhambatnya proses persalinan, seperti gangguan kontraksi, kelainan letak dan posisi janin, serta perdarahan pasca persalinan.

Strategi penurunan kelahiran ataupun penjarangan kelahiran dapat diupayakan melalui program KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan meningkatkan Angka Prevalensi Kontrasepsi (APK/CPR) dan mendorong PUS untuk beralih ke MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). Selain itu, mengupayakan penurunan angka *unmet need* pada proporsi PUS dalam status kawin yang tidak menggunakan alat

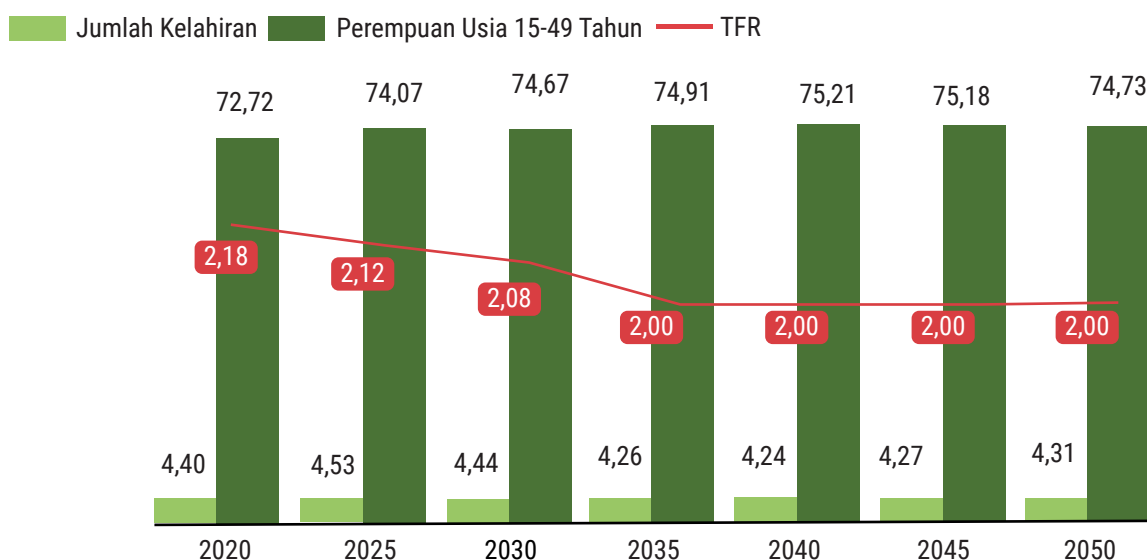
kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak. Pendekatan dan sosialisasi ke masyarakat juga diperlukan agar lebih memahami akan pentingnya program KB bagi kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Ibu hamil termasuk kelompok penduduk usia subur atau usia reproduksi (15-49 tahun). Menurut SP 2020, jumlah perempuan usia 15-49 tahun yaitu 72,7 juta jiwa atau lebih dari separuh (54,6 persen dari total perempuan). Di masa depan, jumlah perempuan usia reproduksi masih cukup tinggi yaitu 74,82 juta jiwa (2050) atau 44 persen dari total penduduk perempuan. Di sisi lain, walaupun TFR relatif menurun, namun kelahiran masih tinggi yaitu sekitar empat juta kelahiran per tahun, karena jumlah perempuan di usia reproduksi juga masih cukup besar.

Strategi selanjutnya adalah pemerintah perlu menerapkan kebijakan pengendalian penduduk yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kelompok sasarannya. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat terdapat perbedaan yang signifikan terkait kondisi TFR di masing-masing provinsi di Indonesia. Selain itu, perbedaan budaya juga perlu dipikirkan jika ingin menerapkan kebijakan pengendalian penduduk di provinsi tertentu. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan pengendalian penduduk yang memperhatikan capaian TFR dan kearifan lokal pada masing-masing provinsi.

Gambar 49. Proyeksi Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun, Jumlah Kelahiran, dan TFR Indonesia 2020-2050 (Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Skenario Optimis)

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050



4.2 PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT

Salah satu indikator yang dapat untuk mengukur tingkat pendidikan suatu negara adalah dengan menggunakan hasil dari Survei *The Programme for International Student Assessment* (PISA). Survei ini bertujuan untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di masyarakat dari pelajar (yang berusia 15 tahun ke atas). Pada survei PISA tahun 2018, Indonesia mendapatkan nilai rata-rata 382 dari 3 subjek yang diujikan (*Reading*: 371; *Matematika*: 379; *Ilmu Pengetahuan Alam*: 396). Nilai tersebut menempatkan Indonesia pada posisi 71 dari 77 negara yang berpartisipasi dan peringkat lima dari enam negara ASEAN yang berpartisipasi.

Percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata ditujukan untuk mewujudkan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi. Selain itu, Program Indonesia Pintar yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu, dimaksudkan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah pada keluarga tersebut. Peningkatan pendidikan bukan hanya ditujukan pada siswa namun juga bagi tenaga pengajar. Tenaga pengajar diharapkan menjadi semakin kreatif, inovatif, dan inspiratif dalam merancang kegiatan pembelajaran.

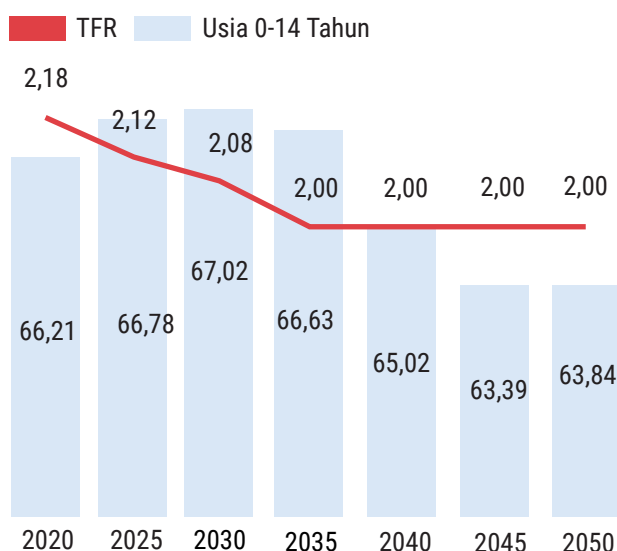
Tabel 7. Rata-rata Nilai Pisa 2018

Sumber: OECD, 2019

Negara	Rata-rata Nilai PISA 2018	Peringkat
Singapura	556.3	2
Rata-rata Negara OECD	488.3	
Malaysia	431.0	48
Brunei Darussalam	423.0	53
Thailand	412.7	60
Indonesia	382.0	71
Filipina	350.0	76

Gambar 50. Proyeksi Penduduk Usia 0–14 Tahun dan TFR Indonesia 2020-2050 (Skenario Optimis)

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050

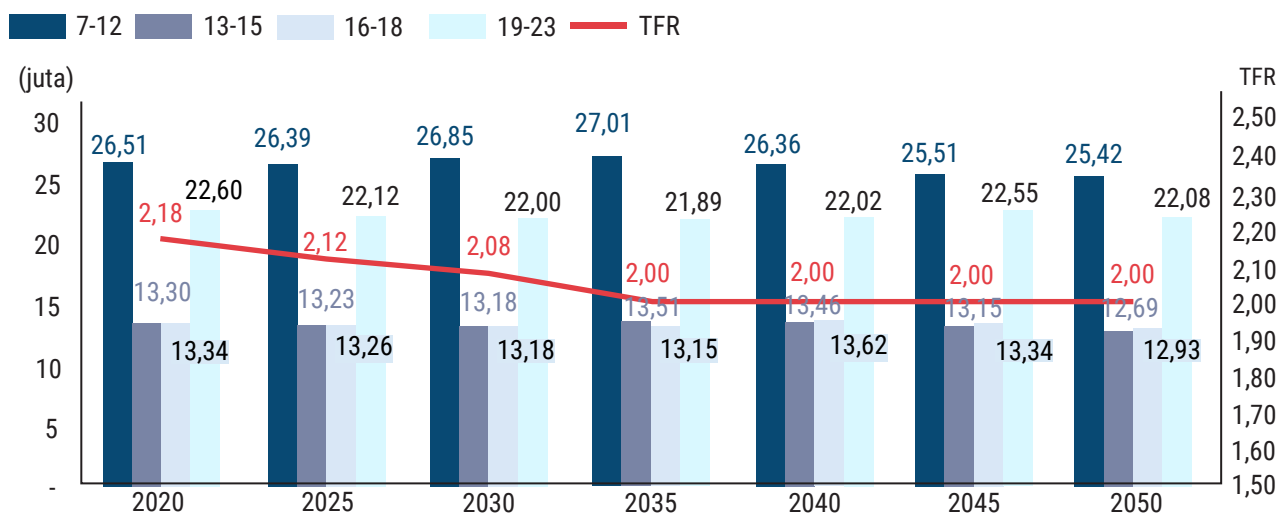


Pembangunan infrastruktur internet yang memadai sampai ke pelosok Indonesia perlu menjadi perhatian sejak saat ini. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi arus digitalisasi dalam proses pendidikan dan memperoleh keterampilan. Akses internet di perkotaan saat ini sudah cukup memadai dalam menopang perubahan cara belajar yang selama ini sudah terjadi. Namun demikian, akses internet di perdesaan dan daerah terpencil perlu ditingkatkan secara signifikan dibandingkan dengan saat ini. Hal tersebut diperlukan untuk mengantisipasi perubahan proses belajar di masa yang akan datang. Diperkirakan proses cara belajar akan menjadi semakin fleksibel dimana setiap murid tidak harus datang ke sekolah setiap hari, melainkan lebih banyak belajar mandiri menggunakan multimedia interaktif.

Selanjutnya, kemudahan mengakses pendidikan yang berkualitas di semua jenis dan jenjang pendidikan diperlukan untuk merespons arus digitalisasi. Pemerintah perlu merancang kurikulum agar sesuai dengan kemajuan industri dan kebutuhan dunia usaha, dan disesuaikan dengan kondisi empiris. Selain itu, pemerintah tetap perlu mengembangkan pendidikan vokasi sebagai sarana pelatihan keterampilan dalam memasuki dunia kerja.

Gambar 51. Proyeksi Penduduk Usia Sekolah (7–23 Tahun) 2020-2050

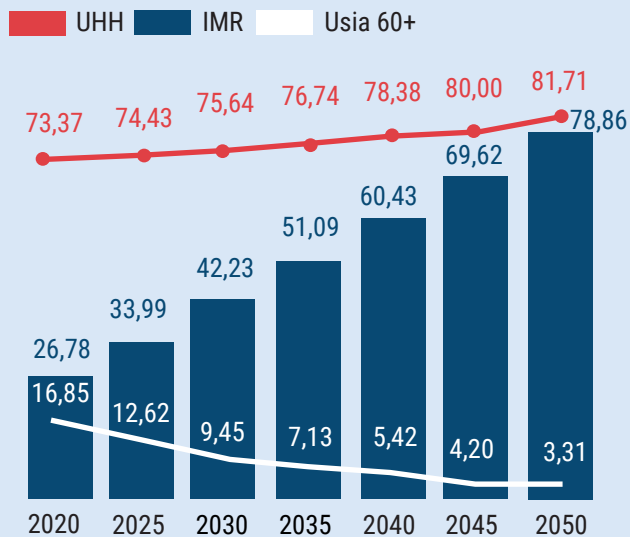
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050



4.3 KESEHATAN MASYARAKAT

Gambar 52. Proyeksi Penduduk Usia 60+ Tahun, IMR, dan UHH Indonesia 2020-2050

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050



Pilar pembangunan Indonesia 2045 aspek pembangunan manusia dan kesehatan adalah peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Strategi program peningkatan pelayanan kesehatan dapat dilakukan melalui cakupan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan esensial, termasuk pelayanan persalinan (bagi ibu hamil) yang memenuhi kriteria ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas. Selain itu, diperlukan peran serta masyarakat melalui kelompok atau organisasi yang ada di masyarakat seperti pos pelayanan terpadu (Posyandu) dan pos pembinaan terpadu (Posbindu), sosialisasi akan pentingnya berperilaku hidup sehat termasuk pemenuhan gizi keluarga yang seimbang, serta skrining berkala terhadap penyakit menular dan tidak menular.

Penurunan IMR dan peningkatan UHH sebagai indikator kesehatan masyarakat mengindikasikan kesehatan masyarakat yang semakin baik. IMR Indonesia di masa depan diproyeksikan semakin menurun, sebaliknya UHH semakin meningkat. Kondisi tersebut diikuti dengan perubahan struktur umur penduduk dimana jumlah penduduk lansia 60 tahun ke atas berkembang pesat. Lansia adalah salah satu kelompok penduduk rentan terhadap masalah kesehatan karena kondisi fisik yang mengalami penurunan. Oleh sebab itu, pemerintah harus mulai menerapkan kebijakan yang ramah lansia.

Salah satu program yang dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan di masa yang akan datang adalah program *Long-Term Care* (LTC). *Long-Term Care* merupakan program perawatan jangka panjang yang dikhususkan bagi lansia yang memiliki masalah kesehatan namun tidak mendapatkan penjangaan dari keluarga ataupun kerabat lainnya. Absennya perhatian tersebut bisa diakibatkan oleh ketiadaan anggota keluarga ataupun permasalahan ekonomi. Kedua hal tersebut perlu diantisipasi dengan memperbanyak perawat LTC ataupun komunitas yang peduli terhadap kondisi para lansia tersebut. Selain itu, pemanfaatan teknologi yang semakin maju juga dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pada lansia yang mengalami kesepian dalam kehidupan sehari-hari.

Para lansia yang hidup sendiri cenderung mengalami depresi akibat dari kesendirian yang dirasakan. Untuk itu, para lansia tersebut memerlukan teman untuk menceritakan keluhan kesahnya. Komunitas lansia dapat dijadikan solusi untuk mengatasi masalah kesendirian tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat membantu lansia menceritakan keluhan kesah yang ingin dicurahkan. *Artificial Intelligence* (AI) dapat digunakan sebagai tempat lansia bercerita masalah yang dirasakannya. AI juga dapat dijadikan penolong bagi lansia yang hidup sendiri. Apabila lansia yang tinggal sendiri membutuhkan pertolongan darurat, lansia tersebut dapat meminta AI untuk melakukan panggilan terhadap pertolongan darurat.

Selain itu, pelayanan kesehatan untuk lansia secara tradisional tetap diperlukan seperti puskesmas, khususnya Puskesmas Santun Lansia. Puskesmas Santun Lansia bertujuan meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan lansia untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kriteria Puskesmas Santun Lansia dilihat dari pemberian pelayanan oleh petugas terlatih, prioritas pelayanan, penyediaan sarana-prasarana yang aman dan mudah diakses, pelayanan pro-aktif, dan koordinasi lintas program. Tiga tingkatan Puskesmas Santun Lansia, yaitu strata I (pratama), strata II (madya), dan strata III (paripurna).

Selain lansia, pemerintah perlu memperhatikan derajat kesehatan dari ibu hamil dan balita. Pada masa yang akan datang diharapkan AKI dan IMR dapat setara dengan negara maju. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang tepat agar tujuan tersebut tercapai. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah adalah memastikan akses ibu hamil terhadap layanan kesehatan mudah dan terjangkau. Hal tersebut dicapai tidak hanya dengan membangun puskesmas namun dengan cara yang lebih canggih yaitu dengan *telemedicine*.

Pemerintah perlu membangun infrastruktur yang sesuai untuk mendukung program *telemedicine* tersebut. Dengan program tersebut, ibu hamil tidak perlu jauh-jauh datang ke layanan kesehatan. Namun, para ibu hamil dapat terus berkonsultasi dengan dokter lewat *telemedicine*. Jaringan internet yang baik serta keahlian dokter yang tepat merupakan syarat mutlak dalam penyelenggaraan *telemedicine*. Selanjutnya, pemerintah tetap perlu memastikan privasi dari pasien pengguna *telemedicine* tersebut, sehingga tidak terjadi kebocoran data kesehatan di masa mendatang.

4.4 PERLINDUNGAN SOSIAL

Pilar pembangunan Indonesia 2045 aspek pemerataan pembangunan dan kesejahteraan adalah percepatan pengentasan kemiskinan. Dalam percepatan pengentasan kemiskinan, melalui sistem perlindungan sosial akan berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Strategi perlindungan sosial dapat berupa terjaminnya akses pada pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan; jaminan keamanan pada kebutuhan dasar terutama untuk anak-anak dengan ketersediaan dan kecukupan gizi, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya; serta jaminan penghasilan dasar bagi penduduk usia kerja yang tidak memperoleh penghasilan cukup, atau dalam kondisi sakit, sedang mencari pekerjaan, persalinan (bagi ibu hamil) dan bagi penyandang disabilitas. Sebagai tambahan, jaminan pendapatan dasar serta LTC bagi lansia juga diperlukan.

Dalam konteks Indonesia di masa depan, penuaan penduduk menjadi isu esensial dimana penduduk lansia lebih rentan terhadap kemiskinan. Menurut data saat ini, satu dari dua

orang lansia masih aktif bekerja. Sebagian besar alasan lansia bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penduduk usia kerja atau usia produktif saat ini, di masa depan akan memasuki masa lansia dan masa pensiun. Mereka yang berusia sekitar 30 tahun akan menjadi lansia tiga puluh tahun ke depan.

Pemerintah harus segera memulai mengubah layanan perlindungan sosial menjadi basis digital. Hal ini diperlukan agar kesalahan yang terjadi baik dalam penyaluran maupun pemanfaatan dapat berkurang. Dengan menggunakan teknologi, pemerintah dapat memanfaatkan *machine learning* untuk membuat algoritma agar hanya penduduk yang berhak yang dapat menerima bantuan. Selain itu, pemerintah juga dapat mengawasi bantuan yang diberikan digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan peruntukan awal apabila bantuan yang diberikan dalam bentuk digital melalui sistem pembayaran.

Lebih lanjut, jaminan sosial merupakan isu lintas sektor. Strategi pelaksanaan lintas sektor dapat diawali dengan menentukan penduduk yang menjadi target sasaran. Selanjutnya, strategi yang dapat dilakukan yaitu mengembangkan kerangka regulasi secara bersama, fleksibel, dan *applicable* dengan perubahan atau disesuaikan dengan kondisi lokal; menyusun sistem *monitoring* dan evaluasi implementasi kebijakan lintas sektor dan indikatornya; serta memanfaatkan sumber daya yang ada sesuai potensi lokal, termasuk partisipasi masyarakat untuk menjamin penduduk telah mendapatkan perlindungan dan bantuan yang memadai.

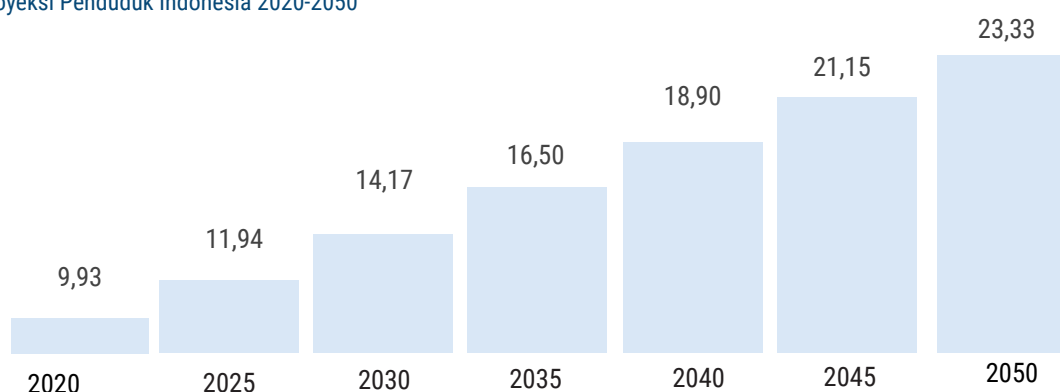
Perlindungan sosial dalam kerangka kebijakan jangka panjang dan berkelanjutan yaitu dengan menyusun sistem perlindungan sosial yang efektif dan terukur. Sistem pembiayaan memerlukan dukungan politik, pemangku kebijakan, dan peran serta masyarakat untuk secara bersama-sama menanggung sisi pembiayaan yang berkelanjutan sebagai agenda perlindungan sosial.

4.5 MEMPERSIAPKAN LANSIA MANDIRI

Proporsi lansia yang berusia 60+ tahun ke atas pada tahun 2045 akan mencapai 21 persen, meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berada di level 10 persen. Untuk mengantisipasi lonjakan lansia tersebut pemerintah perlu menyiapkan strategi khusus. Strategi yang harus disiapkan adalah strategi yang bersifat komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan lansia mulai dari kesehatan hingga perekonomian. Terdapat lima strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung kehidupan lansia yang bermartabat di masa mendatang.

Gambar 53. Proyeksi Proporsi Lansia 2020-2050 (Skenario Optimis)

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050



Strategi pertama, pemerintah perlu memperpanjang usia pensiun dari kondisi saat ini, yaitu pensiun pada usia 58 tahun. Hal ini diperlukan agar para pekerja dapat mempersiapkan masa lansianya dengan lebih baik, dari aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan lainnya. Namun demikian, pemerintah perlu memperhatikan efek dari memperpanjang usia pensiun bagi pekerja muda. *Crowding out* yang dihasilkan dari kebijakan memperpanjang usia pensiun adalah sulitnya angkatan kerja muda untuk masuk ke dalam dunia kerja. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya pekerja usia lanjut yang lebih berpengalaman menghambat masuknya angkatan kerja muda ke dunia kerja.

Strategi kedua yang perlu pemerintah terapkan adalah strategi memperluas kesempatan kerja yang lebih spesifik, terpilah jenis pekerjaan untuk tenaga kerja muda dan tenaga kerja lansia. Selain untuk memperkecil efek dari *crowding out* akibat kebijakan memperpanjang usia pensiun pekerja, strategi ini juga untuk memastikan pembagian jenis pekerjaan yang jelas antara pekerja muda dan lansia.

Strategi ketiga adalah memastikan para penduduk produktif menjaga pola konsumsi berkesinambungan sehingga menjadi lebih sehat saat memasuki usia lansia. Pemerintah perlu mempromosikan pola hidup sehat. Selain itu, mempromosikan hidup sehat sejak muda berarti mengurangi risiko terjangkit penyakit kronis saat tua, sehingga pengeluaran untuk kesehatan di masa lansia dapat ditekan dan digunakan untuk investasi kepada SDM yang lebih muda.

Strategi keempat yang perlu diterapkan oleh pemerintah dalam mengantisipasi peningkatan lansia adalah memastikan Usia Harapan Hidup Sehat (UHHS) juga meningkat. Dengan memastikan UHHS meningkat, pemerintah juga memonitor berapa banyak lansia yang memerlukan bantuan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Selain itu, indikator UHHS juga berguna dalam menghitung potensi tingkat produktivitas dari lansia, sampai usia berapa lansia dapat bekerja secara optimal sebelum harus berhenti karena masalah kesehatan. Dengan demikian, potensi penerimaan dari aset yang ditabung melalui instrumen investasi juga dapat dihitung.

Strategi kelima adalah memastikan tabungan, investasi, maupun akumulasi aset lainnya dari penduduk dapat dimanfaatkan untuk perekonomian dan memacu bonus demografi kedua. Selain itu, perlu dipastikan agar jaminan sosial juga melindungi lansia, baik dalam hal kesehatan maupun jaminan masa tua atau pensiun. Kedua jaminan tersebut berfungsi untuk memastikan para pekerja dapat menabung pada masa produktifnya dengan percaya diri, sehingga akumulasi aset para pekerja menjadi lebih besar.

4.6 KETENAGAKERJAAN

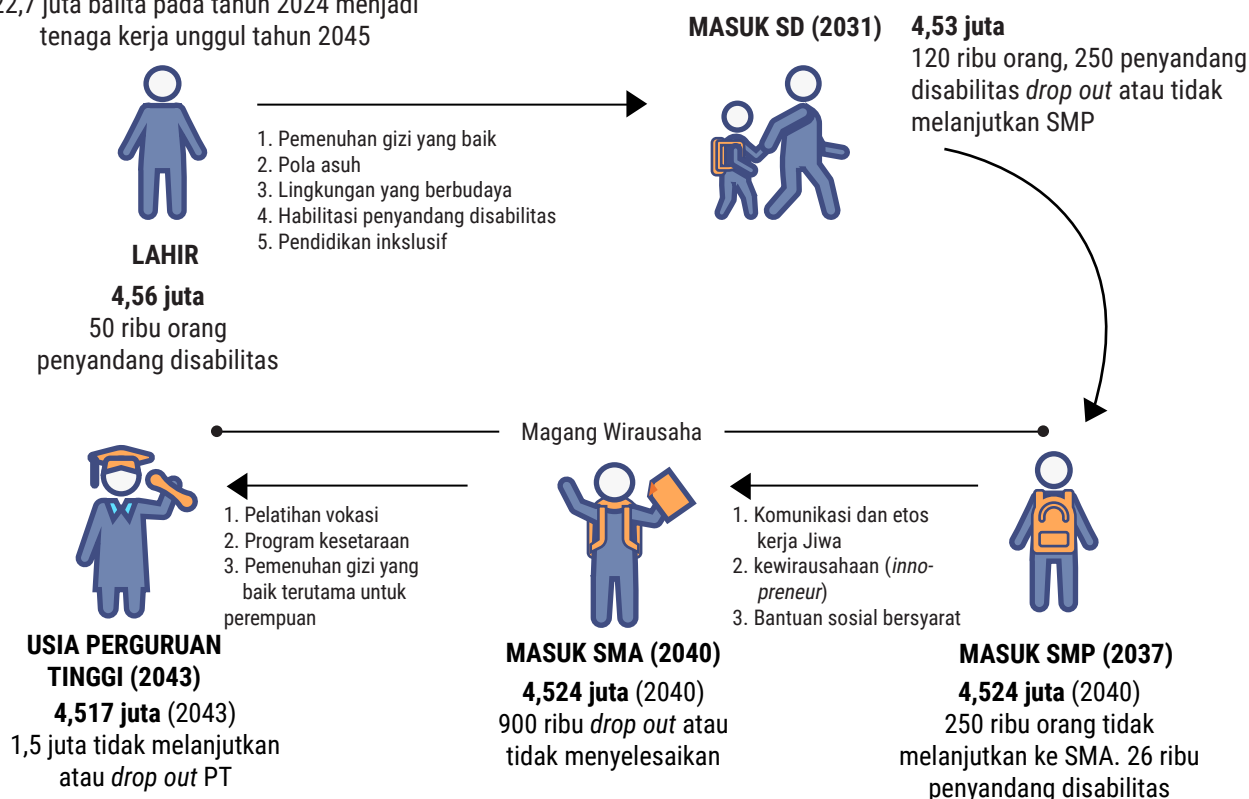
Selain memperluas kesempatan kerja, tenaga kerja juga perlu disiapkan untuk mengisi pekerjaan yang nantinya tersedia. Persiapan tenaga kerja harus dipersiapkan sejak usia dini, bahkan sebelum lahir. Bayi yang lahir saat ini akan menjadi tenaga kerja unggul pada tahun 2045 nantinya.

Menuju Indonesia 2045, reformasi ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja dan terciptanya lapangan kerja. Untuk itu, pemerintah menyiapkan tiga tahap reformasi ketenagakerjaan. Periode pertama, 2016-2025, berfokus pada reformasi peraturan ketenagakerjaan menuju reformasi pasar kerja yang fleksibel dan kebijakan transisi tenaga kerja formal dari informal. Adapun sasarannya adalah percepatan pelaksanaan wajib belajar dua belas tahun, tidak ada lagi angkatan kerja lulusan SMP, penguatan relevansi program pendidikan dan pelatihan, serta perluasan pelatihan berbasis kompetensi yang mendukung transformasi ke arah industri manufaktur.

Gambar 54. Persiapan Tenaga Kerja Sejak Dini

Persiapan Tenaga Kerja Sejak Dini *Social, Tactfulness, Adaptability, Resilience*

22,7 juta balita pada tahun 2024 menjadi tenaga kerja unggul tahun 2045



Periode kedua, 2026–2035, target utamanya adalah melanjutkan transformasi industri ke industri manufaktur; meningkatkan produktivitas pertanian; memperkuat daya saing sektor jasa ekonomi kreatif; memperluas transisi tenaga dari informal ke formal; memperkuat kelembagaan dan perluasan akses pelatihan, pendidikan, pemagangan, dan kewirausahaan berbasis kompetensi; serta memperkuat relevansi tenaga kerja lulusan sarjana terkait bidang inovasi dan teknologi informasi.

Periode ketiga, 2036–2045, berfokus pada membidik implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional kepada pekerja informal (bukan penerima upah), pencapaian kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja formal 85 persen, penerapan regulasi ketenagakerjaan yang lebih fleksibel dengan menitikberatkan keseimbangan perlindungan pekerja dan pemberi kerja, perluasan sistem pemagangan, keterkaitan erat antara sistem pelatihan dan kebutuhan industri, serta sertifikasi keahlian di seluruh sektor dan penerapannya di pasar kerja.

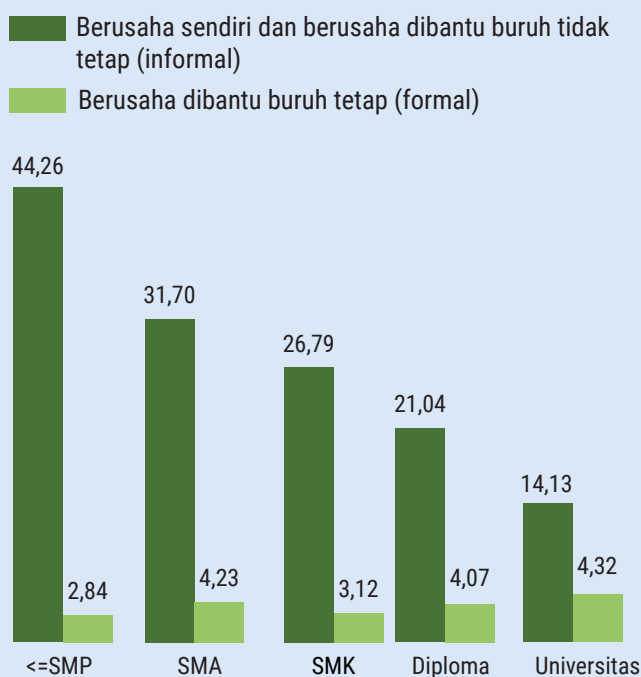
4.7 KEWIRAUSAHAAN

Penduduk usia 15 tahun ke atas berstatus berusaha menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dikategorikan menjadi tiga, yaitu berusaha sendiri tanpa dibantu buruh (termasuk kelompok pekerja informal), berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap (termasuk kelompok pekerja informal), serta berusaha dibantu buruh tetap (termasuk kelompok pekerja formal). Menurut data Sakernas Februari 2022, penduduk usia 15 tahun ke atas yang berusaha sendiri dan berstatus informal persentasenya lebih tinggi, yaitu 36,3 persen dibandingkan yang berstatus formal 3,3 persen.

Penduduk usia 15 tahun ke atas berpendidikan rendah ($\leq$ SMP) hingga pendidikan tinggi (universitas) yang berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap (informal) persentasenya lebih tinggi dibandingkan yang berstatus formal. Semakin tinggi pendidikan, persentase yang berusaha berstatus formal, lebih tinggi dibandingkan yang berstatus informal.

Gambar 55. Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Pendidikan yang Ditamatkan 2022

Sumber: BPS, 2022



Isu bidang kewirausahaan, menurut data Sakernas Februari 2022, penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus berusaha lebih banyak berusaha secara informal yaitu berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap. Selain itu, persentase penduduk usia muda (15-29 tahun) yang berusaha mandiri relatif rendah. Strategi kewirausahaan yang perlu dilakukan yaitu mengupayakan peningkatan status berusaha mandiri yang informal menjadi formal. Berusaha sendiri dibantu buruh tetap juga merupakan peluang terbukanya kesempatan kerja. Meningkatkan jumlah pekerja berstatus berusaha dibantu buruh tetap sekaligus sebagai upaya memperluas kesempatan kerja.

4.8 PANGAN DAN LINGKUNGAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis seiring dengan perubahan struktur penduduk. Pemenuhan pangan harus dipastikan bahwa bahan pangannya merupakan produk dalam negeri. Dengan demikian, selain kebutuhan pangan terpenuhi, keberlangsungan dari petani lokal juga dapat terjamin.

Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam masalah pangan adalah mengubah perilaku masyarakat agar tidak membuang limbah pangan sia-sia. Saat ini, Indonesia menghasilkan limbah makanan yang masih dapat dimanfaatkan sebesar 115-184 kilo gram per kapita per tahun (Bappenas, 2021). Hal ini tentunya sangat merugikan, mengingat limbah pangan tersebut setara dengan Rp213 triliun per tahunnya jika dimanfaatkan kembali. Apabila pola konsumsi dari masyarakat tersebut dapat diubah, akan terjadi banyak penghematan bahan pangan.

Kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah yaitu promosi mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan mengurangi sampah makanan. Dengan kedua hal tersebut diharapkan ke depannya masyarakat dapat menyadari pentingnya pemenuhan gizi seimbang dan juga pengurangan limbah pangan.

Selain itu, kesadaran akan pentingnya mengelola limbah pangan juga akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan. Selama ini, sampah menjadi pencemar utama yang

berdampak buruk terhadap kualitas lingkungan. Dengan berkurangnya sampah diharapkan kualitas lingkungan Indonesia ke depannya akan semakin baik. Kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah di antaranya adalah dengan mewajibkan masyarakat melakukan pemilahan sampah. Sampah yang telah terpilah akan lebih mudah dilakukan pengolahan. Sampah yang dapat dimanfaatkan akan didaur ulang ataupun dimanfaatkan sebagai bahan baku energi.

Energi juga berperan penting dalam pelestarian lingkungan. Jika ke depannya Indonesia masih memanfaatkan energi tidak terbarukan seperti batu bara maka akan terjadi dampak lingkungan yang lebih buruk dari sekarang. Semakin banyak bencana dapat terjadi dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu terus menggalakkan kebijakan pemanfaatan energi baru terbarukan dan ramah lingkungan.

4.9 MENDORONG PERPINDAHAN PENDUDUK YANG MERATA

Salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah dalam masa yang akan datang adalah mendorong perpindahan penduduk yang merata. Hal ini penting mengingat saat ini kondisi di Pulau Jawa sudah sangat padat penduduk sehingga daya dukung lingkungan menjadi menurun. Namun demikian, kebijakan migrasi yang memaksa penduduk untuk pindah sudah tidak dapat digunakan karena sudah ketinggalan zaman dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh sebab itu pemerintah perlu menerapkan kebijakan baru yang sama sekali berbeda.

Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam mendorong persebaran penduduk adalah membangun pusat pertumbuhan wilayah baru atau mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang. Selanjutnya, pemerintah perlu menyediakan kesempatan

kerja atau wirausaha dan pemberian bantuan permodalan serta sarana dan prasarana produksi. Lalu, pemerintah perlu menyediakan fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk. Kemudian, pemerintah juga harus menyediakan fasilitasi lahan dan perumahan yang terintegrasi dengan wilayah sekitarnya dalam satu kawasan pengembangan yang layak huni. Serta yang terakhir, pemerintah perlu memastikan pembangunan yang seimbang antara perdesaan dan perkotaan.

Pembangunan yang seimbang antara perdesaan dan perkotaan diperlukan agar urbanisasi dapat dikendalikan. Hal ini penting, agar tidak terjadi kepadatan penduduk di daerah perkotaan yang mengakibatkan daya dukung lingkungan di kota tersebut menjadi menurun. Selain itu, menjaga penduduk tetap di desa merupakan hal penting karena selama ini desa merupakan sumber pangan bagi penduduk Indonesia.

Terdapat empat strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong pembangunan yang seimbang antara perdesaan dan perkotaan. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas SDM, kelembagaan, dan kolaborasi para pihak dalam pengembangan ekonomi lokal di kawasan perdesaan. Hal ini penting agar kegiatan perekonomian di desa dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Kedua, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dasar, ekonomi (layanan keuangan), dan konektivitas di kawasan perdesaan. Ketiga, pemerintah perlu membantu mengembangkan komoditas unggulan lokal dan mendorong industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. Keempat, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengembangkan komoditas unggulan dan teknologi pertanian di perdesaan. Kedua strategi ini sejalan dengan strategi pertama yaitu pengembangan ekonomi lokal dan diperlukan agar penduduk usia kerja tidak perlu melakukan urbanisasi untuk mendapatkan pekerjaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil SUPAS 2015*. Jakarta.
- Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas. (2022). *Background Study: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045*. Jakarta.
- Francis, George & Kirkegaard, Emil O. W.. (2022). *National Intelligence and Economic Growth: A Bayesian Update*. The Mankind Quarterly. 63. 10.46469/mq.2022.63.1.2.
- Harmadi, S.H.B. (2016). *Analisis Data Demografi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2018). *Penduduk sebagai Modal Pembangunan*. Jakarta.
- Ogawa, N., Mansor, N., Lee, S.-H., Abrigo, M. R. ., & Aris, T. (2021). Population Aging and the Three Demographic Dividends in Asia. *Asian Development Review*, 38(1), 32-67.
- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (2019). *Indonesia-Country Note-PISA 2018 Results*. Paris: OECD Publishing
- United Nation Department of Economic and Social Affairs Population Division (UN DESA). (2022). *World Population Prospects 2022*. New York: United Nation Publication.
- United Nation Development Programme (UNDP). (2023). *Human Development Report 2021-2022: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World*. New York.